

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Utara

AGUSTUS 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Utara

AGUSTUS
2026

Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging market* untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kata Pengantar

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara. Kajian ini mengulas asesmen terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, inflasi, pembiayaan daerah dan akses keuangan UMKM, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian ke depan. Laporan diharapkan menjadi bahan referensi bagi stakeholders di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan penyusunan kebijakan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara.

Perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya akibat kontraksi pada Lapangan Usaha Pertambangan seiring penurunan produksi batubara pasca pembatasan RKAB tahun 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang masih positif ditopang oleh kinerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian. Dari sisi permintaan, perlambatan utamanya diakibatkan oleh terkontraksinya kinerja investasi. Sementara itu, komponen Net Ekspor dan Konsumsi Pemerintah tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kaltara dengan kinerja yang masih positif.

Analisis pada laporan perekonomian menggunakan data primer, data sekunder, serta informasi dari berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah daerah/pusat maupun swasta. Melalui kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan. Besar harapan kami bahwa hubungan kemitraan strategis yang terjalin selama ini dapat terus terjaga dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal di masa yang akan datang bagi semua kalangan, khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait perekonomian Provinsi Kaltara.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Utara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju.

Tarakan, 3 September 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Utara

Agus Taufik
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	x
Ringkasan Eksekutif	xiv
Tabel Indikator	xvi

01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1.	Gambaran Umum	2
1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	2
1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	8
1.4.	Kondisi Fiskal - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	13
1.5.	Kondisi Fiskal - APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara	16
1.6.	Dana Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat	17
Boks 1	Konsultasi Regional (KONREG) Kasulampua 2026 : “Kedaulatan Pangan untuk Mendukung Petumbuhan Ekonomi Inklusif di wilayah Kasulampua”	19

02

Perkembangan Inflasi Daerah

2.1	Gambaran Umum	24
2.2	Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)	24
2.3	Inflasi Tahunan (yoy)	26
2.4	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	27
2.5	Upaya Pengendalian Inflasi Daerah	29
2.6	Tracking Inflasi Triwulan III 2026	31
2.7	Prakiraan Inflasi Triwulan III 2026	32
Boks 2	Launching Mini Distribution Center (MDC) : Inovasi Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026	33

03

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

3.1	Intermediasi dan Pertumbuhan Aset Perbankan	36
3.2	Pembiayaan Daerah	38
3.3	Pembiayaan Sektor Korporasi	39
3.4	Pembiayaan Sektor Rumah Tangga	40
3.5	Pengembangan Akses Keuangan UMKM	40
Boks 3	Dukungan Bank Indonesia dalam Mengakselerasi Terwujudnya Rantai Nilai Halal di Kalimantan Utara	43

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1.	Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai	48
4.2.	Pengelolaan Uang Rupiah	48
4.3.	Perkembangan QRIS	51
4.4.	Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Utara	52
4.5.	Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	52
Boks 4	High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Peluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I Kabupaten Bulungan	53
Boks 5	Ekspedisi Rupiah Kalimantan 2026	55

05

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1.	Ketenagakerjaan	60
5.2.	Kesejahteraan	62
5.2.1.	Kemiskinan	62
5.2.2.	Nilai Tukar Petani	64
5.2.3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65
5.2.4.	GINI Ratio	66

06

Prospek Perekonomian Daerah

6.1.	Prospek Perekonomian Global	70
6.2.	Prospek Perekonomian Indonesia	71
6.3.	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltara	71
6.4.	Prospek Inflasi Kalimantan Utara	73

Daftar Grafik

01

Grafik I.1.	Pangsa Ekonomi Kalimantan Triwulan II 2026	2
Grafik I.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara dan Nasional	2
Grafik I.3.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Triwulan II 2026	2
Grafik I.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Lapangan Usaha Pertambangan	3
Grafik I.5.	Volume Ekspor Batu Bara Tiongkok dan India	4
Grafik I.6.	Volume Impor Batu Bara Tiongkok	4
Grafik I.7.	Harga Batubara Acuan	4
Grafik I.8.	Kredit Pertambangan Kaltara	4
Grafik I.9.	Ekspor Batu Bara	5
Grafik I.10.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara - Pertanian	5
Grafik I.11.	Volume Ekspor Udang	5
Grafik I.12.	Volume Ekspor Rumput Laut	5
Grafik I.13.	Volume Ekspor Ikan	5
Grafik I.14.	Harga TBS	6
Grafik I.15.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Perdagangan	6
Grafik I.16.	IKK, IKE, dan IEK Kaltara	6
Grafik I.17.	Volume Penjualan Kendaraan Roda Dua	6
Grafik I.18.	Volume Penjualan Kendaraan Roda Empat	6
Grafik I.19.	Kredit Perdagangan Kaltara	7
Grafik I.20.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konstruksi	7
Grafik I.21.	Penjualan Semen Kaltara	7
Grafik I.22.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Industri Pengolahan	7
Grafik I.23.	Volume Ekspor Plywood	8
Grafik I.24.	Kredit Industri Pengolahan Kaltara	8
Grafik I.25.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Rumah Tangga	9
Grafik I.26.	Indeks Survei Konsumen	9
Grafik I.27.	Kredit Konsumsi	9
Grafik I.28.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – PMTB	9
Grafik I.29.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	10
Grafik I.30.	Penanaman Modal Asing (PMA)	10
Grafik I.31.	Impor Barang Modal	10
Grafik I.32.	Kredit Investasi Kaltara	10
Grafik I.33.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Pemerintah	10
Grafik I.34.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Ekspor Luar Negeri	11
Grafik I.35.	Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltara	11
Grafik I.36.	Ekspor Batu bara	11
Grafik I.37.	Ekspor Plywood	11
Grafik I.38.	Ekspor Udang	12
Grafik I.39.	Ekspor Ikan	12
Grafik I.40.	Komoditas Utama Ekspor Triwulan II 2026	12
Grafik I.41.	Negara Utama Tujuan Ekspor Triwulan II 2026	12

Grafik I.42.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Impor	12
Grafik I.43.	Komoditas Utama Impor Triwulan II 2026	12
Grafik I.44.	Negara Utama Asal Impor Triwulan II 2026	13
Grafik I.45.	Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026	14
Grafik I.46.	Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026	16
Grafik I.47.	Realisasi Belanja K/L di Provinsi Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026 (dalam miliar Rupiah)	18
Grafik I.48.	Tingkat Serapan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kaltara Triwulan II 2026	18

02

Grafik II.1.	Inflasi Gabungan Kota IHK di Kaltara & Nasional	24
Grafik II.2.	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di Kalimantan Triwulan II 2026	24
Grafik II.3.	Perkembangan Inflasi Bulanan Kalimantan Utara	31
Grafik II.4.	Perkembangan Harga Bulanan Pangan Strategis Kalimantan Utara	32

03

Grafik III.1.	Perkembangan Intermediasi Perbankan	36
Grafik III.2.	Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	36
Grafik III.3.	Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	36
Grafik III.4.	Perkembangan Pertumbuhan Komponen DPK Perbankan Kaltara	37
Grafik III.5.	Perkembangan Komponen DPK Perbankan Kaltara	37
Grafik III.6.	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	37
Grafik III.7.	Perkembangan NPL Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	37
Grafik III.8.	Perkembangan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara	38
Grafik III.9.	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara	38
Grafik III.10.	Perkembangan Kredit Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha	39
Grafik III.11.	Perkembangan Kredit Korporasi Kaltara	39
Grafik III.12.	Pangsa Kredit Korporasi	39
Grafik III.13.	LS Kap. Utilisasi, LS P. Domestik dan PDRB Ekspor LN (RHS)	39
Grafik III.14.	LS Harga Jual dan Harga Batu bara	39

Grafik III.15.	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara	40
Grafik III.16.	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara Berdasarkan Jenisnya	40
Grafik III.17.	Perkembangan Kredit Rumah Tangga dan NPL RT Kaltara	40
Grafik III.18.	Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltara	41
Grafik III.19.	Perkembangan Kredit UMKM Kaltara	41
Grafik III.20.	Perkembangan Kredit UMKM Kaltara Berdasarkan Jenisnya	41
Grafik III.21.	Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Kaltara	41
Grafik III.22.	Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara	41
Grafik III.23.	KUR Kaltara	41
Grafik III.24.	Komposisi KUR Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara	41
Grafik III.25.	Komposisi KUR Berdasarkan Kab/Kota di Kaltara	41

04

Grafik IV.1.	Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltara	48
Grafik IV.2.	Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltara	48
Grafik IV.3.	Perkembangan Nominal BI-RTGS Kaltara	48
Grafik IV.4.	Perkembangan Volume BI-RTGS Kaltara	48
Grafik IV.5.	Perkembangan Aliran Uang Keluar/Masuk	49
Grafik IV.6.	Denominasi <i>Outflow</i> Uang Kartal Kaltara Triwulan II 2026	49
Grafik IV.7.	Denominasi <i>Outflow</i> Uang Logam Kaltara Triwulan II 2026	49
Grafik IV.8.	Denominasi <i>Inflow</i> Uang Kartal Kaltara Triwulan II 2026	49
Grafik IV.9.	Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)	50
Grafik IV.10.	Kontribusi <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara	51
Grafik IV.11.	Kontribusi <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Utara	51
Grafik IV.12.	Perkembangan APMK	52

05

Grafik V.1.	Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja	60
Grafik V.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltara	60
Grafik V.3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kaltara periode 2024 – 2026	63
Grafik V.4.	Perkembangan Penduduk Miskin Kaltara di Perkotaan dan Desa periode 2025 dan 2026	63
Grafik V.5.	Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Periode 2022-2026	64
Grafik V.6.	NTNP, Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	65
Grafik V.7.	NTNP, NTN, dan NTPI	65
Grafik V.8.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara	

Daftar Tabel

Tabel I.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	3
Tabel I.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	8
Tabel I.3.	Nilai Perdagangan Internasional Kaltara	11
Tabel I.4.	Pagu dan Realisasi APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026	13
Tabel I.5.	Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026	14
Tabel I.6.	Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026	15
Tabel I.7.	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026	16
Tabel I.8.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026	17
Tabel I.9.	Realisasi Belanja K/L di Wilayah Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026	18
Tabel II.1.	Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan II 2026 (mtm)	24
Tabel II.2.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota Kaltara selama Triwulan II 2026 (mtm)	25
Tabel II.3.	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan II 2026 (mtm)	26
Tabel II.4.	Inflasi Umum/Total Tahunan Kaltara 2022-2026 (yoy)	27
Tabel II.5.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Gabungan Triwulan II 2026 (yoy)	27
Tabel II.6.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan II 2026 (yoy)	27
Tabel II.7.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan II 2026 (yoy)	28
Tabel II.8.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan II 2026 (yoy)	29
Tabel II.9.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Triwulan II 2026 (yoy)	29
Tabel II.10.	Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama Triwulan II 2026	30
Tabel III.1.	Perkembangan DPK secara spasial	37
Tabel III.2.	Perkembangan Kredit Secara Spasial	37
Tabel III.3.	Klasifikasi Penyaluran Kredit Kaltara Berdasarkan Nilai	38
Tabel IV.1.	Perkembangan NMR Provinsi Kaltara	51
Tabel IV.2.	Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Utara	52

Tabel V.1.	Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltara	60
Tabel V.2.	Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltara	61
Tabel V.3.	Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	62
Tabel V.4.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	62
Tabel V.5.	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kaltara	64
Tabel V.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Dimensi Penyusunnya	65
Tabel V.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan	66
Tabel V.8.	GINI Ratio Penduduk di Kaltara Menurut Daerah	66
Tabel V.9.	Perbandingan GINI Ratio Se-Kalimantan	66
Tabel VI.1.	Perbandingan Ekonomi Negara Lain	70

Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Perekonomian Kalimantan Utara triwulan II 2026 tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertambangan, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan yang berkontraksi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kaltara yang positif ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian. Kinerja LU Pertambangan berkontraksi akibat penurunan produksi batubara pasca kebijakan pembatasan RKAB tahun 2026. Sementara itu, LU Konstruksi juga berkontraksi akibat finalisasi pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Disisi lain, kinerja Industri Pengolahan tumbuh tinggi pada triwulan II 2026 didorong oleh peningkatan hasil produksi kayu dan industri kertas serta terdapat komoditas baru yaitu Aluminium. LU Perdagangan utamanya didorong oleh peningkatan produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang masih terjaga. LU Pertanian didorong oleh peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan komoditas perikanan tangkap. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 juga termoderasi akibat kinerja investasi sejalan dengan selesainya pembangunan KIHI namun masih ditopang dengan meningkatnya kinerja Net Ekspor komoditas baru di Kaltara.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,30% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,12% (yoy) dan juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,38% (yoy). Secara tahunan, capaian tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional meskipun tekanan yang lebih tinggi tercatat pada triwulan laporan. Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai rawit, bawang merah, dan beras, sejalan dengan dinamika pasokan dari daerah sentra produksi. Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya dari komoditas emas perhiasan yang mencatat inflasi tahunan tinggi sejalan dengan masih tingginya harga emas global. Tekanan dari sisi transportasi juga tercatat, terutama dari komoditas angkutan udara dan bensin yang meningkat pada akhir triwulan. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas secara tahunan, terutama ikan layang/ikan benggol, bawang putih, dan telur ayam ras, yang mencerminkan membaiknya pasokan.

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh intermediasi perbankan. Penyaluran kredit tumbuh di atas level regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 5,05 % (yoy) dan 56,55% (yoy). Meningkatnya penyaluran kredit sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi yang sudah dilakukan selama triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp14,3 Triliun atau 10,14 % dari target investasi 2026 yang ditetapkan sebesar Rp141 Triliun. Meningkatnya kredit modal kerja terjadi seiring optimisme masyarakat terhadap perekonomian, terutama pada sektor bisnis.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai di Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan II 2026 menunjukkan perkembangan positif seiring dengan berlanjutnya digitalisasi transaksi ekonomi dan keuangan. Transaksi SKNBI pada Triwulan II 2026 tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume, masing-masing sebesar 0,78% dan 2,43% (yoy), sementara transaksi BI-RTGS juga mencatat pertumbuhan positif dengan nominal meningkat 12,41% dan volume 28,63% (yoy), mencerminkan tetap kuatnya aktivitas transaksi bernilai besar. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, aliran uang kartal mencatat net outflow sebesar Rp307,65 miliar, seiring outflow yang lebih besar dibandingkan inflow. Distribusi Uang Layak Edar (ULE) tetap didominasi oleh pecahan besar, sementara pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) meningkat menjadi Rp25,66 miliar dengan rasio pemusnahan terhadap inflow sebesar 8,84%. Sejalan dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, jumlah pengguna QRIS meningkat menjadi 147.818 pengguna dan jumlah merchant mencapai 116.472 merchant, dengan dominasi pada segmen Usaha Mikro serta penyebaran yang semakin luas di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Penggunaan APMK juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan volume transaksi mencapai 292,52 ribu transaksi atau tumbuh 5,86% (yoy). Selain itu, kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tetap terjaga, tercermin dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara yang masih berada pada tahap Digital.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara hingga triwulan II 2026 secara umum tetap terjaga. TPT pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,90%, sementara optimisme masyarakat terhadap pasar kerja semakin kuat, tercermin dari indeks perkiraan ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang sebesar 127,14, meningkat 2,10% (yoy). Kualitas hidup masyarakat juga terus membaik, tercermin dari IPM 2025 sebesar 74,04, sementara ketimpangan pendapatan tetap berada dalam kategori rendah dengan Gini Ratio Maret 2026 sebesar 0,253 dan porsi pengeluaran 40% terbawah meningkat menjadi 25,00%. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara tetap stabil, didukung oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia, distribusi pengeluaran yang semakin merata, serta optimisme terhadap prospek pasar kerja.

Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 6,3%-7,1% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh akselerasi LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. LU Industri Pengolahan diperkirakan meningkat sejalan dengan operasionalisasi produksi komersial dan ekspor dari smelter aluminium di Bulungan serta kontribusi produksi dan pengiriman bubur kertas (pulp) dari perusahaan penghasil bubur kertas di Tarakan. LU Perdagangan juga diperkirakan tumbuh meningkat seiring peningkatan pasokan dan distribusi barang untuk mendukung aktivitas industri, pembangunan kawasan, serta konsumsi masyarakat. Sementara itu, LU Konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat seiring sejumlah proyek strategis utama memasuki tahap finalisasi, dengan aktivitas konstruksi masih ditopang oleh pembangunan yang dilakukan oleh Industri Pengolahan, proyek *real estate*, dan pengembangan kawasan industri. Namun demikian, LU Pertambangan diperkirakan tumbuh melambat akibat harga batu bara saat ini dan sepanjang 2026 yang diperkirakan masih tetap tinggi, dengan risiko bias ke bawah pembatasan RKAB batu bara secara nasional, melemahnya permintaan ekspor, serta seiring habisnya cadangan batubara pada salah satu lokasi pertambangan di Bulungan.

Dari sisi harga, inflasi Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran inflasi nasional. Tekanan inflasi terutama perlu diwaspadai dari risiko gangguan produktivitas pertanian akibat anomali cuaca panas, kenaikan biaya produksi dan logistik, serta fluktuasi harga energi global. Ke depan, sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat melalui akselerasi program MBG, KDKMP, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.



Tabel Indikator Makroekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

%YOY	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II
PDRB Total	4,82	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56	5,23	4,96
Berdasarkan Lapangan Usaha												
Pertanian	4,94	1,73	2,80	-2,27	1,75	1,29	3,42	3,84	1,79	2,60	2,23	3,39
Pertambangan	0,48	0,10	-0,33	0,88	0,28	0,31	-0,78	-2,71	-1,17	-1,09	-3,13	-1,96
Industri Pengolahan	2,43	5,47	6,35	6,69	5,26	9,68	8,34	8,02	9,89	8,99	6,48	28,06
Listrik dan Gas	12,72	-5,32	3,97	-8,23	0,01	6,80	3,29	0,55	6,01	4,07	3,52	190,26
Air	7,29	8,82	6,20	7,17	7,36	6,33	2,44	0,35	0,63	2,39	-0,32	34,34
Konstruksi	11,17	11,97	8,20	16,22	11,95	3,69	11,86	13,83	14,38	11,17	17,62	-3,23
Perdagangan	10,17	10,67	9,59	9,12	9,87	9,08	10,35	9,35	10,55	9,84	9,92	8,68
Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,44	7,12	2,54	5,51	7,34	4,50	6,57	5,46	5,94	3,29	-0,42
Akomodasi dan Makan Minum	9,16	10,53	12,94	12,44	11,30	9,34	9,17	10,04	11,27	9,99	15,90	13,18
Informasi dan Komunikasi	6,92	4,89	4,69	4,08	5,12	2,38	4,12	6,21	5,48	4,56	5,07	3,80
Jasa Keuangan	9,06	6,82	6,23	3,72	6,41	4,19	0,03	-0,44	11,58	3,85	4,41	10,70
Real Estate	3,68	3,98	4,41	5,64	4,44	3,38	5,45	5,04	10,64	6,17	13,13	16,49
Jasa Perusahaan	1,41	3,49	3,38	4,14	3,12	3,01	-0,78	0,26	7,45	2,52	8,29	12,15
Adm. Pemerintahan	-0,29	5,02	4,69	7,25	4,37	8,75	-5,52	-2,61	0,57	-0,03	13,56	10,21
Jasa Pendidikan	3,59	3,42	7,42	7,31	5,46	1,36	-0,28	-1,38	6,71	1,65	2,72	8,22
Jasa Kesehatan dan Sosial	1,55	2,97	3,43	4,15	3,03	2,24	5,96	3,70	5,36	4,32	1,05	8,29
Jasa lainnya	7,78	7,06	6,86	5,60	6,81	2,87	5,65	5,22	9,65	5,89	6,72	6,17
Berdasarkan Pengeluaran												
Konsumsi Rumah Tangga	5,67	5,77	5,61	5,87	5,73	5,83	5,47	5,65	5,99	5,74	6,40	3,25
Konsumsi LNPRT	19,79	12,87	7,78	6,94	11,60	2,88	6,43	4,73	4,64	4,66	4,59	3,41
Konsumsi Pemerintah	8,34	4,65	9,03	12,65	8,89	9,06	-10,07	-2,59	-6,53	-3,79	16,88	20,89
PMTB	10,80	7,41	4,31	5,18	6,84	0,39	4,92	5,95	6,49	4,47	6,01	-0,99
Perubahan Inventori	1,48	2,62	-2,36	-8,87	-1,82	0,46	-0,24	-4,63	8,58	0,84	154,80	381,68
Ekspor	-0,83	2,46	3,09	3,34	2,01	2,53	2,74	2,88	3,74	2,98	5,41	3,95
Impor	-1,81	2,34	2,63	3,91	1,78	0,31	0,08	1,92	1,03	0,84	8,57	3,57

Sumber: BPS, diolah

Inflasi

Inflasi SBH 2018	2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
IHK Umum	4,61	5,17	6,64	4,74	4,17	2,91	2,16	2,44
Makanan, Minuman dan Tembakau	5,12	6,52	5,52	3,25	3,16	1,39	2,66	3,70
Pakaian dan Alas Kaki	0,22	0,56	0,59	0,64	0,70	0,37	0,14	-0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,27	0,41	1,19	1,23	0,88	0,97	1,39	0,96
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,95	6,05	6,39	7,31	4,15	1,98	0,92	-0,17
Kesehatan	1,91	1,42	1,46	1,55	0,58	0,95	0,84	0,85
Transportasi	15,65	14,20	27,88	15,74	16,11	12,33	4,69	5,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,23	0,27	0,39	0,41	0,13	0,04	0,09	0,16
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,60	0,29	0,44	0,44	0,32	0,29	0,29	0,24
Pendidikan	0,44	0,44	0,63	0,63	0,63	0,63	0,36	0,36
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	3,19	3,76	3,75	2,57	2,23	1,71	1,06	1,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,46	6,44	7,20	8,19	6,16	4,91	3,88	4,50

Sumber: BPS, diolah

Inflasi SBH 2022	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
IHK Umum	2,62	2,39	1,74	1,29	1,24	1,38	2,32	2,57	3,12	3,30
Makanan, Minuman dan Tembakau	6,28	4,78	2,87	1,56	3,01	1,36	3,50	2,32	1,44	3,05
Pakaian dan Alas Kaki	3,08	2,84	2,86	4,54	0,80	0,16	-0,10	0,08	-0,01	0,56
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,00	0,09	-0,33	-0,44	-3,38	0,63	2,73	3,12	6,67	3,06
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,20	-0,24	-0,30	-0,20	0,05	-0,11	-0,50	-0,64	-0,41	0,95
Kesehatan	0,49	0,59	0,63	0,77	1,55	1,41	8,31	8,40	8,01	8,26
Transportasi	0,92	1,90	0,79	0,05	-0,17	-0,60	-2,04	0,03	0,87	3,74
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,19	-0,23	-0,27	-0,15	-0,06	-0,20	-0,11	-0,22	-0,37	0,19
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,74	0,81	-0,29	-0,07	0,14	-0,83	1,11	1,39	1,25	1,54
Pendidikan	0,24	0,24	0,30	0,30	0,72	0,74	0,88	0,92	0,72	0,69
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,92	2,07	3,02	2,81	2,86	3,56	2,08	1,92	2,63	3,87
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,82	4,24	5,66	5,38	7,01	8,10	8,47	12,95	14,60	9,31

Sumber: BPS, diolah

*) Inflasi Kaltara dihitung menggunakan inflasi Kota Tarakan & Tanjung Selor hingga akhir 2023 (dengan SBH 2018), namun terhitung bulan Januari tahun 2024 telah ditambah Inflasi Kabupaten Nunukan (dengan SBH 2022).

Perbankan

%YOY	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
DPK dan Aset										
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	7,70	5,18	8,89	2,28	-3,10	-6,22	-4,49	-3,78	-2,13	-3,48
Giro	46,12	24,95	30,67	8,89	-5,07	-5,83	-6,17	-8,90	-24,55	-27,28
Tabungan	7,03	6,80	5,32	4,33	6,18	4,37	3,79	6,48	8,57	7,39
Deposito	-17,84	-11,16	-0,80	-10,19	-19,66	-25,79	-22,49	-23,35	1,56	-1,36
Aset	14,63	8,89	9,00	7,47	-2,14	-3,71	-1,31	16,76	17,49	20,93
Kredit										
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	22,66	23,57	9,51	20,14	27,51	41,53	55,67	68,24	75,88	74,67
Non Performing Loans (Lokasi Proyek)	0,98	1,12	0,94	0,92	1,04	0,98	0,95	2,14	0,72	0,64
Berdasarkan Jenis Penggunaan										
Modal Kerja	39,47	37,64	15,70	17,52	17,79	17,79	32,81	25,87	35,39	56,55
Investasi	20,30	23,27	-0,18	28,98	55,07	104,58	131,75	162,05	168,02	129,92
Konsumsi	9,84	10,96	13,23	14,01	13,09	11,60	9,95	7,89	7,04	5,05
Berdasarkan Sektor Ekonomi										
Pertanian dan Kehutanan	-9,69	-9,21	-12,10	-12,11	-9,43	-12,84	-9,26	-8,72	-25,31	-21,34
Perikanan	31,77	12,98	2,54	-7,60	-10,71	-12,76	-16,59	-16,60	-15,58	-12,26
Pertambangan	0,76	58,36	-6,59	-4,76	96,59	248,69	484,69	345,77	191,39	34,42
Industri Pengolahan	404,72	473,25	100,21	155,66	199,24	209,27	153,85	223,17	209,73	210,36
Listrik, Gas dan Air	1.469,73	1.767,47	-2,62	204,42	204,03	502,75	829,44	199,74	296,31	186,74
Konstruksi	32,73	3,69	-39,55	-48,81	-54,96	-54,62	-35,54	-18,47	22,78	19,03
Perdagangan Besar dan Eceran	13,33	10,04	-7,71	-10,28	-12,40	-8,83	6,96	1,79	1,30	0,83
Akomodasi dan Makan Minum	34,23	33,12	32,86	23,66	25,88	19,79	14,28	12,40	1,29	2,29
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	187,64	205,33	50,33	59,44	13,64	8,89	-4,44	22,07	7,33	4,59
Jasa Keuangan	-47,13	-63,98	-34,50	-0,10	55,96	114,57	139,08	69,49	14,68	-23,37
Real Estate dan Jasa Perusahaan	31,52	26,91	9,46	-12,05	-17,98	-23,35	-1,56	7,24	27,96	44,29
Administrasi Pemerintahan	-48,86	-40,85	39,15	117,60	244,42	275,81	90,38	29,85	11,04	-5,05
Jasa Pendidikan	66,67	62,26	86,24	46,07	14,71	1,89	-15,15	-15,84	-16,49	-2,39
Jasa Kesehatan dan Sosial	-40,58	-22,21	-5,49	124,54	71,26	69,77	60,93	8,39	37,33	-5,27
Jasa Kemasyarakatan	23,07	13,57	7,94	2,18	11,02	30,12	22,41	19,62	15,64	-8,88
Jasa Perorangan	1,28	4,17	-5,62	-19,61	-3,05	-2,73	3,95	10,00	-8,07	-14,44
Badan Internasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Tangga	9,84	10,96	13,23	14,01	13,09	11,60	9,95	7,89	7,04	5,05





Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Perekonomian Kalimantan Utara triwulan II 2026 tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertambangan, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan yang berkontraksi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kaltara yang positif ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian. Kinerja LU Pertambangan berkontraksi akibat penurunan produksi batubara paska kebijakan pembatasan RKAB tahun 2026. Sementara itu, LU Konstruksi juga berkontraksi akibat finalisasi pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Disisi lain, kinerja Industri Pengolahan tumbuh tinggi pada triwulan II 2026 didorong oleh peningkatan hasil produksi kayu dan industri kertas serta terdapat komoditas baru yaitu Aluminium. LU Perdagangan utamanya didorong oleh peningkatan produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang masih terjaga. LU Pertanian didorong oleh peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) dan komoditas perikanan tangkap. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 juga termoderasi akibat penurunan kinerja investasi sejalan dengan selesainya pembangunan KIHI namun masih ditopang dengan meningkatnya kinerja Net Ekspor komoditas baru di Kaltara.



1.1. Gambaran Umum

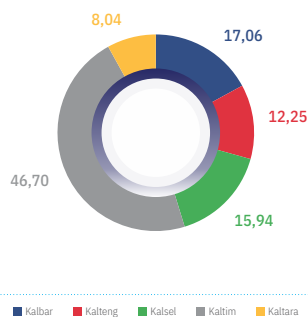
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan triwulan II 2026 tercatat tumbuh positif lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kalimantan tercatat sebesar 4,10% (yoy), tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,08% (yoy). Meningkatnya kinerja ekonomi Kalimantan didorong oleh perbaikan kinerja LU Pertambangan yang didominasi oleh peningkatan produksi batubara.

Pangsa ekonomi Kalimantan Utara di Pulau Kalimantan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I 2026¹. Pangsa Kalimantan Utara terhadap wilayah Kalimantan tercatat sebesar 8,04%, menurun terbatas dibandingkan dengan triwulan I 2026 dengan pangsa 8,13%. Pangsa ekonomi Kalimantan Utara relatif menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan. Selanjutnya, pangsa perekonomian terbesar wilayah Kalimantan masing-masing terdiri dari Provinsi Kalimantan Timur (46,70%), diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat (17,06%), Provinsi Kalimantan Selatan (15,94%), dan Provinsi Kalimantan Tengah (12,25%). (Grafik I. 1)

PDRB Kalimantan Utara triwulan II 2026 tercatat tumbuh positif namun melambat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 tercatat Rp42,47 Triliun (ADHB) atau Rp19,79 Triliun (ADHK). Secara tahunan, PDRB tersebut tumbuh 4,96% (yoy), positif namun melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,23% (yoy). Kinerja ekonomi Kaltara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu tumbuh sebesar 5,29% (yoy) (Grafik I. 2).

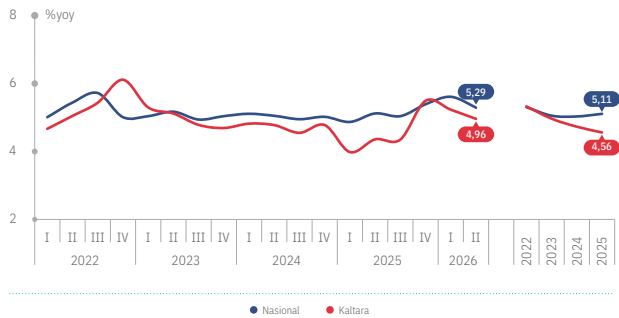
Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 Kalimantan Utara didorong sebagian besar komponen Lapangan Usaha. LU Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian yang menunjukkan kinerja positif dan menopang pertumbuhan ekonomi kaltara pada triwulan II 2026. Positifnya kinerja LU Industri Pengolahan didorong oleh peningkatan hasil

Grafik I.1. Pangsa Ekonomi Kalimantan Triwulan II 2026



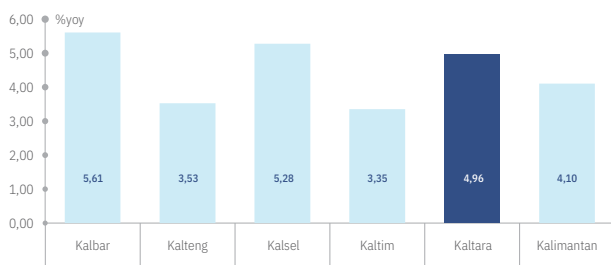
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.2. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Triwulan II 2026



Sumber: BPS, diolah

produksi kayu dan industri kertas serta terdapat komoditas baru yaitu Aluminium dari tenant di KIPI. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 1,96 % (yoy), seiring dengan penurunan produksi batu bara akibat pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Nasional.

Dari sisi pengeluaran, termoderasinya perekonomian Kalimantan Utara triwulan II 2026 diakibatkan oleh kinerja investasi yang berkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja Investasi Kaltara dengan andil -0,30% dari total PDRB Kaltara berkontraksi akibat berkurangnya realisasi investasi swasta dan telah selesainya pembangunan kawasan industri di KIPI. Namun demikian, kinerja net ekspor dan belanja pemerintah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan II 2026.

1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

LU Industri Pengolahan dan Pertanian menunjukkan kinerja yang positif lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan menopang pertumbuhan pada triwulan II 2026. Industri Pengolahan tumbuh tinggi pada triwulan II 2026 didorong oleh peningkatan hasil produksi kayu dan industri

Tabel I.1. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

Berdasarkan Lapangan Usaha	2024				2025					2026	
	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II
	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	2,80	-2,27	1,75	1,29	3,42	3,84	1,79	2,60	2,23	3,39
Pertambangan dan Penggalian	0,10	-0,33	0,88	0,28	0,31	-0,78	-2,71	-1,17	-1,09	-3,13	-1,96
Industri Pengolahan	5,47	6,35	6,69	5,26	9,68	8,34	8,02	9,89	8,99	6,48	28,06
Pengadaan Listrik, Gas	-5,32	3,97	-8,23	0,01	6,80	3,29	0,55	6,01	4,07	3,52	190,26
Pengadaan Air	8,82	6,20	7,17	7,36	6,33	2,44	0,35	0,63	2,39	-0,32	34,34
Konstruksi	11,97	8,20	16,22	11,95	3,69	11,86	13,83	14,38	11,17	17,62	-3,23
Perdagangan Besar & Eceran	10,67	9,59	9,12	9,87	9,08	10,35	9,35	10,55	9,84	9,92	8,68
Transportasi dan Pergudangan	6,44	7,12	2,54	5,51	7,34	4,50	6,57	5,46	5,94	3,29	-0,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,53	12,94	12,44	11,30	9,34	9,17	10,04	11,27	9,99	15,90	13,18
Informasi dan Komunikasi	4,89	4,69	4,08	5,12	2,38	4,12	6,21	5,48	4,56	5,07	3,80
Jasa Keuangan	6,82	6,23	3,72	6,41	4,19	0,03	-0,44	11,58	3,85	4,41	10,70
Real Estate	3,98	4,41	5,64	4,44	3,38	5,45	5,04	10,64	6,17	13,13	16,49
Jasa Perusahaan	3,49	3,38	4,14	3,12	3,01	-0,78	0,26	7,45	2,52	8,29	12,15
Administrasi Pemerintahan	5,02	4,69	7,25	4,37	8,75	-5,52	-2,61	0,57	-0,03	13,56	10,21
Jasa Pendidikan	3,42	7,42	7,31	5,46	1,36	-0,28	-1,38	6,71	1,65	2,72	8,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,97	3,43	4,15	3,03	2,24	5,96	3,70	5,36	4,32	1,05	8,29
Jasa lainnya	7,06	6,86	5,60	6,81	2,87	5,65	5,22	9,65	5,89	6,72	6,17
Produk Domestik Regional Bruto	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56	5,23	4,96

Sumber: BPS, diolah

kertas serta terdapat komoditas baru yaitu Aluminium. Selain itu, LU Pertanian juga memberikan kinerja yang baik pada triwulan II 2026 dengan peningkatan produksi TBS dan komoditas perikanan tangkap. Sejalan dengan itu, aktivitas Administrasi Pemerintahan juga meningkat ditopang oleh pembayaran gaji ke 13 untuk ASN.

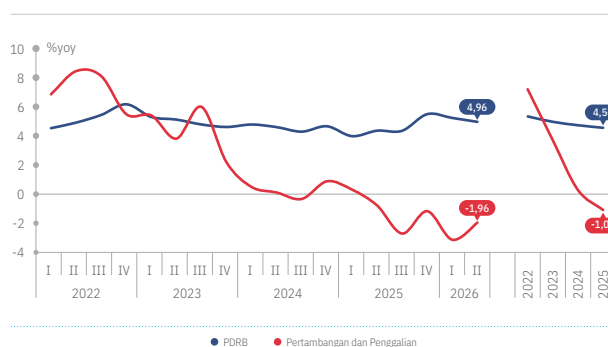
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan. Kinerja LU Pertambangan berkontraksi sebesar -1,96% (yoy), disebabkan hasil produksi batu bara yang menurun akibat pembatasan RKAB disertai dengan masih lemahnya permintaan negara mitra seperti Tiongkok. Meski demikian, struktur perekonomian Kaltara masih didominasi oleh LU Pertambangan dengan pangsa mencapai 22,52%, diikuti LU Pertanian (16,73%), LU Perdagangan Besar dan Eceran (13,94%), dan LU Konstruksi (12,18%). Secara akumulatif, keempat LU tersebut memiliki pangsa sebesar 65,38% terhadap perekonomian Kaltara.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan laporan berkontraksi sebesar 1,96% (yoy), membaik dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat -3,13% (yoy) dengan andil tahunan sebesar -0,47% terhadap PDRB Kaltara. Meskipun berkontraksi, LU Pertambangan dan Penggalian masih menjadi penyumbang

terbesar struktur ekonomi Kaltara dengan pangsa 22,52% (Grafik I.4).

Kondisi perlambatan ini tercermin dari aktivitas produksi yang menurun, diakibatkan oleh kebijakan pembatasan RKAB disertai dengan penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama (khususnya Tiongkok) akibat menurunnya kinerja perekonomian. Selain itu, peningkatan intensitas curah hujan di Kaltara juga mempengaruhi penurunan hasil produksi. Gambar I.1 menunjukkan bahwa Kaltara berada pada kondisi curah hujan menengah-tinggi pada triwulan II 2025. Di sisi lain, kondisi hujan yang terjadi di wilayah Kaltara selama triwulan II 2026 menghambat proses

Grafik I.4. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Lapangan Usaha Pertambangan

Sumber: BPS, diolah

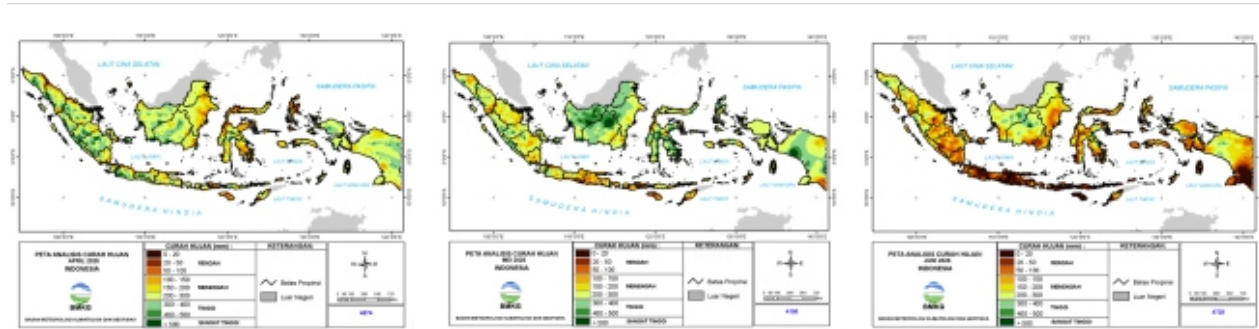
penambangan dan pengangkutan batu bara. Selain itu, permintaan global khususnya dari negara mitra dagang utama seperti Tiongkok pada triwulan II 2026 mengalami penurunan sebesar -5,93% (yoy) (Grafik I. 5). Berdasarkan data dari McCloskey, volume impor batu bara Tiongkok dari Indonesia pada triwulan II 2026 menurun menjadi 35,96 juta ton dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 52,59 juta ton atau turun -6,34% (yoy) (Grafik I. 6).

Namun demikian, dari sisi Harga Batu bara Acuan (HBA) pada triwulan II 2026 masih pada level USD114,6/MT atau mengalami peningkatan sebesar 4,40% (yoy) (Grafik I. 7). Selain itu, beberapa pelaku usaha juga menyampaikan bahwa penurunan permintaan ekspor batubara juga sejalan dengan transisi ke ekonomi hijau serta peningkatan hasil

produksi batu bara secara mandiri. Berdasarkan data Kementerian ESDM, ekspor batu bara Kaltara pada triwulan II 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -5,35% (yoy) akibat menurunnya permintaan batubara dari Tiongkok (Grafik I. 9). Meskipun demikian, permintaan domestik masih terjaga terutama digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, industri semen serta *smelter* nikel di Sulawesi.

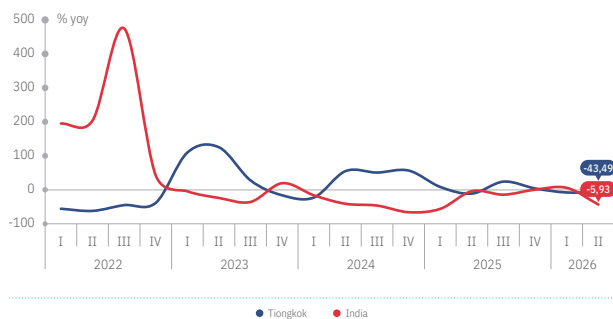
Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke LU Pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar 34,42% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 191,39% (yoy). Kinerja LU Pertambangan yang melambat pada triwulan II 2026 diperkirakan akan terus mengalami perlambatan sepanjang tahun 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya pembatasan produksi batubara

Gambar I.1. Prediksi Curah Hujan per Provinsi



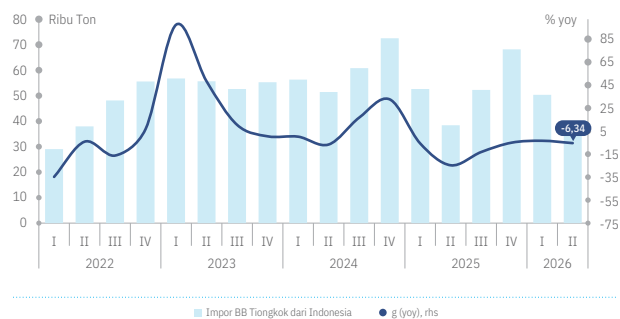
Sumber : BMKG

Grafik I.5. Volume Ekspor Batu Bara Tiongkok dan India



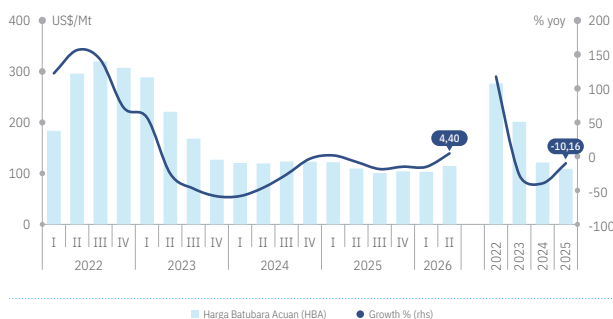
Sumber: Kubus, diolah

Grafik I.6. Volume Impor Batu Bara Tiongkok



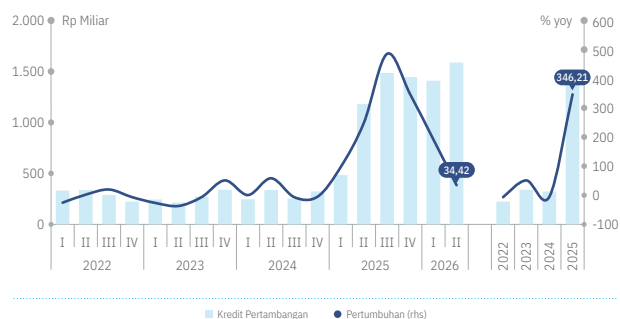
Sumber: McCloskey, diolah

Grafik I.7. Harga Batubara Acuan



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I.8. Kredit Pertambangan Kaltara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.9. Ekspor Batu Bara



yang dihadapi pelaku usaha pertambangan, sehingga rencana ekspansi usaha maupun peningkatan kapasitas produksi masih belum menjadi prioritas. Hal ini terindikasi dari kredit korporasi pertambangan yang termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I. 8). Pembiayaan pada sektor pertambangan umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha, terutama dalam rangka pemeliharaan (*maintenance*) alat dan fasilitas produksi agar kegiatan produksi tetap berjalan lancar. Pembiayaan tersebut juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional di tengah dinamika produksi dan harga komoditas.

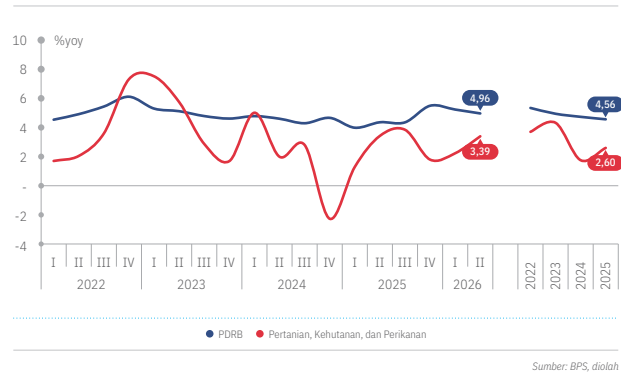
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 3,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026 sebesar 2,23% (yoy) (Grafik I. 10). LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki pangsa mencapai 14,70% dari total PDRB Kaltara. Sektor Pertanian juga memberikan andil pertumbuhan tahunan terhadap perekonomian Kaltara triwulan II 2026 sebesar 0,58%.

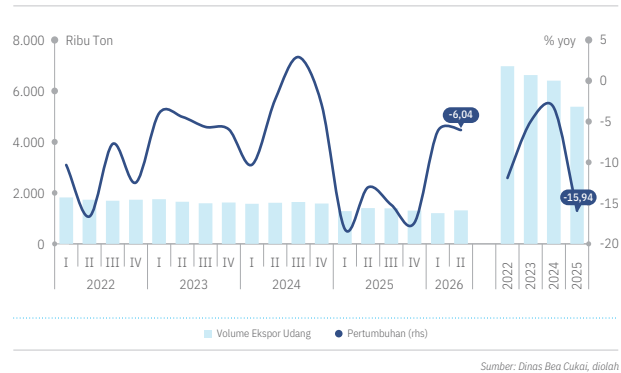
Meningkatnya kinerja LU Pertanian didorong oleh meningkatnya produksi tanaman kebun seperti Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, harga TBS termoderasi menjadi Rp3.369 per kg, atau tumbuh sebesar 12,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,33% (yoy) (Grafik I. 14). Produk TBS secara umum digunakan memenuhi pasar domestik dan diolah menjadi CPO untuk diekspor ke wilayah lain baik dalam bentuk *oleochemical* maupun turunannya.

Selain itu, kinerja LU Pertanian tumbuh lebih tinggi didorong oleh subsektor perikanan utamanya rumput laut. Pada triwulan laporan, komoditas perikanan tercatat tumbuh positif akibat meningkatnya permintaan ekspor dari Amerika Serikat dan India. Volume ekspor ikan masih tumbuh positif sebesar 4,50% (yoy) (Grafik I. 13) yang didorong oleh

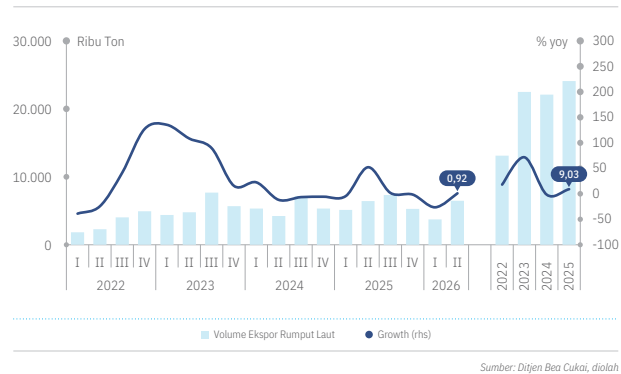
Grafik I.10. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara - Pertanian



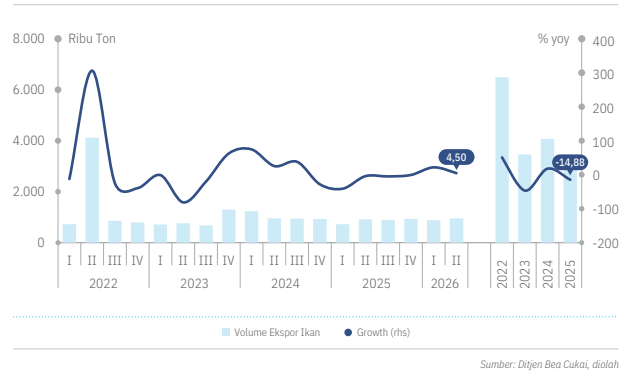
Grafik I.11. Volume Ekspor Udang



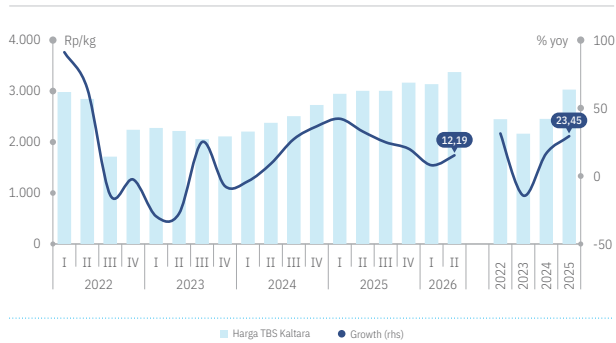
Grafik I.12. Volume Ekspor Rumput Laut



Grafik I.13. Volume Ekspor Ikan



Grafik I.14. Harga TBS



Sumber: Dinas Perkebunan, diolah

terjaganya produksi perikanan utamanya ikan budidaya (antara lain ikan bandeng). Komoditas perikanan lain seperti rumput laut juga mengalami peningkatan, dengan ekspor tercatat tumbuh sebesar 0,92% (yoy), yang disebabkan oleh permintaan rumput laut yang masih baik. (Grafik I. 12). Namun demikian, volume ekspor udang masih berkontraksi sebesar 6,04% (yoy), membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 6,18% (yoy) (Grafik I. 11).

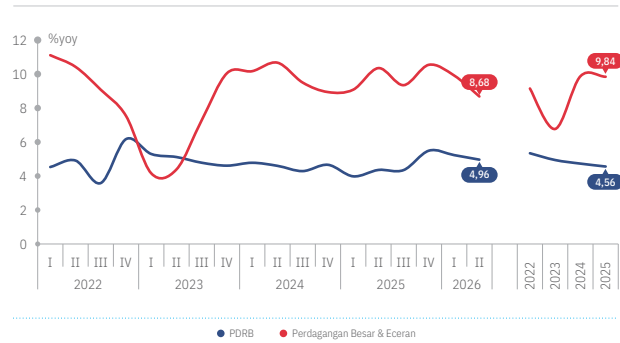
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) tumbuh positif mencapai 8,68% (yoy), termoderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,92% (yoy) (Grafik I. 15). LU PBE memberikan kontribusi sebesar 13,94% terhadap struktur perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan tahunan mencapai 1,17%.

LU PBE tetap tumbuh positif pada triwulan laporan didorong meningkatnya hasil *output* produksi pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mendorong terjaganya aktivitas perdagangan ritel maupun *wholesale*. Tumbuh positifnya kinerja LU PBE salah satunya tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK) yang optimis pada level 120,28 (Grafik I. 16). Namun demikian, tertahannya pertumbuhan LU PBE diakibatkan oleh termoderasinya volume penjualan kendaraan roda dua yang tumbuh sebesar 25,94% (yoy) diikuti penjualan kendaraan roda empat yang tumbuh sebesar 18,53% (yoy) (Grafik I.17 dan Grafik I.18).

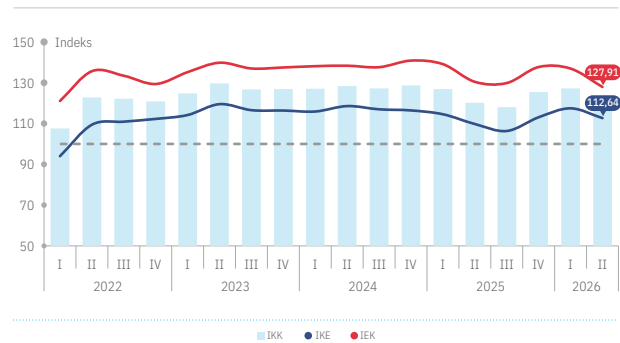
Meskipun demikian, penyaluran kredit ke LU Perdagangan tumbuh sebesar 0,83% (yoy) atau sebesar Rp3,26 triliun, termoderasi dibandingkan triwulan I 2026 sebesar Rp3,17 triliun atau tumbuh 1,30% yoy. (Grafik I. 19). Perlambatan kinerja kredit perdagangan diakibatkan oleh beberapa pengusaha besar yang masih *wait and see* dalam perencanaan investasi maupun peningkatan produksi bisnis di tengah kondisi ketidakpastiaan ekonomi global.

Grafik I.15. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Perdagangan



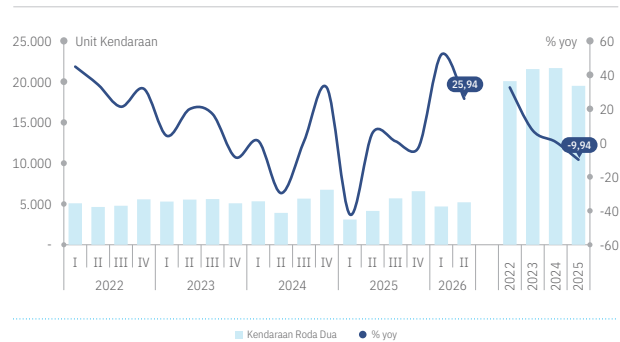
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.16. IKK, IKE, dan IEK Kaltara



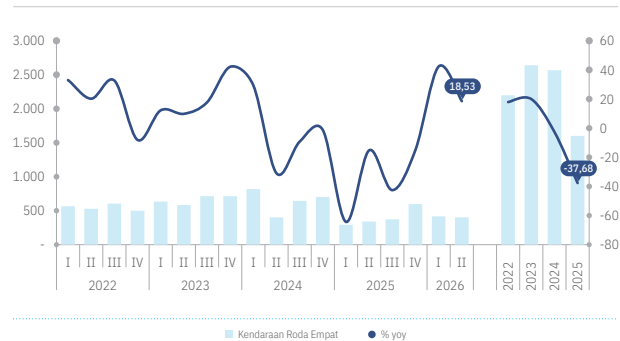
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.17. Volume Penjualan Kendaraan Roda Dua



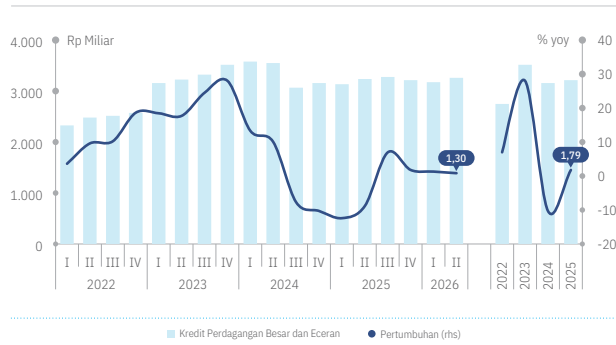
Sumber: BPPRD, diolah

Grafik I.18. Volume Penjualan Kendaraan Roda Empat



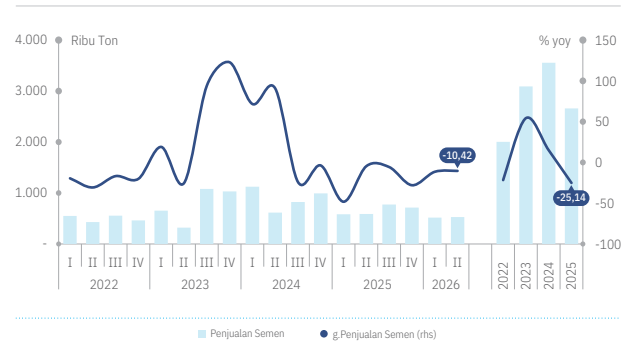
Sumber: BPPRD

Grafik I.19. Kredit Perdagangan Kaltara



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik I.21. Penjualan Semen Kaltara



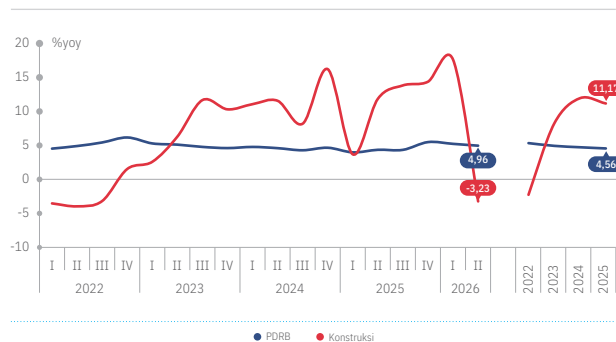
Sumber: Asosiasi Semen, diolah

Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi terkontraksi sebesar 3,23% (yoy) (Grafik I. 20). Kinerja LU Konstruksi menurut dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 17,62% (yoy). LU Konstruksi menguasai 12,18% pangsa perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan terhadap PDRB sebesar -0,43%.

Penurunan kinerja LU Konstruksi didorong oleh aktivitas pembangunan salah satu perusahaan di KIH Tanakuning yang sudah pada tahap finalisasi. Pembangunan infrastruktur kawasan industri seperti *jetty* kapal untuk bongkar muat pembangunan, *Water Treatment Plant (WTP)*, *Dormitory* untuk pekerja serta *smelter* aluminium telah selesai di awal tahun 2026 sehingga ditargetkan operasional *smelter* aluminium tahap I akan dimulai pada tahun 2026. Pertumbuhan sektor konstruksi yang positif juga diperkirakan akan memberikan efek *multiplier* terhadap beberapa sektor seperti perdagangan dan *real estate*. Terdapat beberapa proyek infrastruktur bernilai besar di Kaltara yang masih berlanjut serta menopang sustainabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Proyek tersebut diantaranya adalah (i) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan Sei Mentarang dengan potensi kapasitas energi mencapai 1.375 MW akan menjadi pemasok listrik di daerah KIH yang direncanakan menjadi salah satu pemasok kebutuhan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN); serta

Grafik I.20. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konstruksi



Sumber: BPS, diolah

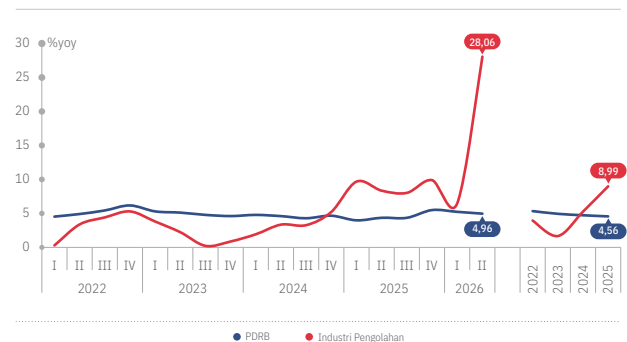
(ii) Pembangunan Tahap II pabrik bubur kertas di Tarakan. Namun demikian, penjualan semen masih terkontraksi sebesar -10,42% (yoy) (Grafik I. 21). Hal ini didorong oleh tahapan finalisasi pembangunan proyek fisik di KIH yang lebih banyak memanfaatkan material besi, baja, maupun bahan konstruksi lainnya.

Perkembangan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan tumbuh tinggi sebesar 28,06% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 6,48% (yoy) (Grafik I. 22). LU Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 10,81% dalam struktur perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan tahunan sebesar 2,49%.

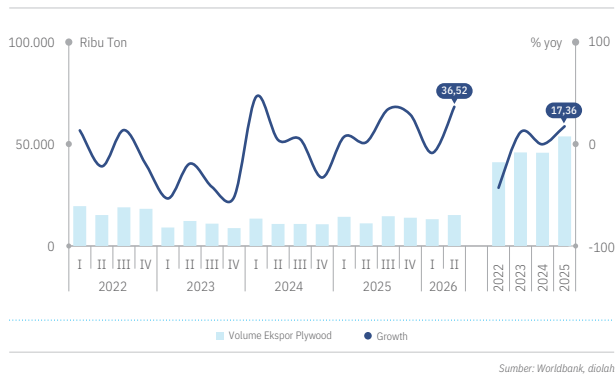
Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan terutama didorong oleh meningkatnya produksi hasil olahan kayu dan adanya komoditas baru yaitu Aluminium. Sejalan dengan itu, ekspor *plywood* mengalami peningkatan sebesar 36,52% (yoy) pada triwulan II 2026 sejalan dengan meningkatnya permintaan ekspor. Pertumbuhan yang tinggi pada LU Industri Pengolahan utamanya didorong oleh dimulainya fase ekspor Aluminium dengan volume mencapai 35 ribu ton ke US dan Korea.

Grafik I.22. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Industri Pengolahan

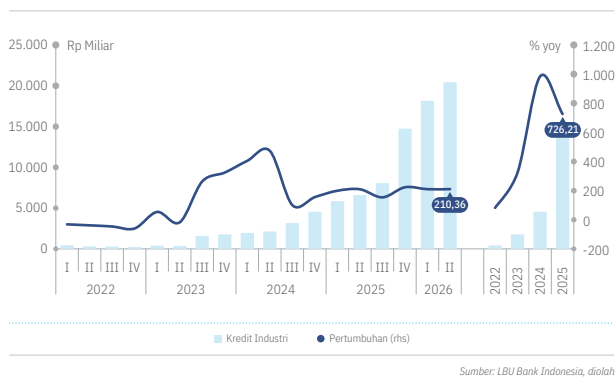


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.23. Volume Ekspor Plywood



Grafik I.24. Kredit Industri Pengolahan Kaltara



Namun demikian, produksi bubur kertas mengalami normalisasi sejalan dengan *base year effect* dimulainya produksi pada tahun sebelumnya. Produksi CPO Kaltara pada triwulan II 2026 mencapai 123.174 ton atau -2,48%(yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 129.050 ton (0,99%, yoy). Perlambatan produksi tersebut terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, yang mengakibatkan tertahannya pasokan dari area panen ke fasilitas pengolahan.

Pertumbuhan LU Industri Pengolahan terkonfirmasi dari kinerja penyaluran kredit dan hasil liaison Bank Indonesia.

Penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan mencapai Rp20,43 triliun atau tumbuh sebesar 210,36% (yoy) meningkat terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp18,13 triliun (209,17%, yoy) (Grafik I. 24). Masih tetap tumbuh positifnya penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan didorong oleh kegiatan operasional industri pengolahan yang meningkatkan produksi dan adanya perencanaan pembangunan Tahap II pabrik bubur kertas di Tarakan. Sejalan dengan itu, sejumlah kontak liaison menyatakan bahwa permintaan sepanjang tahun 2026 diperkirakan tetap positif seiring dengan optimisme permintaan masyarakat yang meningkat dan adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium.

1.3. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 mencatat pertumbuhan positif meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja tersebut terutama disebabkan oleh termoderasinya pertumbuhan Investasi. Perlambatan investasi terutama dipengaruhi oleh mulai terbatasnya laju investasi akibat selesainya pembangunan tenant KIHI di Tanah Kuning. Sementara itu, net ekspor mengalami peningkatan sejalan dengan adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium. Lebih lanjut, positifnya kinerja PDRB Kaltara pada triwulan II 2026 juga ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah yang tumbuh positif sejalan dengan meningkatnya belanja pegawai dalam rangka pembayaran gaji ke-13 untuk ASN (Tabel I.2).

Berdasarkan pangsanya, Net Ekspor dan PMTB masih mendominasi perekonomian Kaltara, dengan total sebesar 73,77%. Net ekspor menjadi penyumbang tertinggi pangsa PDRB triwulan II 2026 mencapai 45,02%, termoderasi dari triwulan sebelumnya sebesar 46,13%. Pangsa PMTB terhadap perekonomian Kaltara terpantau menurun terbatas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 28,75%

Tabel I.2. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

Berdasarkan Pengeluaran	2024				2025					2026	
	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II
	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%
Konsumsi RT	5,77	5,61	5,87	5,73	5,83	5,47	5,65	5,99	5,74	6,40	3,25
Konsumsi LNPR	12,87	7,78	6,94	11,60	2,88	6,43	4,73	4,64	4,66	4,59	3,41
Konsumsi Pemerintah	4,65	9,03	12,65	8,89	9,06	-10,07	-2,59	-6,53	-3,79	16,88	20,89
PMTB	7,41	4,31	5,18	6,84	0,39	4,92	5,95	6,49	4,47	6,01	-0,99
Perubahan Inventori	2,62	-2,36	-8,87	-1,82	0,46	-0,24	-4,63	8,58	0,84	154,80	381,68
Ekspor LN	2,46	3,09	3,34	2,01	2,53	2,74	2,88	3,74	2,98	5,41	3,95
Impor LN	2,34	2,63	3,91	1,78	0,31	0,08	1,92	1,03	0,84	8,57	3,57
Produk Domestik Regional Bruto	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56	5,23	4,96

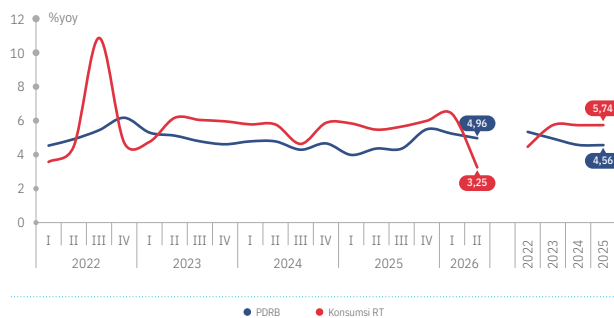
Sumber: BPS, diolah

dari 30,03%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan konsumsi LNPRM masing-masing memiliki pangsa sebesar 16,12%, 7,75%, dan 0,79%.

Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

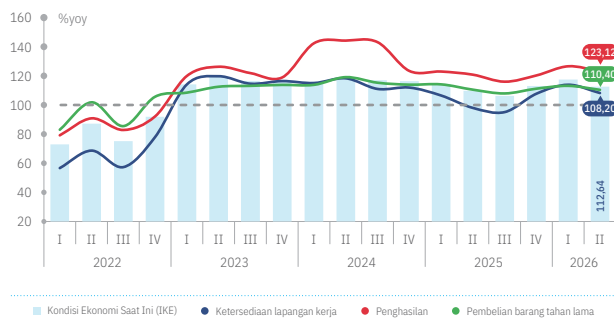
Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan II 2026 tumbuh positif meskipun termoderasi terbatas. Konsumsi RT Kalimantan Utara tumbuh sebesar 3,25% (yoy), melambat dari triwulan I 2026 sebesar 5,96% (Grafik I. 25). Adapun andil konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara sebesar 0,53%. Masih terjaganya Konsumsi RT didorong oleh terjaganya konsumsi dan belanja ritel. Kinerja Konsumsi RT ini juga sejalan Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia

Grafik I.25. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Rumah Tangga



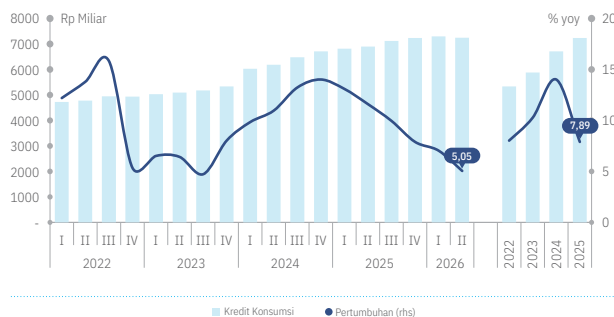
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.26. Indeks Survei Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.27. Kredit Konsumsi



Sumber: BPS, diolah

dengan perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada triwulan II 2026 yang mencapai pada level 112,64 (Grafik I. 26) atau masih berada di level optimis dan me dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, kinerja konsumsi RT yang termoderasi sejalan dengan pertumbuhan Kredit Konsumsi yang termoderasi sebesar 5,05% (yoy) (Grafik I. 27). Masih tumbuhnya Kredit Konsumsi sejalan dengan indikator keyakinan konsumen yang berada pada zona optimis (indeks lebih besar dari 100) khususnya terhadap ekspektasi penghasilan masyarakat kedepan.

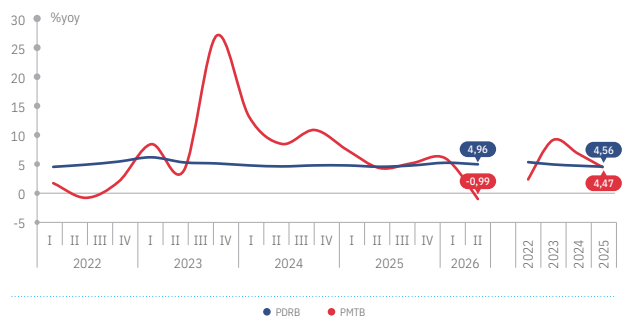
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

Kinerja PMTB pada triwulan II 2026 terkontraksi pada Triwulan I 2026. Kinerja investasi tumbuh sebesar -0,99% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 1,79% (yoy) (Grafik I. 28). Kinerja PMTB tersebut memberikan andil sebesar -0,30% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026.

Realisasi investasi Provinsi Kalimantan Utara triwulan II 2026 menurun secara nominal pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dibandingkan dengan triwulan I 2026. Berdasarkan data BKPM, nilai realisasi PMDN triwulan II 2026 mencapai sebesar Rp1,61 Triliun, terkontraksi sebesar 61,06% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I. 29). Sejalan dengan itu, nilai realisasi PMA sebesar USD125,16 juta, atau terkontraksi sebesar -38,53% (yoy) (Grafik I. 30). Sejalan dengan PMA dan PMDN, pertumbuhan impor barang modal pada triwulan II 2026 juga masih terkontraksi sebesar -66,70% (yoy).

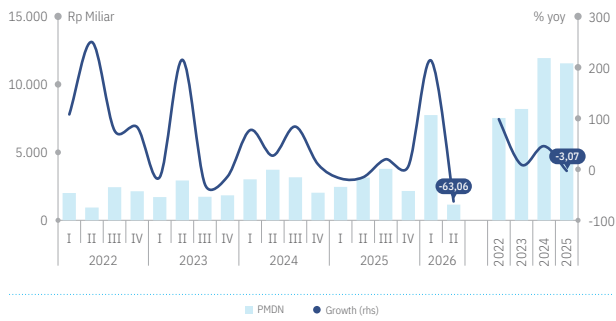
Kredit Investasi menjadi salah satu indikator kinerja adanya investasi yang baru sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara. Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit investasi triwulan II 2026 tumbuh positif namun termoderasi dari triwulan sebelumnya. Realisasi kredit investasi triwulan laporan tercatat sebesar Rp26,21 Triliun atau tumbuh sebesar 129,92% (yoy), melambat dibandingkan triwulan

Grafik I.28. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – PMTB



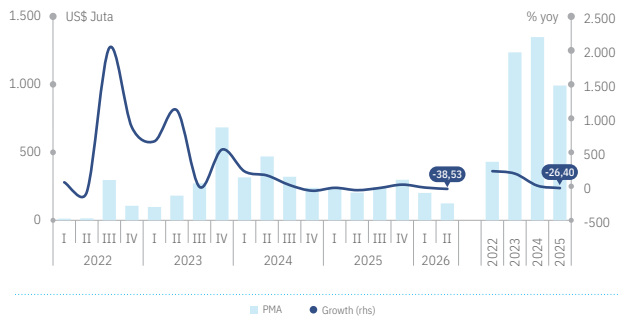
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.29. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



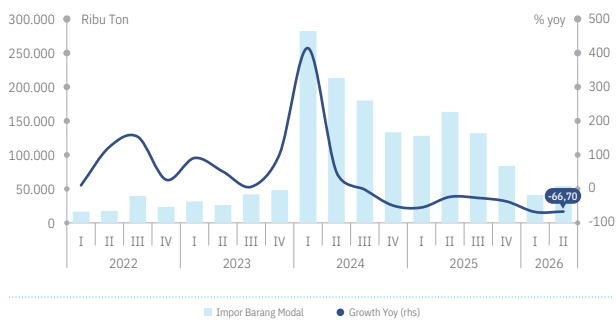
Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.30. Penanaman Modal Asing (PMA)



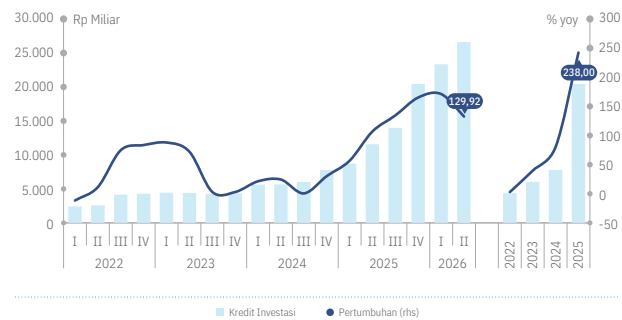
Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.31. Impor Barang Modal



Sumber: Kubei Eksim Bank Indonesia, diolah

Grafik I.32. Kredit Investasi Kaltara



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

sebelumnya sebesar Rp 22,99 triliun (168,02%, yoy) (Grafik I. 32). Kondisi tersebut sejalan dengan informasi sejumlah kontak *liaison* KPwBI Kaltara yang masih tetap optimis terhadap berlanjutnya pertumbuhan ekonomi ke depan dan adanya ekspansi pembangunan tahap selanjutnya pada beberapa proyek strategis di Kaltara.

1,41% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara triwulan II 2026. Meningkatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah Kalimantan Utara didorong oleh realisasi belanja pegawai melalui pembayaran gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kota/Kabupaten.

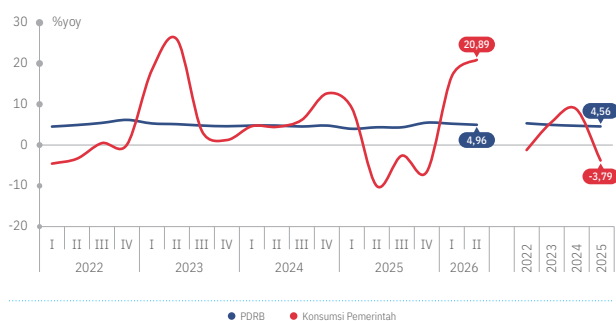
Perkembangan Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah triwulan II 2026 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi Pemerintah di Kalimantan Utara tumbuh sebesar 20,89 (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 16,88% (Grafik I. 33). Realisasi konsumsi pemerintah tersebut memberikan andil sebesar

Perkembangan Ekspor

Kinerja ekspor triwulan II 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 4,40% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy) (Grafik I. 34). Realisasi ekspor tersebut memberikan andil sebesar 1,99% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026. Meningkatnya kinerja ekspor tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor komoditas kepada negara mitra dagang utama sejalan dengan adanya komoditas ekspor baru di triwulan II 2026.

Grafik I.33. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Pemerintah



Sumber: BPS, diolah

Secara nilai, kinerja ekspor juga tercatat meningkat. Total ekspor tercatat sebesar USD525,74 juta, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar USD321,70 juta (Tabel I.3). Sejalan dengan itu, nominal impor juga tercatat mengalami peningkatan dari sebelumnya USD85,34 juta menjadi USD85,66 juta.

Tabel I.3. Nilai Perdagangan Internasional Kaltara

Wilayah	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kaltara (US\$ Juta)										
Ekspor	389,19	424,05	352,61	398,23	329,20	339,38	350,28	361,45	321,70	525,74
Impor	303,68	626,57	188,31	155,63	203,47	257,11	234,65	184,87	85,34	85,66
Net Ekspor	85,51	-202,52	164,30	242,59	125,72	82,27	115,63	176,58	236,35	440,08

Sumber: BPS, diolah

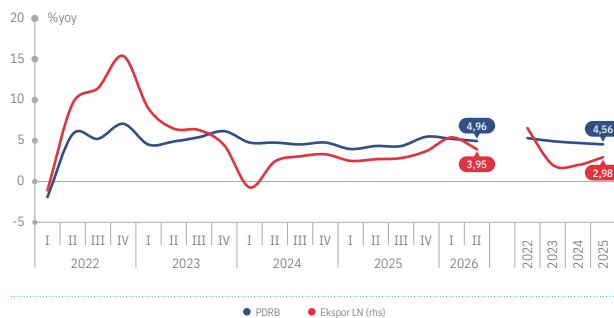
Peningkatan kinerja ekspor Kaltara ini terutama disebabkan oleh LU Industri Pengolahan (ekspor komoditas plywood dan Aluminium). Berbeda hal dengan Ekspor Batubara Kaltara, disisi lain kinerja ekspor ekspor batu bara nasional tercatat tumbuh positif sebesar 22,93% (yoy) didorong oleh kondisi cuaca yang sedikit membaik pada triwulan II 2026 (Grafik I. 36).

Selain itu, pendorong tumbuh positifnya kinerja ekspor triwulan II 2026 dipengaruhi oleh kinerja ekspor komoditas udang yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor udang tumbuh sebesar 23,38% (yoy) dari triwulan sebelumnya 5,25% (yoy) (Grafik I. 38). Berbanding terbalik, ekspor ikan juga tumbuh namun

melambat sebesar 13,46% (yoy) sejalan dengan meningkatnya permintaan ikan bandeng lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 30,71% (yoy) (Grafik I. 39).

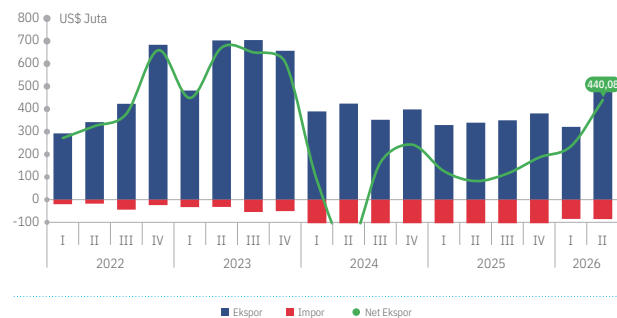
Ekspor Provinsi Kalimantan Utara didominasi komoditas mineral nonmigas dengan tujuan negara ekspor utama adalah Tiongkok, Amerika, dan Korea Selatan (Grafik I. 41). Berdasarkan kelompoknya, ekspor Kaltara pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh komoditas mineral nonmigas, terutama batu bara yang memiliki pangsa sebesar 69,59% dari total nominal ekspor. Sementara itu, ekspor rokok, udang, dan , kayu lapis (plywood) memiliki pangsa masing-masing sebesar 8,19%, 4,18%, dan 3,99% (Grafik I. 40).

Grafik I.34. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Ekspor Luar Negeri



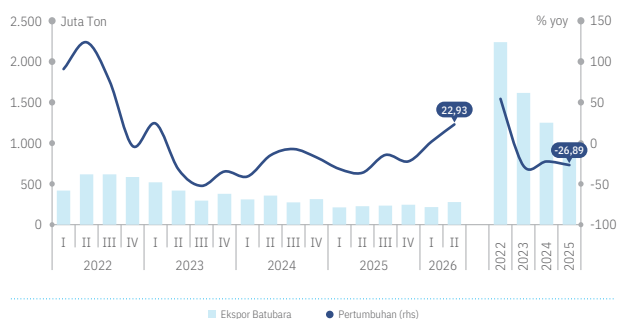
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.35. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltara



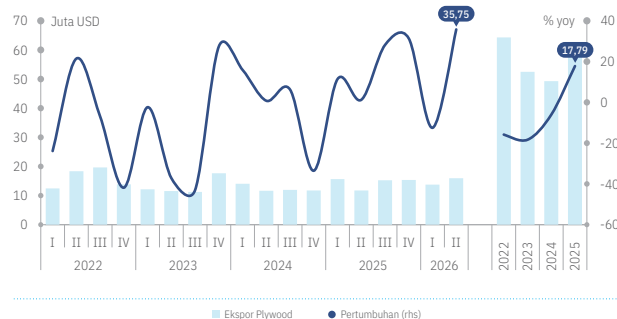
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.36. Ekspor Batu bara



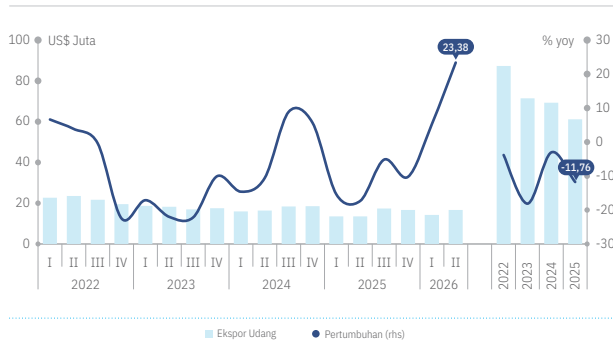
Sumber: Kubus Eksim, diolah

Grafik I.37. Ekspor Plywood



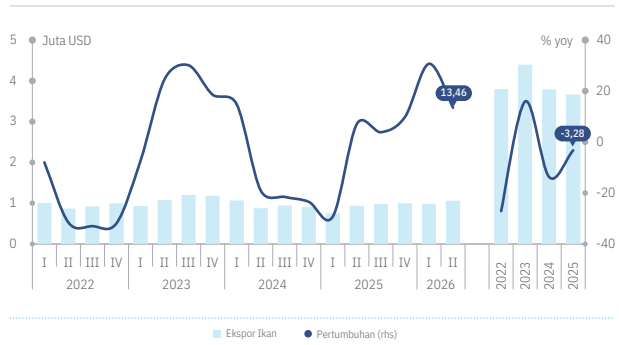
Sumber: Kubus Eksim, diolah

Grafik I.38. Ekspor Udang



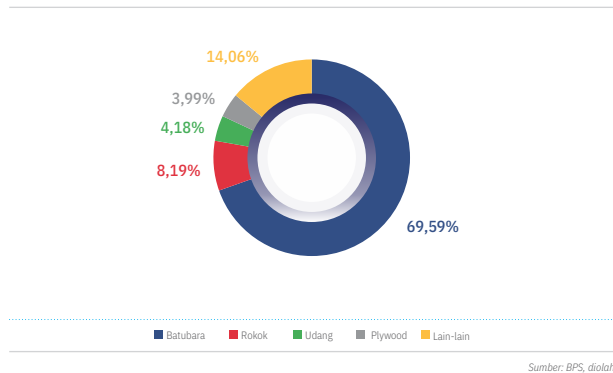
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.39. Ekspor Ikan



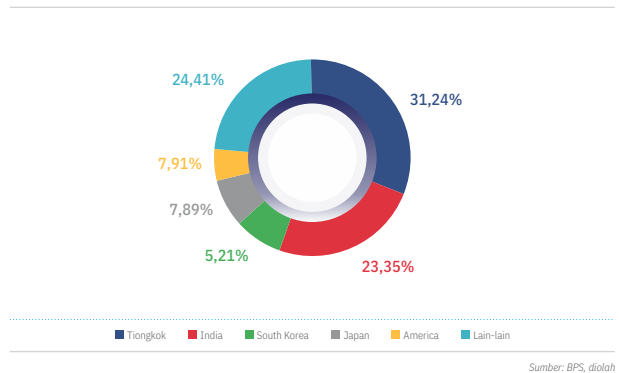
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.40. Komoditas Utama Ekspor Triwulan II 2026



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.41. Negara Utama Tujuan Ekspor Triwulan II 2026



Sumber: BPS, diolah

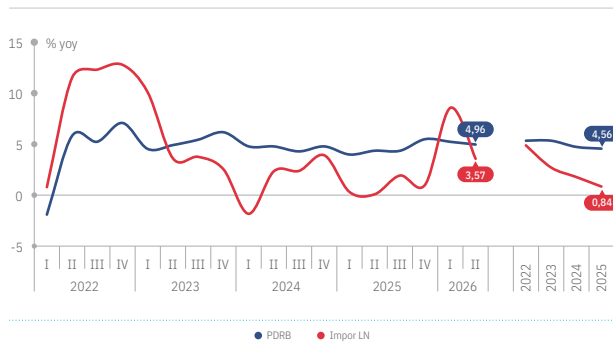
Perkembangan Impor

Impor Kaltara triwulan I 2026 tercatat melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja impor tumbuh sebesar 3,57% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,15% (yoy).

Berdasarkan jenis barangnya, impor Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 didominasi oleh industri pengolahan tembakau sebesar 57,88%, diikuti oleh industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 16,67%, dan pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 11,58% (Grafik 1. 43). Peningkatan impor diperkirakan

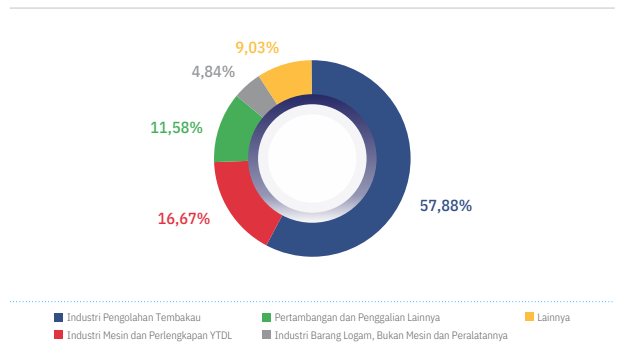
dalam rangka pemenuhan kebutuhan konstruksi sejalan dengan pembangunan proyek strategis di Kaltara. Kinerja impor yang masih tumbuh positif sejalan dengan finalisasi pembangunan salah satu *tenant* di KIHl serta sejumlah proyek lainnya di Kaltara. Hal ini mendorong peningkatan nilai dan volume impor komoditas benda-benda dari besi dan baja, mesin/peralatan listrik, dan lainnya. Berdasarkan negara asalnya, mayoritas impor berasal dari Tiongkok dengan pangsa 43,31% diikuti dengan Hongkong sebesar 21,21%, dan Australia sebesar 12,83%.

Grafik I.42. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Impor

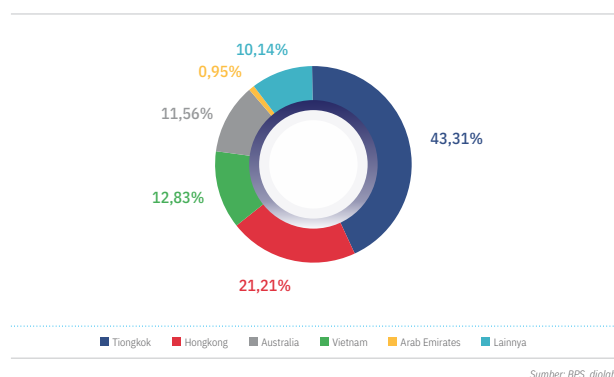


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.43. Komoditas Utama Impor Triwulan II 2026



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.44. Negara Utama Asal Impor Triwulan II 2026

1.4. Kondisi Fiskal - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pagu anggaran pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan kebijakan efisiensi dan penyesuaian alokasi anggaran pemerintah. Pagu anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp9,05 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 sebesar Rp11,64 triliun atau terkontraksi sebesar 22,21% (yoy). Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya alokasi transfer pemerintah pusat serta penyesuaian target pendapatan daerah.

Sejalan dengan itu, pagu anggaran belanja juga mengalami penurunan dari Rp12,99 triliun pada triwulan II 2025 menjadi Rp10,56 triliun pada triwulan II 2026 atau terkontraksi sebesar 18,66% (yoy). Penurunan pagu belanja terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada komponen Belanja Modal dan Belanja Operasional.

Dari sisi realisasi, pendapatan APBD hingga triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp3,86 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,62 triliun

atau terkontraksi sebesar 16,49% (yoy). Meskipun demikian, persentase realisasi terhadap pagu meningkat menjadi 42,59%, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan II 2025 sebesar 39,67%. Peningkatan rasio realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyerapan pendapatan daerah relatif lebih baik di tengah penurunan pagu anggaran.

Dari sisi belanja, realisasi belanja pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp3,22 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,06 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 5,28% (yoy). Persentase realisasi belanja terhadap pagu meningkat menjadi 30,50% dari sebelumnya 23,56% pada triwulan II 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan belanja pemerintah daerah mulai menunjukkan perbaikan efektivitas realisasi dan penyerapan anggaran.

Secara umum, kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebijakan efisiensi fiskal masih memengaruhi kapasitas APBD Provinsi Kalimantan Utara pada awal tahun 2026. Namun, peningkatan rasio realisasi terhadap pagu baik pada sisi pendapatan maupun belanja menunjukkan adanya perbaikan kualitas pengelolaan anggaran dan akselerasi penyerapan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp3,86 triliun atau 42,59% dari total pagu anggaran pendapatan tahun 2026. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 39,67%, meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2025 sebesar Rp4,62 triliun. Secara tahunan, realisasi pendapatan mengalami kontraksi sebesar 16,49% (yoy), terutama dipengaruhi oleh menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Tabel I.4. Pagu dan Realisasi APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp Pagu		g.2026 (yoy)
	II 2025	II 2026	II 2025	II 2026	II 2025	II 2026	
Pendapatan	11.638.041	9.053.247	4.616.454	3.855.367	39,67	42,59	-16,49%
PAD	1.787.159	1.832.580	665.406	772.580	37,23	42,16	16,11%
Pendapatan Transfer	9.487.574	7.194.811	3.921.167	3.078.565	41,33	42,79	-21,49%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	363.308	25.856	29.881	4.222	8,22	16,33	-85,87%
Belanja	12.986.736	10.563.398	3.059.923	3.221.457	23,56	30,50	5,28%
Belanja Operasional	8.525.161	7.328.392	2.670.074	2.812.094	31,32	38,37	5,32%
Belanja Modal	2.783.239	1.916.163	59.437	164.150	2,14	8,57	176,17%
Belanja Tidak Terduga	73.893	77.303	3.675	4.948	4,97	6,40	34,64%
Transfer	1.604.443	1.241.540	326.737	240.265	20,36	19,35	-26,47%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kaltara

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi hingga triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp772,58 miliar atau 42,16% dari pagu, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp665,41 miliar atau 37,23% dari pagu. Secara tahunan, PAD tumbuh sebesar 16,11% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh membaiknya realisasi Pajak Daerah serta meningkatnya kontribusi komponen Pajak Daerah. Persentase realisasi Pajak Daerah terhadap pagu meningkat dari 36,35% menjadi 48,69% sementara realisasi lain-lain PAD yang Sah meningkat dari 35,81% menjadi 45,01%. Di sisi lain, realisasi Retribusi Daerah masih relatif rendah sebesar 23,80% dari pagu.

Sementara itu, Pendapatan Transfer tercatat sebesar Rp3,08 triliun atau 42,79% dari pagu, secara nominal lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,92 triliun. Secara tahunan, Pendapatan Transfer mengalami kontraksi sebesar 21,49% (yoy), terutama dipengaruhi oleh menurunnya realisasi Transfer Pemerintah Pusat.

Adapun realisasi komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp4,22 miliar atau 16,33% dari pagu, menurun secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp29 miliar. Secara tahunan, komponen ini terkontraksi sebesar 85,87% (yoy).

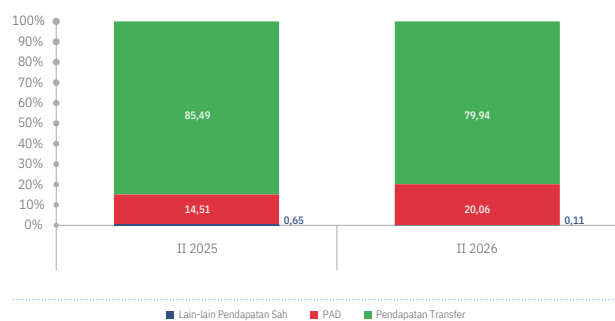
Dalam rangka mendorong akselerasi penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara terus memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kanal pembayaran digital, optimalisasi penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), serta perluasan pembayaran non-tunai

pada sektor layanan publik dan transportasi. Ke depan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah, memperkuat transparansi transaksi, serta mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Transfer masih mendominasi struktur pendapatan Pemprov Kalimantan Utara hingga triwulan II 2026 dengan pangsa sebesar 79,94%, relatif menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 85,49%. Sementara itu, pangsa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat meningkat menjadi 20,06% pada triwulan II 2026, dibandingkan dengan 14,51% pada periode yang sama tahun 2025. Peningkatan ini ditopang oleh realisasi positif pada komponen Retribusi Daerah yang menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kemandirian fiskal daerah.

Adapun lain-lain Pendapatan yang sah mengalami kenaikan dengan pangsa mencapai 0,11% pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,65%. Secara keseluruhan, komposisi pendapatan ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan terhadap

Grafik I.45. Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Tabel I.5. Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp Pagu		g.2026 (yoy)
	II 2025	II 2026	II 2025	II 2026	II 2025	II 2026	
Pendapatan (I+II+III)	11.638.041	9.053.247	4.616.455	3.855.367	39,67	42,59	-16,49%
I. PAD	1.787.158	1.832.580	665.407	772.580	37,23	42,16	16,11%
Pajak daerah	1.105.337	1.082.393	401.794	527.035	36,35	48,69	31,17%
Retribusi daerah	52.490	426.721	24.336	101.580	46,36	23,80	317,41%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	54.395	68.194	33.389	29.057	61,38	42,61	-12,97%
Lain-lain PAD yang sah	574.936	255.272	205.888	114.908	35,81	45,01	-44,19%
II. Pendapatan Transfer	9.487.575	7.194.811	3.921.167	3.078.565	41,33	42,79	-21,49%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	9.144.243	6.792.115	3.921.167	3.078.565	42,88	45,33	-21,49%
Transfer Antar Daerah	343.332	402.696	-	-	-	-	-
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	363.308	25.856	29.881	4.222	8,22	16,33	-85,87%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

dana Transfer Pemerintah Pusat masih cukup besar, terdapat perbaikan kontribusi PAD yang meningkat. Oleh karena itu, penguatan upaya digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui forum TP2DD diharapkan dapat terus mendorong peningkatan PAD sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Realisasi Belanja Daerah

Penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp3,22 triliun atau 30,50% dari total pagu anggaran belanja tahun 2026. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,06 triliun, persentase terhadap pagu mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 23,56%. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 5,28% (yoy).

Berdasarkan komponennya, Belanja Operasional tercatat sebesar Rp2,81 triliun atau 38,37% dari pagu, meningkat dibandingkan triwulan II 2025 sebesar Rp2,67 triliun atau 31,32% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Operasional tumbuh sebesar 5,32% (yoy), mencerminkan terjaganya realisasi belanja rutin pemerintah daerah pada tengah tahun anggaran.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp164,15 miliar atau 8,57% dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp59,44 miliar atau 2,14% dari pagu. Secara tahunan,

Belanja Modal tumbuh sebesar 176,17% (yoy), meskipun secara rasio terhadap pagu masih relatif rendah. Peningkatan ini mengindikasikan mulai berjalannya akselerasi belanja investasi pemerintah daerah pada tengah tahun 2026.

Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp4,95 miliar atau 6,40% dari pagu, meningkat dibandingkan triwulan II 2025 sebesar Rp3,68 miliar atau 4,97% dari pagu. Secara tahunan, komponen ini tumbuh sebesar 36,64% (yoy). Adapun Belanja Transfer tercatat sebesar Rp240,27 miliar atau 19,35% dari pagu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp326,74 miliar atau 20,36% dari pagu, sehingga berkontraksi sebesar 26,47% (yoy).

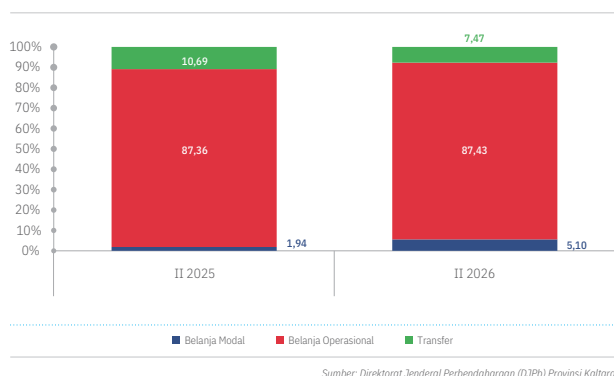
Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan adanya peningkatan, terutama dipengaruhi oleh Belanja Modal dan Belanja Operasional, khususnya pada belanja rutin dan belanja investasi pemerintah daerah.

Berdasarkan pangsa realisasi belanja, struktur belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh Belanja Operasional dengan kontribusi sebesar 87,43% terhadap total realisasi belanja daerah. Pangsa tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 87,36%, menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah pada tengah tahun masih berfokus pada pemenuhan belanja rutin dan operasional pemerintahan (Grafik I.46).

Tabel I.6. Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp Pagu		g.2026 (yoy)
	II 2025	II 2026	II 2025	II 2026	II 2025	II 2026	
BELANJA (I+II+III+IV)	12.986.734	10.563.398	3.059.923	3.221.457	23,56	30,50	5,28%
I. Belanja Operasional	8.525.159	7.328.392	2.670.074	2.812.094	31,32	38,37	5,32%
Belanja Pegawai	4.300.024	3.919.194	1.730.946	1.884.581	40,25	48,09	8,88%
Belanja Barang dan Jasa	3.637.262	3.020.918	807.144	812.676	22,19	26,90	0,69%
Belanja Subsidi	90.673	44.549	23.210	18.542	25,60	41,62	-20,11%
Belanja Hibah	476.181	332.763	107.120	95.988	22,50	28,85	-10,39%
Belanja Bantuan Sosial	21.019	10.968	1.654	307	7,87	2,80	-81,44%
II. Belanja Modal	2.783.239	1.916.163	59.437	164.150	2,14	8,57	176,17%
Belanja Tanah	47.521	10.406	1.000	618	2,10	5,94	-
Belanja Peralatan dan Mesin	428.270	201.427	21.158	19.437	4,94	9,65	-8,13%
Belanja Gedung dan Bangunan	869.235	683.383	12.429	71.880	1,43	10,52	478,32%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.408.146	1.002.208	24.052	71.218	1,71	7,11	196,10%
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.844	2.886	208	285	1,92	9,88	37,02%
Belanja Aset Lainnya	19.223	15.853	590	712	3,07	4,49	20,68%
III. Belanja tidak terduga	73.893	77.303	3.675	4.948	4,97	6,40	34,64%
Belanja tidak terduga	73.893	77.303	3.675	4.948	4,97	6,40	34,64%
IV. Transfer	1.604.443	1.241.540	326.737	240.265	20,36	19,35	-26,47%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kaltara

Grafik I.46. Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026

Sementara itu, kontribusi Belanja Modal meningkat signifikan menjadi 5,10% pada triwulan II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,94%. Peningkatan pangsa tersebut mencerminkan mulai meningkatnya realisasi belanja investasi pemerintah daerah pada tengah tahun anggaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset pemerintah. Meskipun demikian, porsi masih relatif terbatas dibandingkan Belanja Operasional sehingga ruang fiskal untuk akselerasi pembangunan daerah masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, pangsa Belanja Transfer tercatat sebesar 7,47%, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 10,69%. Penurunan kontribusi Belanja Transfer tersebut sejalan dengan melambatnya penyaluran transfer kepada pemerintah kabupaten/kota serta penyesuaian kapasitas fiskal daerah pada awal tahun 2026.

Secara keseluruhan, struktur realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan dominasi Belanja Operasional yang masih cukup tinggi. Namun demikian, mulai meningkatnya porsi

Belanja Modal menunjukkan adanya perbaikan arah penyerapan anggaran menuju belanja yang lebih produktif dan mendukung pembangunan daerah.

1.5. Kondisi Fiskal - APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Realisasi Pendapatan Spasial

Realisasi pendapatan di 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 secara agregat tercatat sebesar Rp2,88 triliun atau 42,41% dari total pagu anggaran pendapatan tahun 2026 sebesar Rp6,78 triliun. Capaian tersebut lebih rendah secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp3,18 triliun atau 39,13% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp8,14 triliun. Secara tahunan, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara mengalami perlambatan sejalan dengan menurunnya kapasitas fiskal daerah dan penyesuaian pagu anggaran pada tahun 2026.

Meskipun secara nominal realisasi pendapatan mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2025, persentase realisasi terhadap pagu menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 42,41% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 39,13%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara masih mampu menjaga kinerja penyerapan pendapatan daerah secara relatif stabil pada tengah tahun anggaran di tengah proses penyesuaian ruang fiskal daerah.

Secara umum, kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam pengelolaan fiskal daerah meskipun ruang fiskal mengalami tekanan akibat penurunan pagu anggaran dan perlambatan penerimaan daerah.

Tabel I.7. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026

Uraian	2025 Tw-II			2026 Tw-II		
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
	Rp Miliar	Rp Miliar	% Realisasi thdp Pagu	Rp Miliar	Rp Miliar	% Realisasi thdp Pagu
PENDAPATAN						
Kota Tarakan	1.152,99	433,99	37,64%	930,07	357,69	38,46%
Kab. Bulungan	1.899,73	816,85	43,00%	1.585,22	790,14	49,84%
Kab. Malinau	2.275,73	1.150,14	50,54%	1.813,67	848,45	46,78%
Kab. Nunukan	1.782,15	311,55	17,48%	1.833,95	587,65	32,04%
Kab. Tana Tidung	1.027,21	472,02	45,95%	616,59	291,09	47,21%
Total Kab/Kota Kaltara	8.137,82	3.184,55	39,13%	6.779,49	2.875,02	42,41%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Realisasi Belanja Spasial

Tabel I.8. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026

Uraian	2025 Tw-II			2026 Tw-II		
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
	Rp Miliar	Rp Miliar	% Realisasi thdp Pagu	Rp Miliar	Rp Miliar	% Realisasi thdp Pagu
BELANJA						
Kota Tarakan	1.175,98	325,84	27,71%	955,52	295,88	30,97%
Kab. Bulungan	2.397,31	601,69	25,10%	2.010,21	715,61	35,60%
Kab. Malinau	3.247,27	648,44	19,97%	2.370,67	647,47	27,31%
Kab. Nunukan	2.033,98	256,41	12,61%	2.059,69	633,11	30,74%
Kab. Tana Tidung	1.432,96	306,50	21,39%	730,36	242,08	33,15%
Total Kab/Kota Kaltara	10.287,50	2.138,88	20,79%	8.126,44	2.534,15	31,18%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Realisasi belanja di 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp2,53 triliun atau 31,18% dari total pagu APBD Kabupaten/Kota tahun 2026 sebesar Rp8,13 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp2,14 triliun atau 20,79% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp10,29 triliun. Secara nominal, realisasi belanja mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2025.

Dari sisi persentase penyerapan terhadap pagu, realisasi belanja Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara menunjukkan adanya peningkatan menjadi 31,18%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,79%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran daerah pada tengah tahun anggaran. Secara umum, kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah di tengah tekanan pada ruang fiskal akibat penurunan pagu anggaran dan perlambatan penerimaan daerah.

1.6. Dana Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat

Belanja K/L di Kaltara

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp1,55 triliun atau 44,16% dari total pagu belanja K/L tahun 2026 sebesar Rp3,52 triliun. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp1,13 triliun atau 30,64% dari pagu belanja tahun 2025 sebesar Rp3,68 triliun. Secara tahunan, realisasi belanja K/L di Kalimantan Utara tumbuh sebesar 37,83% (yoy) (Tabel I.9).

Peningkatan realisasi belanja K/L terutama didorong oleh akselerasi Belanja Modal yang tercatat sebesar Rp383,19 miliar atau 39,26% dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp76,34 miliar atau 9,53% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Modal tumbuh sebesar 401,95% (yoy), mengindikasikan pelaksanaan proyek pembangunan dan pengadaan aset pemerintah pada tengah tahun 2026.

Di sisi lain, Belanja Pegawai juga menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar Rp768,55 miliar atau 56,98% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp634,5 miliar atau 50,11% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Pegawai tumbuh sebesar 21,13% (yoy), sejalan dengan meningkatnya kebutuhan belanja aparatur pemerintah dan penyesuaian belanja pegawai pada tengah tahun anggaran. Selain itu, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp400,9 miliar atau 33,65% dari pagu, sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2025 sebesar Rp415,56 miliar atau 25,84% dari pagu. Secara tahunan, Belanja Barang melambat sebesar 3,53% (yoy), mencerminkan adanya penyesuaian aktivitas operasional K/L di wilayah Kalimantan Utara. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial belum menunjukkan realisasi hingga triwulan II 2026, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurun persentase realisasi terhadap pagu, serapan belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 terbesar berasal dari Belanja Pegawai yang mencapai 56,98% dari pagu (Grafik I.48). Tingginya serapan Belanja Pegawai mencerminkan dominasi belanja rutin pemerintah pusat pada tengah tahun anggaran, terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara. Selanjutnya, belanja modal sebesar 39,26% dan diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa yang tercatat sebesar 33,65%.

Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial belum menunjukkan realisasi hingga triwulan II 2026. Hal tersebut mencerminkan bahwa penyaluran program bantuan sosial pemerintah pusat di wilayah Kalimantan Utara umumnya masih akan berlangsung pada periode berikutnya sesuai jadwal pelaksanaan program dan proses administrasi anggaran pemerintah.

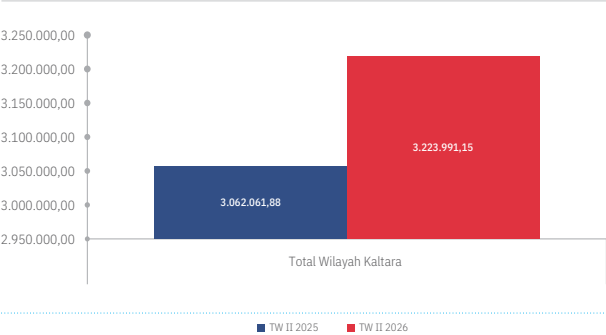
Belanja K/L secara total tercatat terealisasi sebesar 44,16% dari pagu APBN, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 30,64%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di wilayah Kalimantan Utara.

Tabel I.9. Realisasi Belanja K/L di Wilayah Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026

Uraian	2025 Tw-II			2026 Tw-II			g.2026 (yoy)
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%	
Belanja Pegawai	1.266,30	634,50	50,11%	1.348,92	768,55	56,98%	21,13%
Belanja Barang	1.608,28	415,56	25,84%	1.191,33	400,90	33,65%	-3,53%
Belanja Modal	801,36	76,34	9,53%	976,03	383,19	39,26%	401,95%
Belanja Bantuan Sosial	0,32	0,09	28,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Belanja K/L	3.676,25	1.126,48	30,64%	3.516,28	1.552,64	44,16%	37,83%

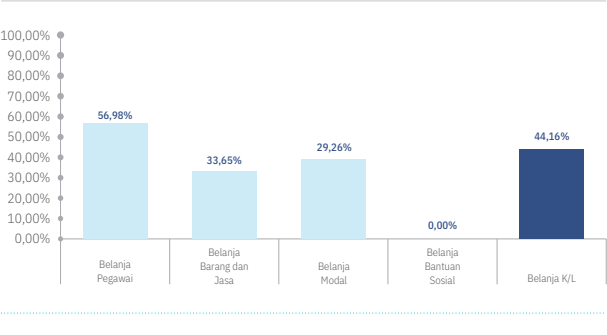
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Grafik I.47. Realisasi Belanja K/L di Provinsi Kaltara Triwulan II 2025 dan Triwulan II 2026 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Grafik I.48. Tingkat Serapan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kaltara Triwulan II 2026



Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Konsultasi Regional (KONREG) Kasulampua 2026 : “Kedaulatan Pangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di wilayah Kasulampua”

BOKS 1

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersinergi dengan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2026 pada 15 April 2026 di Tanjung Selor. Kegiatan ini mengangkat tema “Kedaulatan Pangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Wilayah Kasulampua” dan dihadiri oleh sekitar 135 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah se-Kasulampua, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dunia usaha, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan bahwa wilayah Kasulampua memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta letak geografis yang strategis, termasuk penguasaan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia. Namun demikian, kawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, antara lain ketimpangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta perlunya peningkatan kualitas data ekonomi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, produktif, dan berkelanjutan.

Wakil Kepala BPS RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah Kasulampua dalam beberapa tahun terakhir secara umum berada di atas rata-rata nasional dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2025, wilayah Kasulampua berkontribusi sebesar 18,04% terhadap perekonomian nasional, meningkat dibandingkan kontribusi satu dekade sebelumnya. Meskipun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi inklusif perlu dilakukan melalui penciptaan nilai tambah, pengembangan industri pengolahan, perluasan

kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah.

Narasumber dari BPS RI, Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Keuangan RI menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif. Struktur ekonomi wilayah Kasulampua masih didominasi oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian, sementara penyerapan tenaga kerja terbesar masih berada pada sektor pertanian. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian relatif masih rendah dan menghadapi tantangan berupa penuaan petani, rendahnya regenerasi tenaga kerja muda, serta tingginya tingkat kerentanan pangan di beberapa wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan transformasi sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, modernisasi teknologi, penguatan hilirisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa perekonomian wilayah Kalimantan dan Sulampua pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun dihadapkan pada berbagai risiko global, antara lain meningkatnya ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta penyesuaian kebijakan produksi komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan diperkirakan berada pada kisaran 3,9–4,7% (yoy), sedangkan wilayah Sulampua diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada kisaran 4,64–5,44% (yoy). Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy) didukung oleh penguatan produksi pangan, perluasan program pertanian, serta sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Bappenas juga memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sentra pangan, penguatan cadangan pangan, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. Sementara itu, Kementerian Keuangan menekankan pentingnya sinergi fiskal pusat dan daerah dalam

BOKS 1

mendukung ketahanan pangan, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah untuk memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian yang membahas strategi penguatan kedaulatan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Kasulampua. Kementerian Pertanian menekankan pentingnya peningkatan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya air, pembangunan dan optimalisasi infrastruktur irigasi, perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan produktivitas lahan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyoroti potensi besar ekonomi biru di wilayah Kasulampua melalui pengembangan komoditas perikanan unggulan seperti udang, rumput laut, tilapia, kepiting, dan lobster yang didukung oleh program prioritas, antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi sarana perikanan, pengembangan kawasan budidaya terintegrasi, serta hilirisasi produk perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, khususnya komoditas strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga, menjadi salah satu instrumen utama transformasi ekonomi nasional yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperkuat keterkaitan antarsektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi kawasan Kasulampua.

Secara keseluruhan, Konsultasi Regional PDRB Kasulampua Tahun 2026 menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, yaitu penguatan sektor pangan dan energi sebagai fondasi pembangunan ekonomi kawasan, percepatan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut forum tersebut, seluruh perwakilan provinsi di wilayah Kasulampua menandatangani “Kesepakatan Benuanta” sebagai komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi pembangunan ekonomi regional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar Boks V.I.1.1 Pelaksanaan KONREG Kasulampua 2025





Perkembangan Inflasi Daerah



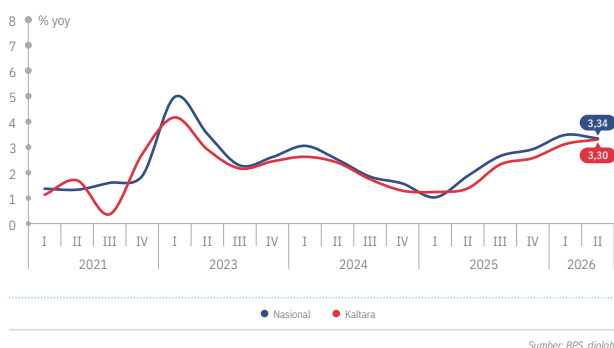
Inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,30% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,12% (yoy) dan juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,38% (yoy). Secara tahunan, capaian tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional meskipun tekanan yang lebih tinggi tercatat pada triwulan laporan. Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai rawit, bawang merah, dan beras, sejalan dengan dinamika pasokan dari daerah sentra produksi. Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya dari komoditas emas perhiasan yang mencatat inflasi tahunan tinggi sejalan dengan masih tingginya harga emas global. Tekanan dari sisi transportasi juga tercatat, terutama dari komoditas angkutan udara dan bensin yang meningkat pada akhir triwulan. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas secara tahunan, terutama ikan layang/ikan benggol, bawang putih, dan telur ayam ras, yang mencerminkan membaiknya pasokan.

2.1. Gambaran Umum

Inflasi triwulan II 2026 Provinsi Kalimantan Utara tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Berdasarkan gabungan 3 kabupaten/kota IHK di Provinsi Kalimantan Utara, inflasi tercatat sebesar 3,30% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,12% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya komoditas cabai rawit, bawang merah, serta beras, seiring dinamika pasokan dari daerah sentra produksi. Selain itu, kelompok Transportasi turut memberikan andil inflasi, terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara dan harga bensin pada akhir triwulan. Secara spasial, inflasi tertinggi pada triwulan II 2026 terjadi di Tanjung Selor sebesar 4,60% (yoy), diikuti Tarakan sebesar 3,62% (yoy), sementara Nunukan mencatat inflasi sebesar 2,08% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 tersebut berbanding terbalik dengan tren penurunan inflasi nasional (Grafik II.1). Secara regional Kalimantan, posisi inflasi Kalimantan Utara tercatat terendah ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (Grafik II.2).

Pada triwulan III 2026, inflasi Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$, serta menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh membaiknya pasokan komoditas hortikultura seiring mulai masuknya musim panen di sejumlah daerah sentra produksi, khususnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, yang diperkirakan menurunkan harga cabai merah dan bawang merah. Selain itu, tekanan inflasi diperkirakan turut mereda sejalan dengan koreksi harga emas dunia dan turunnya tarif angkutan udara seiring penurunan harga avtur dan minyak dunia.

Grafik II.1. Inflasi Gabungan Kota IHK di Kaltara & Nasional

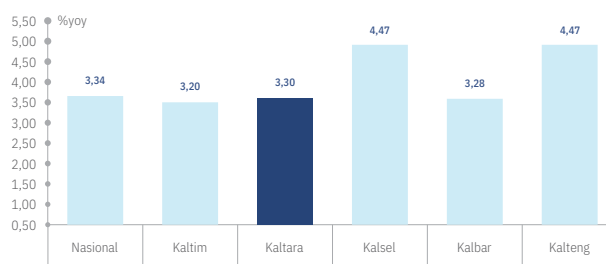


Tabel II.1. Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan I 2025 dan Triwulan II 2026 (mtm)

Kelompok Barang	Tw I 2026				Tw II 2026			
	Jan	Feb	Mar	Rata-rata	Apr	Mei	Jun	Rata-rata
Umum / Total	0,10	0,47	0,57	0,38	0,02	0,27	0,45	0,25

Sumber: BPS, diolah

Grafik II.2. Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di Kalimantan Triwulan II 2026



Berlanjutnya diskon tarif angkutan laut kelas ekonomi sebesar 30% hingga pertengahan Agustus 2026 juga diperkirakan menahan tekanan inflasi. Namun demikian, sejumlah komoditas masih berpotensi memberikan tekanan inflasi. Harga komoditas yang dipenuhi melalui impor, seperti bawang putih berpotensi meningkat di tengah kenaikan biaya logistik internasional dan tekanan nilai tukar Rupiah. Risiko tekanan inflasi juga dapat bersumber dari kenaikan harga komoditas pangan akibat potensi gangguan produksi dan distribusi seiring meningkatnya risiko cuaca kering akibat *El Niño* serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat menghambat kelancaran pasokan pangan dari daerah sentra produksi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltara untuk terus melakukan pengendalian inflasi berdasarkan *framework* 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif. Bank Indonesia sebagai bagian dari TPID juga terus menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah guna mendukung terjaganya inflasi.

2.2. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)

Secara rerata bulanan, inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK (Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 0,25% (mtm), menurun dibandingkan rerata triwulan I 2026 sebesar 0,38% (mtm) (Tabel II.1). Penurunan rerata inflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, khususnya inflasi April 2026 yang melambat signifikan menjadi 0,02% (mtm), dari 0,57% (mtm) pada Maret 2026.

Perkembangan Inflasi Periode April 2026

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada April 2026 tercatat inflasi sebesar 0,02% (mtm), lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang tercatat 0,57% (mtm). Inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga pada kelompok Transportasi. Secara bulanan, inflasi April 2026 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas tomat (andil 0,10% mtm), angkutan udara (andil 0,08% mtm), dan bawang merah (andil 0,04% mtm). Peningkatan harga tomat sejalan dengan pasokan dari sejumlah daerah pemasok utama yang masih terbatas, khususnya dari wilayah Sulawesi, akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif dan berdampak pada penurunan produksi. Selain itu, kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi berakhirnya program diskon tarif transportasi pasca-Idulfitri serta peningkatan harga avtur. Adapun kenaikan harga bawang merah dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi. Di sisi lain, inflasi April 2026 tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas pangan dan perawatan pribadi, antara lain cabai rawit (andil -0,16% mtm), daging ayam ras (andil -0,10% mtm), dan emas perhiasan (andil -0,10% mtm). Penurunan harga cabai rawit dipengaruhi membaiknya kelancaran distribusi pasca-Idulfitri, termasuk normalisasi layanan angkutan laut yang mendukung pasokan antarwilayah. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras didukung oleh normalisasi permintaan pasca-Idulfitri. Adapun penurunan harga emas perhiasan dipengaruhi koreksi harga emas global.

Perkembangan Inflasi Periode Mei 2026

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada Mei 2026 tercatat inflasi sebesar 0,27% (mtm), meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar 0,02% (mtm). Peningkatan inflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada

kelompok Transportasi serta kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Secara bulanan, inflasi Mei 2026 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas angkutan udara (andil 0,20% mtm), beras (andil 0,04% mtm), dan sawi hijau (andil 0,03% mtm). Kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan penyesuaian biaya operasional penerbangan dan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang HBKN Idul Adha dan libur panjang. Sementara itu, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan harga di tingkat pemasok di tengah ketergantungan Kalimantan Utara terhadap pasokan dari luar daerah. Adapun kenaikan harga sawi hijau dipengaruhi oleh penurunan curah hujan yang menyebabkan hasil panen sayuran lokal berkurang. Di sisi lain, inflasi Mei 2026 tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas pangan dan perawatan pribadi, antara lain telur ayam ras (andil -0,09% mtm), cabai rawit (andil -0,07% mtm), dan daging ayam ras (andil -0,07% mtm). Penurunan harga telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras sejalan dengan normalisasi permintaan dan membaiknya pasokan dari daerah pemasok utama pasca-HBKN.

Perkembangan Inflasi Periode Juni 2026

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada Juni 2026 tercatat inflasi sebesar 0,45% (mtm), meningkat dibandingkan Mei 2026 yang tercatat 0,27% (mtm). Kenaikan inflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi. Secara bulanan, inflasi Juni 2026 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas cabai rawit (andil 0,12% mtm), bawang merah (andil 0,08% mtm), dan bensin (andil 0,06% mtm). Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan cabai lokal. Sementara itu, kenaikan harga bawang merah dipengaruhi

Tabel II.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota Kaltara selama Triwulan II 2026 (mtm)

April 2026			Mei 2026			Juni 2026		
Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Tomat	24,24	0,10	Angkutan Udara	15,61	0,20	Cabai Rawit	13,90	0,12
Angkutan Udara	6,55	0,08	Beras	0,81	0,04	Bawang Merah	11,97	0,08
Bawang Merah	6,65	0,04	Sawi Hijau	14,79	0,03	Bensin	1,37	0,06
Angkutan Laut	5,79	0,03	Bakso Siap Santap	4,54	0,03	Kue Basah	3,99	0,04
Air Kemasan	2,06	0,02	Minyak Goreng	1,59	0,02	Angkutan Udara	2,31	0,03
Nasi dengan Lauk	0,73	0,02	Nasi dengan Lauk	0,67	0,02	Ikan Layang/ Ikan Benggol	2,25	0,03
Beras	0,47	0,02	Bahan Bakar Rumah Tangga	0,90	0,02	Tomat	5,14	0,03
Kue Kering Berminyak	4,05	0,02	Soto	3,78	0,02	Beras	0,43	0,02
Kangkung	5,15	0,02	Es	2,09	0,01	Cabai Merah	13,02	0,02
Susu Cair Kemasan	6,57	0,01	Pelumas/oli Mesin	3,22	0,01	Panci	5,84	0,01

Sumber: BPS, diolah

Tabel II.3. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan II 2026 (mtm)

April 2026			Mei 2026			Juni 2026		
Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Cabai Rawit	-14,81	-0,16	Telur Ayam Ras	-8,62	-0,09	Angkutan Laut	-10,43	-0,05
Daging Ayam Ras	-4,74	-0,10	Cabai Rawit	-7,21	-0,07	Telur Ayam Ras	-4,72	-0,05
Emas Perhiasan	-4,32	-0,10	Daging Ayam Ras	-3,27	-0,07	Emas Perhiasan	-1,15	-0,02
Ikan Layang/ Ikan Benggol	-5,91	-0,08	Emas Perhiasan	-2,80	-0,06	Kangkung	-7,15	-0,02
Telur Ayam Ras	-1,50	-0,02	Bawang Merah	-3,49	-0,02	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	-6,36	-0,01
Ikan Bandeng/Ikan Bolu	-1,47	-0,02	Bayam	-5,31	-0,01	Terong	-3,92	-0,01
Daun Seledri	-15,90	-0,01	Terong	-6,61	-0,01	Buku Tulis Bergaris	-2,36	-0,01
Cabai Merah	-3,68	0,00	Batu Bata/batu Tela	-3,20	-0,01	Bawang Putih	-2,16	-0,01
Bayam	-1,71	0,00	Ikan Bandeng/Ikan Bolu	-0,42	0,00	Ikan Bandeng/Ikan Bolu	-0,42	0,00
Terong	-1,74	0,00	Bola Lampu	-1,78	0,00	Ketimun	-7,48	0,00

Sumber: BPS, diolah

oleh terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi, khususnya Sulawesi Selatan. Adapun kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026. Di sisi lain, inflasi Juni 2026 tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas, antara lain angkutan laut (andil -0,05% mtm), telur ayam ras (andil -0,05% mtm), dan emas perhiasan (andil -0,02% mtm). Penurunan tarif angkutan laut dipengaruhi oleh pemberian diskon tarif tiket kapal penumpang kelas ekonomi sebesar 30% yang mulai berlaku pada 20 Juni 2026. Sementara itu, penurunan harga telur ayam ras didukung oleh pasokan yang memadai serta upaya stabilisasi biaya produksi peternak, termasuk melalui penyaluran jagung pakan bersubsidi. Adapun penurunan harga emas perhiasan dipengaruhi koreksi harga emas global.

2.3. Inflasi Tahunan (yoy)

Inflasi tahunan gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara meningkat pada triwulan II 2026. Inflasi Kalimantan Utara tercatat sebesar 3,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 3,12% (yoy) dan juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel II.4). Inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, beras, dan emas perhiasan yang memberikan andil signifikan. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global yang mendorong permintaan aset lindung nilai. Sementara itu, kenaikan harga cabai rawit dan beras turut menambah tekanan inflasi sejalan dengan dinamika pasokan pangan. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan relatif tertahan oleh beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi tahunan, terutama pada komoditas ikan layang/ikan benggol, bawang putih, dan telur ayam ras.

Komoditas emas perhiasan, tarif air minum PAM, dan cabai rawit menjadi kontributor utama pendorong inflasi tahunan pada triwulan II 2026. Komoditas emas perhiasan tercatat menyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 0,60% (yoy) (Tabel II.5). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan masih tingginya harga emas global pada triwulan II 2026, didorong oleh peningkatan permintaan aset lindung nilai di tengah ketegangan geopolitik serta berlanjutnya pembelian emas oleh bank sentral untuk diversifikasi cadangan devisa. Meskipun demikian, harga emas global mengalami koreksi dibandingkan triwulan sebelumnya setelah mencapai level tertinggi pada awal 2026. Komoditas tarif air minum PAM menjadi kontributor terbesar kedua dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,28% (yoy), sejalan dengan kenaikan tarif dasar air minum PAM di Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor). Cabai rawit turut memberikan andil inflasi sebesar 0,26% (yoy), sejalan dengan kenaikan harga pada akhir triwulan akibat berkurangnya produksi cabai lokal serta terbatasnya pasokan yang masuk dari daerah sentra produksi. Tekanan dari sisi transportasi juga tercatat pada komoditas angkutan udara dengan andil 0,24% (yoy), sejalan dengan peningkatan permintaan penerbangan selama periode libur panjang dan libur sekolah serta kenaikan harga avtur yang mendorong penyesuaian tarif penerbangan. Komoditas beras memberikan andil sebesar 0,17% (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan harga beras dari daerah pemasok di tengah tingginya ketergantungan Kalimantan Utara terhadap pasokan luar daerah dan masih terbatasnya produksi beras lokal.

Di sisi lain, komoditas ikan layang/ikan benggol, bawang putih, dan telur ayam ras menjadi kontributor utama penahan inflasi tahunan pada triwulan II 2026. Penurunan harga ikan layang/ikan benggol tercatat memberikan andil deflasi sebesar -0,10% (yoy), sejalan dengan harga ikan tangkap yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di tengah pasokan yang relatif mencukupi.

Tabel II.4. Inflasi Umum/Total Tahunan Kaltara 2022-2026 (yoy)

Kelompok Barang	Inflasi %YOY										Arah
	2024				2025				2026		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
Umum / Total	2,62	2,39	1,74	1,29	1,24	1,38	2,32	2,57	3,12	3,30	▲

Sumber: BPS, diolah

Tabel II.5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Gabungan Triwulan II 2026 (yoy)

Andil Inflasi		
Komoditas	YOY	%Andil
Emas Perhiasan	39,02	0,59
Tarif Air Minum Pam	12,57	0,28
Cabai Rawit	34,17	0,26
Angkutan Udara	18,75	0,24
Beras	4,00	0,17
Tarif Rumah Sakit	28,04	0,16
Bawang Merah	19,72	0,13
Tomat	25,86	0,12
Daging Ayam Ras	5,00	0,10
Nasi Dengan Lauk	2,58	0,08

Andil Deflasi		
Komoditas	YOY	%Andil
Ikan Layang/ Ikan Benggol	-7,18	-0,10
Bawang Putih	-13,28	-0,05
Telur Ayam Ras	-4,65	-0,05
Kangkung	-10,35	-0,04
Angkutan Laut	-6,73	-0,03
Sabun Detergen Bubuk	-1,85	-0,01
Pengharum Cucian/ Pelembut	-3,47	-0,01
Daun Bawang	-30,65	-0,01
Udang Basah	-1,17	-0,01
Pembersih Lantai	-7,45	-0,01

Sumber: BPS, diolah

Selain itu, bawang putih dan telur ayam ras masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar -0,05% (yoy). Penurunan harga bawang putih disebabkan ketersediaan pasokan dari luar daerah yang relatif terjaga, sementara penurunan harga telur ayam ras didukung oleh kecukupan pasokan telur serta penurunan tekanan biaya pakan peternak melalui penyaluran jagung pakan dalam program SPHP yang telah berjalan sejak Mei 2026. Deflasi juga terjadi pada beberapa komoditas lainnya seperti kangkung dan angkutan laut yang turut meredakan tekanan harga secara keseluruhan. Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar dapat dilihat pada Tabel II.5.

2.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi tahunan pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, sementara tekanan yang lebih tinggi relatif tertahan oleh rendahnya inflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat sebesar 3,05% (yoy, andil 0,99%), menjadi penyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan triwulan laporan. Tekanan pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan harga cabai rawit, beras, bawang merah, dan tomat, sejalan dengan terbatasnya pasokan sejumlah komoditas pangan dari daerah sentra produksi. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat inflasi sebesar 9,31% (yoy, andil 0,71%), didorong oleh tingginya inflasi tahunan emas perhiasan. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

mencatat inflasi sebesar 3,06% (yoy, andil 0,50%), terutama didorong oleh kenaikan tarif air minum PAM di Kabupaten Bulungan (Tanjung Selor). Sementara itu, kelompok Transportasi mencatat inflasi sebesar 3,74% (yoy, andil 0,45%), terutama disumbang oleh angkutan udara dan bensin. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi relatif tertahan oleh kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mencatat inflasi sebesar 0,19% (yoy) dengan andil terbatas sebesar 0,01% (yoy), serta kelompok Pendidikan dan Rekreasi, Olahraga, dan Budaya yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,02% (yoy).

Tabel II.6. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan II 2026 (yoy)

Inflasi Kelompok		
Komoditas	YOY	Andil
Umum	3,30	3,30
Makanan, Minuman Dan Tembakau	3,05	0,99
Pakaian Dan Alas Kaki	0,57	0,03
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rt	3,06	0,50
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rt	0,96	0,05
Kesehatan	8,26	0,20
Transportasi	3,74	0,45
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0,19	0,01
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,54	0,02
Pendidikan	0,69	0,02
Penyediaan Makanan Dan Minuman/restoran	3,86	0,33
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	9,31	0,71

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 3,05% (yoy) dengan andil sebesar 0,99% (yoy) terhadap inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara, menjadikannya kelompok penyumbang andil terbesar pada triwulan laporan (Tabel III.7). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari komoditas cabai rawit yang mencatat inflasi sebesar 34,17% (yoy) dengan andil 0,26% (yoy), diikuti beras sebesar 4,00% (yoy) dengan andil 0,17% (yoy), bawang merah sebesar 19,72% (yoy) dengan andil 0,13% (yoy), serta tomat sebesar 25,86% (yoy) dengan andil 0,12% (yoy). Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan lokal dan terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi, sementara kenaikan harga bawang merah dan tomat sejalan dengan terbatasnya pasokan dari wilayah Sulawesi pada akhir triwulan. Adapun kenaikan harga beras dipengaruhi tingginya ketergantungan Kalimantan Utara terhadap pasokan dari luar daerah di tengah masih terbatasnya produksi lokal. Tekanan tambahan juga berasal dari kenaikan harga daging ayam ras dengan andil 0,10% (yoy) serta air kemasan dan minyak goreng masing-masing dengan andil 0,06% (yoy). Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga ikan layang/ikan benggol dengan andil deflasi sebesar -0,10% (yoy), bawang putih dan telur ayam ras masing-masing sebesar -0,05% (yoy), serta kangkung sebesar -0,04% (yoy). Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.8.

Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 9,31% (yoy) dengan andil sebesar 0,71% (yoy) terhadap inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara (Tabel III.8). Tekanan inflasi pada kelompok ini secara dominan bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang mencatat inflasi sebesar 39,02% (yoy) dengan andil sebesar 0,59% (yoy), jauh melampaui komoditas lainnya dalam kelompok yang sama. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan masih tingginya harga emas global pada triwulan II 2026, didukung oleh tingginya permintaan aset lindung nilai di tengah ketegangan geopolitik serta berlanjutnya pembelian emas oleh bank sentral untuk diversifikasi cadangan. Selain emas perhiasan, tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga krim wajah dengan andil 0,03% (yoy), popok bayi sekali pakai/diapers dan pasta gigi masing-masing dengan andil 0,02% (yoy), serta pembalut wanita dan tarif gunting rambut pria masing-masing sebesar 0,01% (yoy). Kenaikan harga komoditas tersebut mencerminkan penyesuaian harga pada produk perawatan pribadi dan jasa di tingkat konsumen. Di sisi lain, deflasi terjadi pada komoditas sabun mandi sebesar -1,92% (yoy) dengan andil -0,01% (yoy), sementara komoditas tisu dan minyak rambut juga mencatat penurunan harga dengan andil yang sangat terbatas dan belum mampu secara signifikan meredam tekanan inflasi pada kelompok ini. Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.9.

Tabel II.7. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan II 2026 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil
Cabai Rawit	34,17	0,26
Beras	4,00	0,17
Bawang Merah	19,72	0,13
Tomat	25,86	0,12
Daging Ayam Ras	5,00	0,10
Air Kemasan	5,48	0,06
Minyak Goreng	4,01	0,06
Kue Basah	5,02	0,05
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	1,61	0,03
Ikan Bandeng/Ikan Bolu	1,95	0,02

Komoditas	Deflasi	Andil
Ikan Layang/ Ikan Benggol	-7,18	-0,10
Bawang Putih	-13,28	-0,05
Telur Ayam Ras	-4,65	-0,05
Kangkung	-10,35	-0,04
Daun Bawang	-30,65	-0,01
Udang Basah	-1,17	-0,01
Jagung Manis	-3,22	-0,01
Daun Kemangi	-36,16	-0,01
Susu Bubuk untuk Balita	-1,62	-0,01
Terong	-2,62	-0,01

Sumber: BPS, diolah

Tabel II.8. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan II 2026 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil
Emas Perhiasan	39,02	0,59
Krim Wajah	9,49	0,03
Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	1,89	0,02
Pasta Gigi	2,85	0,01
Pembalut Wanita	2,99	0,01
Tarif Gunting Rambut Pria	2,27	0,01
Sikat Gigi	5,54	0,01
Deodorant	2,95	0,01
Pembersih/Penyegar	9,01	0,00
Sabun Wajah	3,19	0,00

Komoditas	Deflasi	Andil
Sabun Mandi	-1,92	-0,01
Tisu	-0,27	0,00
Minyak Rambut	-0,18	0,00
Tisu Basah	-0,10	0,00
Lotion Anti Nyamuk	0,00	0,00

Sumber: BPS, diolah

Perkembangan Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Pada triwulan II 2026, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tercatat mengalami inflasi yang relatif rendah, dengan tekanan harga terutama berasal dari komoditas telepon seluler, laptop/notebook, dan biaya administrasi buku tabungan (Tabel III.9). Komoditas telepon seluler mencatat inflasi sebesar 1,21% (yoy) dengan andil 0,01% (yoy), sementara laptop/notebook mencatat inflasi sebesar 6,92% (yoy) dan biaya administrasi buku tabungan sebesar 0,96% (yoy), masing-masing dengan andil yang sangat terbatas terhadap inflasi kelompok. Tekanan inflasi pada kelompok ini relatif terkendali sejalan dengan persaingan harga produk elektronik dan layanan komunikasi yang tetap terjaga. Di sisi lain, deflasi terjadi pada komoditas televisi berwarna sebesar -1,96% (yoy), aksesoris HP sebesar -10,47% (yoy), dan headset sebesar -5,92% (yoy), meskipun seluruhnya memberikan andil yang sangat terbatas terhadap inflasi kelompok. Penurunan harga pada komoditas tersebut mencerminkan koreksi harga produk elektronik dan aksesoris komunikasi sejalan dengan tingginya persaingan ritel serta cepatnya siklus penggantian produk. Secara keseluruhan, rendahnya inflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan turut menahan tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II 2026. Adapun komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada kelompok ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.10.

Tabel II.9. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Triwulan II 2026 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil
Telepon Seluler	1,21	0,01
Laptop/notebook	6,92	0,01
Biaya Administrasi Buku Tabungan Bank	0,96	0,00

2.5. Upaya Pengendalian Inflasi Daerah

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID kabupaten/kota terus melakukan koordinasi secara intensif untuk menjaga stabilitas inflasi pada triwulan II 2026. Koordinasi, sinergi, dan upaya yang intens dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kaltara dan TPID di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten selama bulan April hingga Juni 2026 (Tabel II. 11) dengan fokus memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, dan kelancaran distribusi melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan setiap bulan.

Pada triwulan II 2026, TPID Se-Kaltara secara rutin melakukan operasi pasar di sejumlah lokasi strategis di kabupaten/kota untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan menjamin distribusi pasokan pangan sampai ke daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, koordinasi pengendalian inflasi diperkuat melalui rapat koordinasi TPID secara berkala untuk memantau perkembangan harga dan pasokan, mengidentifikasi risiko gangguan distribusi, serta merumuskan tindak lanjut pengendalian harga komoditas strategis. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara bersinergi dengan TPID untuk mengembangkan pertanian lokal dengan meningkatkan mekanisasi dan penggunaan teknologi pertanian. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat menjaga ekspektasi inflasi masyarakat melalui ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang didukung oleh kelancaran distribusi.

Komoditas	Deflasi	Andil
Televisi Berwarna	-1,96	0,00
Aksesoris Hp	-10,47	0,00
Headset	-5,92	0,00

Sumber: BPS, diolah

Tabel II.10. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama Triwulan II 2026

Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan / Deskripsi Kegiatan	Penyelenggara
6, 13, 20, dan 27 April 2026	Rakor Rutin Pengendalian Inflasi Daerah	Evaluasi perkembangan inflasi dan IPH secara mingguan serta koordinasi tindak lanjut pengendalian harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi komoditas strategis.	Kemendagri
10, 16, dan 20 April 2026	Penjualan pangan murah melalui RPK Imbaya Taka Jaya, Tana Tidung	Menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bapokting melalui penyediaan komoditas pangan dengan harga terjangkau secara rutin.	Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tana Tidung bersama Bulog
46126	Pasar Murah Mess Walet, Kota Tarakan	Menjaga keterjangkauan harga bapokting serta memperluas akses masyarakat terhadap pangan strategis dengan harga terjangkau.	TPID Kota Tarakan
14-15 April 2026	Konsultasi Regional PDRB Wilayah Kasulampua 2026	Memperkuat kolaborasi penyediaan statistik dasar, sektoral, dan tematik yang andal, akurat, lengkap, serta terintegrasi melalui penguatan prinsip Satu Data Indonesia guna mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah.	Pemprov Kaltara, Bank Indonesia, BPS, dan DJPb
17, 22, 27, 29, dan 30 April 2026	Penjualan pangan murah melalui jaringan Outlet Pangan, RPK, toko, dan kios pangan di Kabupaten Malinau	Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui optimalisasi jaringan Outlet Pangan Malinau, RPK Sinar Bintang, Toko Mulia Jaya, Toko Alvin, dan Kios Pangan Simpang Manggis.	TPID Kab. Malinau bersama Bulog
46136	Pasar Murah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau	Menjaga keterjangkauan harga bapokting dan meningkatkan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis dengan harga terjangkau.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Malinau
24-26 April 2026	Kaltara Sharia Festival (KASHAFA) 2026 dan Pasar Murah	Menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memperkuat kapasitas pasokan pangan halal melalui pasar murah, sertifikasi 15 juru sembelih halal, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi 182 UMKM, termasuk mendukung kesiapan pemasok Program MBG.	KPwBI Prov. Kaltara bersama TPID dan mitra strategis
5, 11, 18, dan 25 Mei 2026	Rakor Rutin Pengendalian Inflasi Daerah	Evaluasi perkembangan inflasi dan IPH secara mingguan serta penguatan langkah stabilisasi harga dan pasokan pangan, termasuk pemantauan komoditas strategis menjelang HBKN Iduladha.	Kemendagri
2 Mei 2026	Pasar Murah Kodim 0914/Tana Tidung	Menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta memperkuat sinergi pemerintah daerah dan TNI dalam stabilisasi harga pangan.	Kodim 0914/Tana Tidung bersama TPID Kab. Tana Tidung
4, 7, 10, dan 16 Mei 2026	Penjualan pangan murah melalui jaringan Outlet Pangan, RPK, dan kios pangan di Kabupaten Malinau	Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Outlet Pangan Malinau, RPK Mulya Sabar, dan Kios Pangan Simpang Manggis.	TPID Kab. Malinau bersama Bulog
6, 8, 19, dan 26 Mei 2026	Penjualan pangan murah melalui RPK Imbaya Taka Jaya, Tana Tidung	Menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bapokting melalui penyediaan komoditas pangan dengan harga terjangkau secara rutin.	Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tana Tidung bersama Bulog
20 dan 25 Mei 2026	Gerakan/Pasar Pangan Murah menjelang HBKN Iduladha, Kota Tarakan	Menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan strategis serta mengantisipasi peningkatan permintaan bapokting menjelang HBKN Iduladha.	TPID Kota Tarakan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bulog
22 dan 29 Mei 2026	Gerakan Pangan Murah POLRI di Kota Tarakan	Menjaga daya beli dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui pelaksanaan GPM di Kelurahan Karang Anyar Pantai.	Polres Tarakan/Polri
25-27 Mei 2026	Pasar Murah sekaligus Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) di wilayah 3T Kabupaten Nunukan	Menjaga stabilitas harga dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui pasar murah di Kecamatan Tulin Onsoi, Lumbis, dan Sebuksu.	KPwBI Prov. Kaltara bersama TPID Kab. Nunukan

Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan / Deskripsi Kegiatan	Penyelenggara
8, 15, 22, dan 29 Juni 2026	Rakor Rutin Pengendalian Inflasi Daerah	Evaluasi perkembangan inflasi dan IPH secara mingguan serta koordinasi pengendalian harga pangan strategis, termasuk antisipasi risiko gangguan produksi dan distribusi akibat musim kemarau dan potensi El Niño.	Kemendagri
1, 15, 17, dan 26 Juni 2026	Penjualan pangan murah melalui jaringan Outlet Pangan, RPK, toko, dan kios pangan di Kabupaten Malinau	Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Outlet Pangan Malinau, RPK Mulya Sabar, RPK Sinar Bintang, Toko Alvin, dan Kios Pangan Simpang Manggis.	TPID Kab. Malinau bersama Bulog
1 Juni 2026	Pasar Murah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau	Menjaga keterjangkauan harga bapakting melalui penyediaan pangan strategis dengan harga terjangkau.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Malinau
4, 10, dan 18 Juni 2026	Pasar Murah sinergi TPID dan Kodim 0914/Tana Tidung	Menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta memperkuat sinergi pemerintah daerah dan TNI dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan.	TPID Kab. Tana Tidung bersama Kodim 0914/Tana Tidung
4, 8, dan 21 Juni 2026	Gerakan Pangan Murah POLRI di Kota Tarakan	Memperluas akses masyarakat terhadap bapakting dengan harga terjangkau melalui GPM di Kelurahan Karang Anyar, Selumit, serta kegiatan CFD dalam rangka HUT Bhayangkara di Stadion Datu Adil.	Polres Tarakan/Polri bersama mitra
8 dan 14 Juni 2026	Gerakan Pangan Murah di Kelurahan Juata Laut dan GPM Mobile di Kelurahan Sebengkok, Tarakan	Menjaga keterjangkauan harga dan memperluas jangkauan distribusi pangan strategis melalui GPM pada tingkat kelurahan dan layanan pangan murah bergerak.	TPID Kota Tarakan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bulog

2.6. Tracking Inflasi Triwulan III 2026

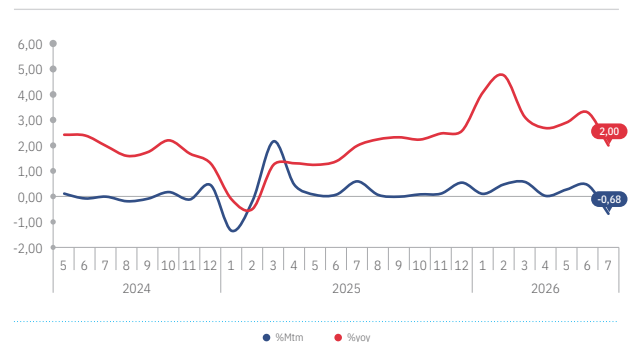
Inflasi tahunan gabungan 3 kabupaten/kota IHK Kalimantan Utara pada triwulan III 2026 (realisasi hingga Juli 2026) tercatat menurun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya dan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional. Pada Juli 2026, IHK gabungan 3 kabupaten/kota mengalami deflasi sebesar 0,68% (mtm), berbalik arah dibandingkan Juni 2026 yang mencatat inflasi sebesar 0,45% (mtm) (Grafik II.3). Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Kalimantan Utara pada Juli 2026 menurun menjadi 2,00% (yoy) dari 3,30% (yoy) pada Juni 2026.

Deflasi bulanan pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara komoditas, deflasi terutama disumbang oleh penurunan harga cabai rawit (andil -0,25% mtm), bawang merah (andil -0,10% mtm), tomat (andil -0,09% mtm), emas perhiasan (andil -0,07% mtm), dan tarif angkutan laut (andil -0,07% mtm). Penurunan harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan seiring berlangsungnya musim panen, baik di sentra produksi lokal maupun Sulawesi, disertai membaiknya distribusi jalur laut pasca periode pemeliharaan kapal pemasok. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya koreksi

harga emas di pasar internasional pada Juli 2026. Adapun penurunan tarif angkutan laut didukung oleh kebijakan diskon tarif tiket kapal laut penumpang kelas ekonomi sebesar 30% yang berlaku sejak 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

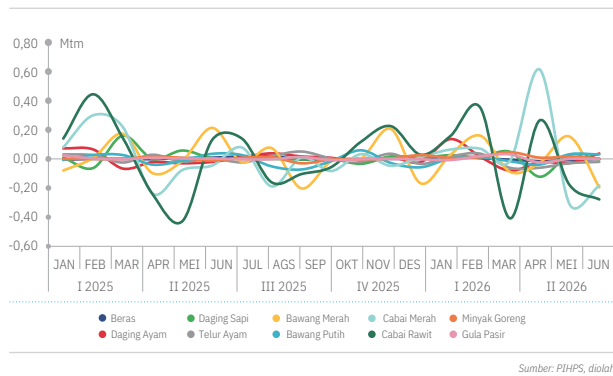
Di sisi lain, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga bensin (andil 0,03% mtm), serta beras, bawang putih, sigaret putih mesin, dan sepeda motor yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,01% (mtm). Kenaikan harga bensin terutama mencerminkan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina (RON 92) yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Sementara itu,

Grafik II.3. Perkembangan Inflasi Bulanan Kalimantan Utara



kenaikan harga beras dipengaruhi oleh meningkatnya harga jual distributor seiring berakhirnya musim panen di daerah sentra produksi yang telah memasuki musim tanam kedua, sehingga ketersediaan hasil panen di tingkat produsen menurun. Adapun kenaikan harga bawang putih dipengaruhi oleh terbatasnya stok di tingkat pedagang dan belum masuknya kiriman dari daerah pemasok di Sulawesi, di tengah ketersediaan bawang putih di daerah pemasok yang juga relatif terbatas.

Grafik II.4. Perkembangan Harga Bulanan Pangan Strategis Kalimantan Utara



strategis. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan strategi 4K serta dukungan terhadap efektivitas Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) guna memastikan inflasi tetap terkendali sepanjang triwulan III 2026.

2.7. Prakiraan Inflasi Triwulan III 2026

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan III 2026 diprakirakan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh meredanya tekanan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring membaiknya pasokan komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit, bawang merah, dan tomat, didukung masuknya musim panen di sentra produksi lokal maupun Sulawesi. Tekanan pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga diprakirakan melambat sejalan dengan berlanjutnya koreksi harga emas global. Selain itu, tekanan pada Kelompok Transportasi diprakirakan lebih terbatas seiring penurunan harga avtur serta pemberlakuan diskon tarif angkutan laut kelas ekonomi hingga pertengahan Agustus 2026. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi diprakirakan tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras seiring berakhirnya musim panen di daerah sentra produksi dan bawang putih akibat terbatasnya pasokan dari daerah pemasok, serta kenaikan harga beberapa komoditas makanan jadi dan rokok. Risiko gangguan produksi dan distribusi pangan akibat potensi *El Niño* dan kebakaran hutan dan lahan juga perlu dicermati. Menghadapi berbagai risiko inflasi tersebut, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara konsisten memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan

Launching Mini Distribution Center (MDC) : Inovasi Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026

BOKS 2



Gambar Boks V.2.1 Pelaksanaan Launching MDC di Pasar Tenguyun Kota Tarakan

Sebagai bagian dari penguatan upaya pengendalian inflasi daerah, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Pemerintah Kota Tarakan telah melaksanakan *Launching Mini Distribution Center* (MDC) di Pasar Tenguyun Kota Tarakan. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat instrumen stabilisasi harga melalui intervensi sisi pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis.

Program MDC merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Kota Tarakan, dan Perum Bulog. Kolaborasi ini mencerminkan penguatan koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya pada aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi (4K). Dengan adanya MDC, diharapkan respons intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah apabila terjadi lonjakan harga komoditas tertentu di tingkat pasar.

MDC dirancang sebagai simpul distribusi yang berfungsi untuk mendekatkan pasokan komoditas kepada pedagang dan konsumen secara lebih cepat dan efisien. Kehadiran MDC diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang panjang, mengurangi potensi biaya tambahan di tingkat perantara, serta menekan volatilitas harga di pasar, khususnya pada periode dengan potensi tekanan inflasi yang meningkat seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum musiman lainnya.

Selain sebagai instrumen stabilisasi, MDC juga berperan sebagai mekanisme *early response* terhadap potensi gangguan distribusi, mengingat sebagian besar pasokan pangan Kota Tarakan masih bergantung pada jalur distribusi dari luar daerah. Dengan sistem distribusi

yang lebih terorganisir, MDC diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasokan lokal serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pasar dan program stabilisasi lainnya.

Ke depan, program MDC akan terus dievaluasi dan dioptimalkan agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga di Kota Tarakan. Inisiatif ini juga berpotensi menjadi model penguatan distribusi pangan yang dapat direplikasi pada pasar lain di wilayah Kalimantan Utara sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.



Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

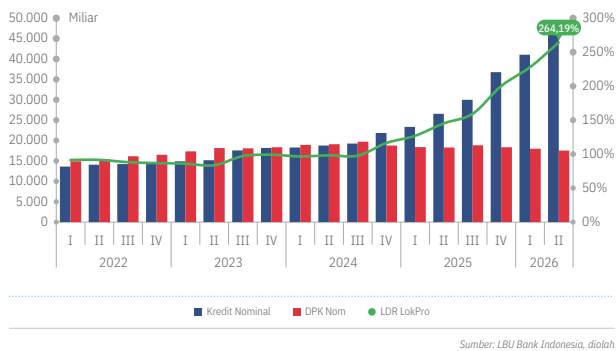


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh intermediasi perbankan. Penyaluran kredit tumbuh di atas level regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 5,05 % (yoy) dan 56,55% (yoy). Meningkatnya penyaluran kredit sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi yang sudah dilakukan selama triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar Rp14,3 Triliun atau 10,14 % dari target investasi 2026 yang ditetapkan sebesar Rp141 Triliun. Meningkatnya kredit modal kerja terjadi seiring optimisme masyarakat terhadap perekonomian, terutama pada sektor bisnis.

3.1. Intermediasi dan Pertumbuhan Aset Perbankan

Total aset perbankan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp23,05 Triliun tumbuh positif sebesar 20,93% (yoy). Pertumbuhan aset perbankan di wilayah Kalimantan Utara sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit. Kinerja aset perbankan di wilayah Kalimantan dan Nasional juga tetap tumbuh positif, masing-masing tumbuh sebesar 1,31% (yoy) dan 11,03% (yoy) (Grafik III.2).

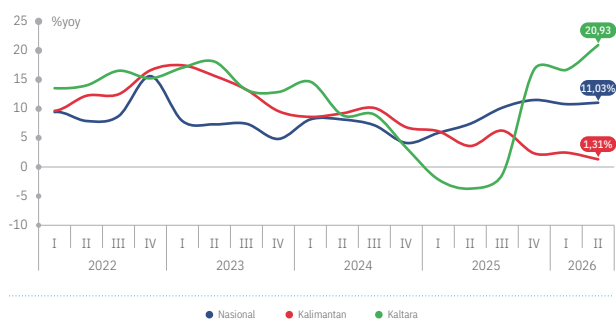
Grafik III.1. Perkembangan Intermediasi Perbankan



Total aset perbankan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp23,05 Triliun tumbuh positif sebesar 20,93% (yoy). Pertumbuhan aset perbankan di wilayah Kalimantan Utara sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit. Kinerja aset perbankan di wilayah Kalimantan dan Nasional juga tetap tumbuh positif, masing-masing tumbuh sebesar 1,31% (yoy) dan 11,03% (yoy) (Grafik III.2).

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami kontraksi sebesar 3,92% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,99% (yoy), sebagaimana ditunjukkan pada Grafik III.3. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh kontraksi DPK Pemerintah sebesar 34,41% (yoy). Penurunan DPK Pemerintah sejalan dengan pelonggaran kebijakan efisiensi

Grafik III.2. Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



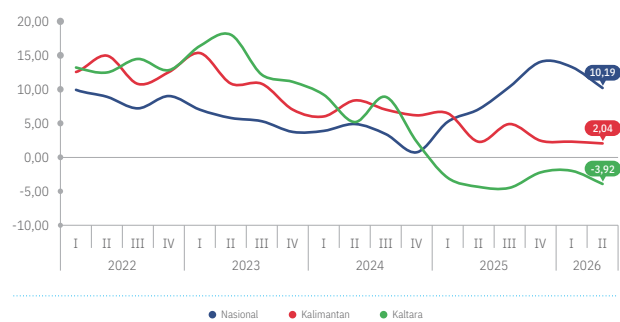
anggaran yang mendorong percepatan realisasi belanja dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berdampak pada berkurangnya saldo dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan. Di sisi lain, DPK korporasi dan perorangan masih mencatatkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 7,71% (yoy) dan 3,44% (yoy), sehingga menahan kontraksi DPK yang lebih dalam.

Secara nominal, total DPK tercatat sebesar Rp17,29 triliun, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp17,72 triliun. Berdasarkan jenis simpanan, giro masih mengalami kontraksi sebesar 27,28% (yoy) dan deposito terkontraksi sebesar 1,36% (yoy). Sementara itu, tabungan tumbuh sebesar 7,39% (yoy) (Grafik III.4). Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran penempatan dana dari instrumen yang bersifat transaksional, terutama giro, menuju instrumen simpanan yang lebih likuid seperti tabungan, di tengah deposito yang relatif terjaga meskipun masih mengalami kontraksi terbatas.

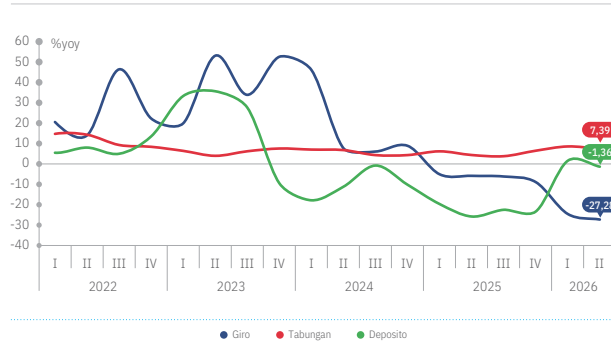
Berdasarkan jenisnya, tabungan masih menjadi pilihan utama simpanan nasabah dengan pangsa mencapai 59,05%, diikuti oleh simpanan deposito sebesar 21,27% dan giro dengan pangsa sebesar 19,68% (Grafik III.5).

Secara spasial, pangsa DPK terbesar masih terkonsentrasi di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan, masing-masing sebesar 48,12%, 19,23%, dan 18,22%. Dari sisi pertumbuhan, DPK pada kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Kota Tarakan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 100,16% (yoy), sementara Kabupaten Tana Tidung mencatatkan pertumbuhan terendah sebesar 10,89% (yoy). Dengan demikian, pertumbuhan DPK secara spasial terutama ditopang oleh peningkatan penghimpunan dana di Kota Tarakan (Tabel III.1).

Grafik III.3. Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



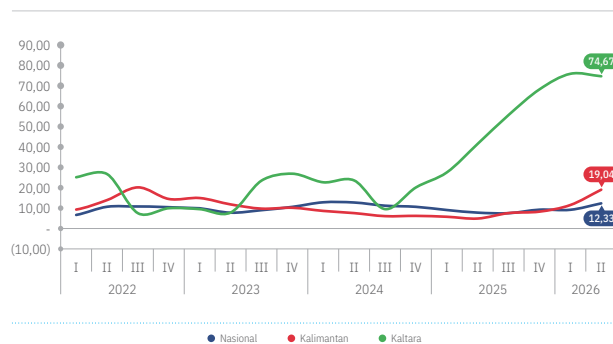
Grafik III.4. Perkembangan Pertumbuhan Komponen DPK Perbankan Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Kredit perbankan tumbuh terakselerasi sebesar 74,67% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi (129,92%,yoy) dan kredit modal kerja (56,55%,yoy). Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan kredit terjadi hampir di seluruh sektor terutama LU LU Listrik, Gas dan Air sebesar 186,74% (yoy), diikuti LU Industri Pengolahan sebesar 210,36% (yoy) dan LU Pertambangan sebesar 34,42% (yoy). Pembangunan PSN KIH di Kabupaten Bulungan yang masih berlangsung dan belum sepenuhnya beroperasi terus mendorong transformasi ekonomi hijau di Kalimantan Utara. Proses pembangunan kawasan tersebut membuka ruang peningkatan penyaluran kredit perbankan, terutama untuk investasi dan modal kerja, serta secara bertahap mendorong kredit konsumsi seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan

Grafik III.6. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



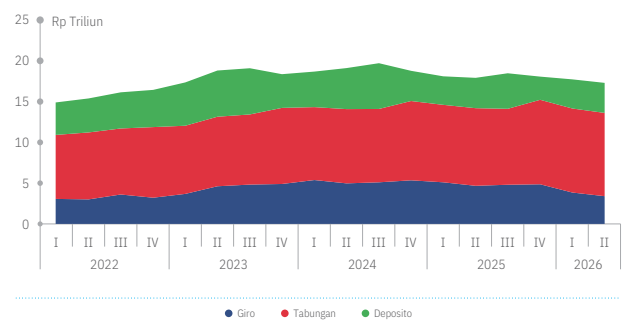
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel III.1. Perkembangan DPK secara spasial

Kabupaten/Kota	Nominal DPK (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% ,yoy)	
			I 2026	II 2026
Prov. Kaltara	34.364	100,00%	-1,99	88,07
Bulungan	6.607	19,23%	-0,98	82,79
Nunukan	6.262	18,22%	2,74	98,54
Malinau	3.996	11,63%	-11,83	68,42
Tana Tidung	965	2,81%	-48,88	10,89
Tarakan	16.535	48,12%	3,06	100,16

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.5. Perkembangan Komponen DPK Perbankan Kaltara

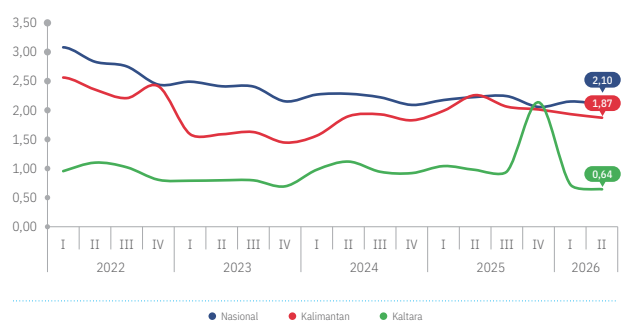


Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan kredit secara nominal mencapai Rp46,38 Triliun lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp41,04 Triliun.

Di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit, risiko kredit tetap terjaga tercermin dari Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 0,64%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,14%. NPL Kaltara pada periode triwulan II 2026 lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan nasional masing-masing sebesar 1,87% dan 2,10% (Grafik IV.7). Penurunan rasio NPL perbankan di Kalimantan Utara pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh membaiknya kualitas kredit seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang masih tinggi sejalan dengan kegiatan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi Kaltara yang positif

Grafik III.7. Perkembangan NPL Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel III.2. Perkembangan Kredit Secara Spasial

Kabupaten/Kota	Nominal DPK (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% ,yoy)	
			I 2026	II 2026
Prov. Kaltara	46.378	100,00%	75,88	74,67
Bulungan	21.961	47,35%	100,83	84,59
Nunukan	4.072	8,78%	-11,95	-9,57
Malinau	1.594	3,44%	2,22	2,92
Tana Tidung	561	1,21%	9,37	34,74
Tarakan	18.191	39,22%	116,62	122,18

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

turut menopang pendapatan pelaku usaha dan rumah tangga, sehingga kapasitas pembayaran kewajiban debitur relatif tetap terjaga.

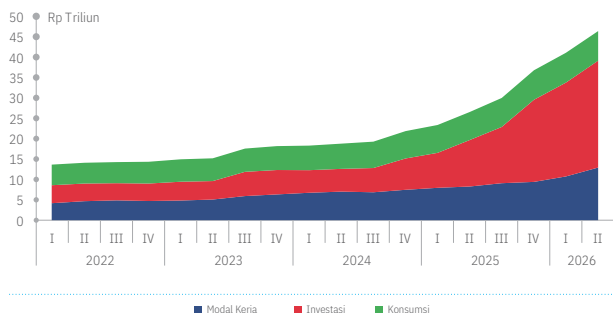
Secara spasial pangsa penyaluran kredit terbesar berasal dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan masing-masing sebesar 47,35%, 39,22%, dan 8,78%. Kredit di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 122,18% (yoy) dan 84,59% (yoy). Di sisi lain, kredit di Kabupaten Nunukan masih mengalami kontraksi sebesar 9,57% (yoy) (Tabel IV. 2). Peningkatan penyaluran kredit di Kota Tarakan didorong oleh ekspansi sektor industri pengolahan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas produksi pabrik pengolahan bubur kertas (pulp) berbasis kayu di Kota Tarakan. Perkembangan tersebut konsisten dengan kinerja industri pengolahan Kaltara yang turut ditopang oleh peningkatan produksi pabrik pengolahan kertas di Tarakan.

3.2. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan penyaluran kredit berasal dari peningkatan Kredit Investasi menjadi sebesar 129,92% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik IV. 9). Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas LU Listrik, Gas dan Air (LGA), LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan masing-masing sebesar 186,74% (yoy), 34,42% (yoy), dan 210,36% (yoy). Peningkatan pembiayaan pada LU Industri Pengolahan turut didorong oleh perkembangan aktivitas KAI yang telah memasuki tahap *commissioning* sejak akhir 2025 dan secara bertahap melakukan *ramp-up* produksi menuju kapasitas penuh sebesar 500.000 ton aluminium per tahun yang ditargetkan tercapai pada akhir 2026. Berdasarkan komposisinya, Kredit Investasi memiliki pangsa terbesar mencapai 56,53%, disusul oleh Kredit Modal kerja dan Kredit Konsumsi masing-masing sebesar 27,84% dan 15,63%. (Grafik III. 8).

Secara nominal, penyaluran kredit didominasi oleh kredit di atas Rp5 miliar dan Rp100Jt-Rp500Jt. Pangsa kredit terbesar adalah kredit diatas Rp5 miliar sebesar 74,14%, naik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 72,68%.

Grafik III.8. Perkembangan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara



Tabel III.3. Klasifikasi Penyaluran Kredit Kaltara Berdasarkan Nilai

Kredit	Nominal Kredit (Milyar)	% Nominal	Jumlah Rekening	% Rekening
<100 JT	2.573,02	5,55%	214.187	85,62%
>100JT - 500JT	6.606,26	14,24%	32.930	13,16%
>500JT - 1 M	1.053,33	2,27%	1.860	0,74%
1M-5M	1.762,73	3,80%	968	0,39%
>5M	34.382,78	74,14%	214	0,09%
Total	46.378,12	100,00%	250.159	100,00%

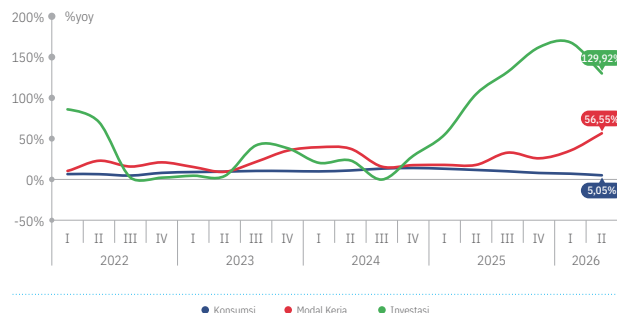
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Pangsa penyaluran kredit dengan nilai Rp100Jt-Rp500Jt mengalami penurunan menjadi sebesar 14,24% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,19%. Jika dilihat berdasarkan jumlah rekening, penyaluran kredit mayoritas diberikan kepada debitur dengan nominal kredit Rp100 juta ke bawah dengan pangsa sebesar 85,62% (Tabel III. 3).

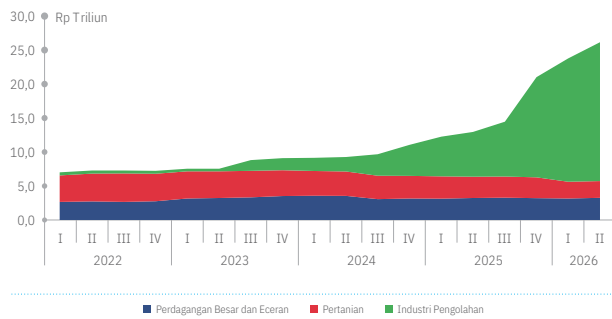
Secara sektoral, pangsa penyaluran kredit didominasi oleh LU Industri Pengolahan yang mencapai 44,19% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 44,07% didukung oleh adanya pembangunan industri manufaktur PSN KIH di Tanah Kuning. Pangsa kredit terbesar selanjutnya yaitu LU Listrik, Gas, dan Air sebesar 18,75% lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 14,41%. LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 7,03%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,73%. (Grafik IV.10).

Pertumbuhan kredit pada periode berjalan terutama didorong oleh peningkatan penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan serta LU Listrik, Gas, dan Air yang masing-masing tumbuh sebesar 210,36% (yoy) dan 186,74% (yoy). Akselerasi kredit pada sektor tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH) di Tanah Kuning. Aktivitas industri di kawasan tersebut mulai memasuki tahap operasional secara bertahap, termasuk KAI yang telah memasuki tahap *commissioning* sejak akhir 2025 dan melakukan *ramp-up*

Grafik III.9. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara



Grafik III.10. Perkembangan Kredit Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha



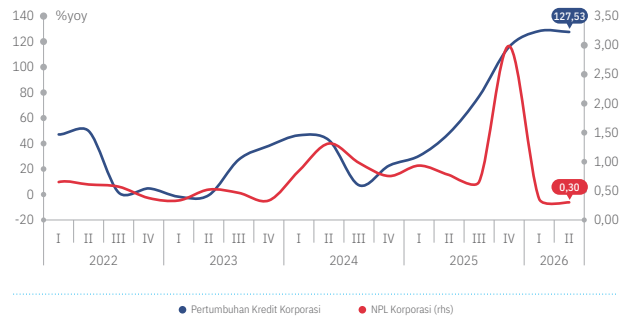
produksi menuju kapasitas penuh pada akhir 2026, disertai pengembangan infrastruktur pendukung seperti penyediaan energi dan pembangunan pembangkit listrik. Perkembangan tersebut mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk konstruksi, mesin dan peralatan, bahan baku, logistik, serta infrastruktur energi. Di tengah peningkatan penyaluran kredit tersebut, risiko kredit pada sektor terkait tetap rendah dan terkendali, tercermin dari rasio NPL LU Listrik, Gas, dan Air serta LU Industri Pengolahan yang masing-masing berada pada level 0,00% dan 0,02%.

3.3. Pembiayaan Sektor Korporasi

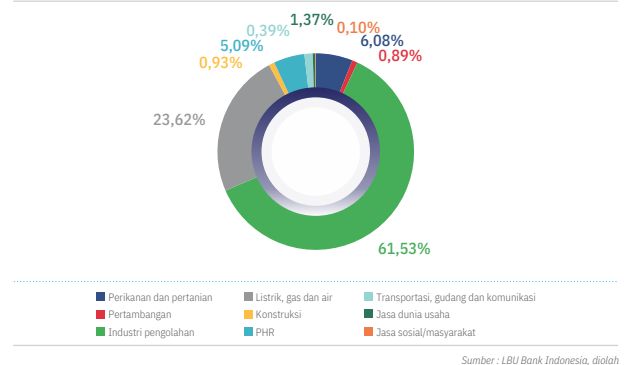
Pembiayaan korporasi pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi sebesar 127,53% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 128,26% (yoy) (Grafik III.11). Akselerasi kredit korporasi didorong oleh peningkatan penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan dan LU Listrik, Gas, dan Air (LGA). Peningkatan pada industri pengolahan terutama berasal dari subsektor kayu olahan, sementara pada LU LGA didorong oleh pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung KIH di Tanah Kuning serta penguatan sistem kelistrikan melalui PLTG Tanjung Selor. Berdasarkan strukturnya, mayoritas Kredit Korporasi ditujukan kepada LU Industri Pengolahan (61,53%); diikuti dengan sektor Listrik, Gas dan Air (LGA) (23,62%); dan sektor Pertanian dan Perikanan (6,08%) (Grafik III.12).

Risiko kredit korporasi Kaltara terkendali dan berada pada level yang masih aman. Hal tersebut tercermin Pada triwulan II 2026, NPL korporasi hanya sebesar 0,30%. *Non Performing Loan* (NPL) korporasi pada sektor Konstruksi tercatat menurun menjadi 18,04%, dari 19,10% pada periode sebelumnya. Masih tingginya NPL sektor Konstruksi terjadi seiring dengan tingginya eksposur kredit pada proyek konstruksi bernilai besar di Kalimantan Utara, terutama proyek pembangkit listrik dan industri pengolahan, yang saat ini mulai memasuki tahap penyelesaian.

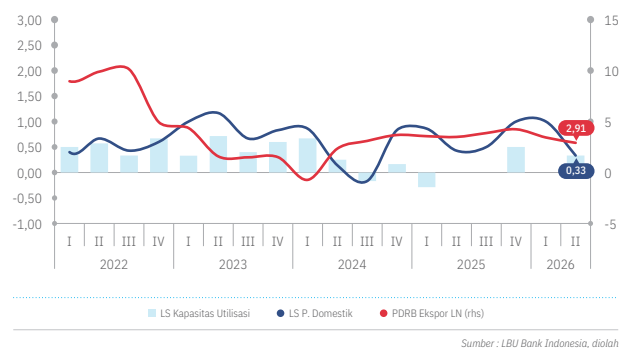
Grafik III.11. Perkembangan Kredit Korporasi Kaltara



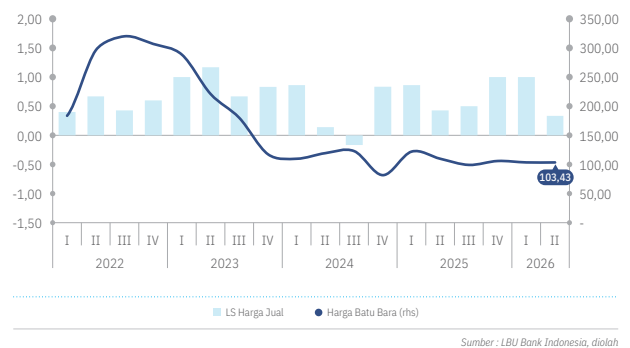
Grafik III.12. Pangsa Kredit Korporasi



Grafik III.13. LS Kap. Utilisasi, LS P. Domestik dan PDRB Ekspor LN (RHS)



Grafik III.14. LS Harga Jual dan Harga Batu bara



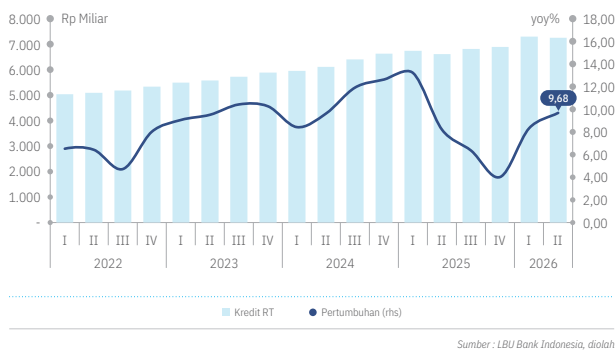
Sejalan dengan kredit kepada korporasi yang menunjukkan peningkatan, kinerja korporasi terpantau membaik. Berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia, secara agregat *Likert Scale* (LS) kapasitas utilisasi dan permintaan domestik relatif stabil di tengah harga batu bara yang fluktuatif (Grafik III.13 dan III.14).

3.4. Pembiayaan Sektor Rumah Tangga

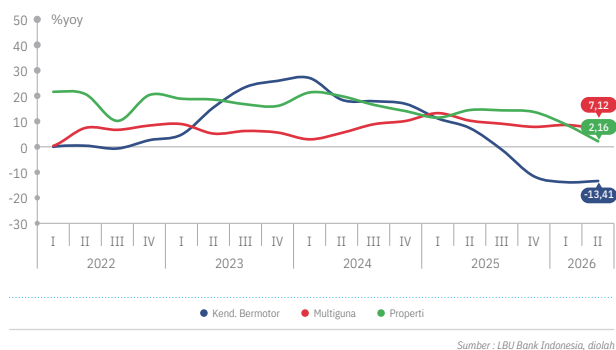
Kredit Konsumsi (KK) kepada rumah tangga tumbuh sebesar 9,68% (yoy), sejalan dengan masih terjaganya konsumsi rumah tangga. Kredit Properti secara nominal masih mencatatkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun laju pertumbuhannya tidak setinggi triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 2,16% (yoy). Selain itu, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) masih mengalami kontraksi sebesar 13,41% (yoy). Di sisi lain, Kredit Multiguna mencatatkan peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 7,12% (yoy), sehingga turut menopang kinerja Kredit Konsumsi rumah tangga. Berdasarkan komposisinya, Kredit Rumah Tangga pada triwulan laporan masih didominasi oleh Kredit Multiguna dengan pangsa sebesar 72,15%, diikuti oleh Kredit Properti sebesar 15,62%, dan KKB sebesar 3,02%.

Meskipun kredit terus tumbuh akseleratif, namun rasio NPL kredit Rumah tangga di Kaltara terjaga di level yang rendah. Rasio NPL kredit Rumah Tangga masih berada pada

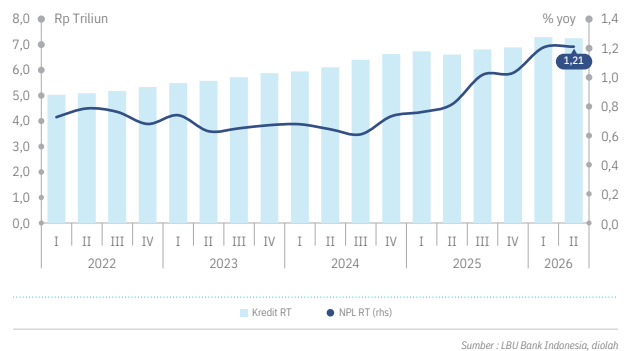
Grafik III.15. Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara



Grafik III.16. Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara Berdasarkan Jenisnya



Grafik III.17. Perkembangan Kredit Rumah Tangga dan NPL RT Kaltara



level yang rendah dan tercatat sebesar 1,21%, sama dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,21% namun masih jauh bawah ambang batas risiko (*threshold*) kredit sebesar 5%. (Grafik III.17). Cukup stabilnya NPL rumah tangga pada level rendah didukung oleh kemampuan bayar RT Kaltara yang masih cukup baik, hal ini terindikasi dari NTP yang masih terjaga pada level tinggi, yakni sebesar 116,44 pada Juni 2026.

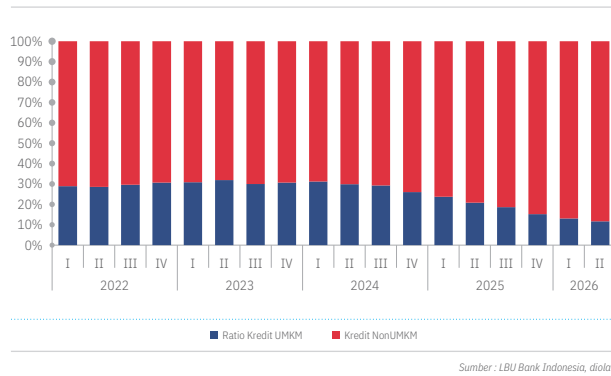
3.5. Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total pembiayaan triwulan II 2026 mengalami perlambatan menjadi sebesar 11,70%, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 13,07% (Grafik III.18).

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan terbatas utamanya dari jenis kredit investasi. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terkontraksi sebesar 1,75% (yoy) (Grafik IV.19), dimana Kredit modal kerja dan kredit investasi terkontraksi sebesar 2,65% (yoy) dan kredit investasi mengalami peningkatan sebesar 0,38% (yoy) (Grafik III.20).

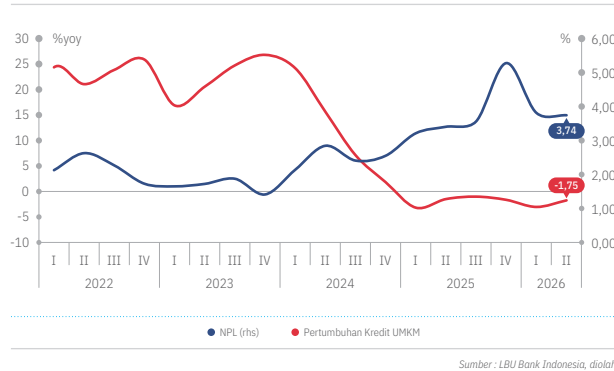
Berdasarkan pangsa jenis penggunaannya, pangsa Kredit UMKM masih didominasi Kredit Modal Kerja yaitu sebesar 69,52% sedangkan investasi sebesar 30,48% (Grafik IV.21). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM masih didominasi oleh modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional. UMKM yang relatif baru beroperasi, khususnya dalam rentang 1–2 tahun, umumnya memanfaatkan pembiayaan untuk pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, biaya distribusi, dan sewa tempat usaha. Sementara itu, kebutuhan investasi masih banyak dipenuhi melalui modal sendiri maupun sumber pembiayaan nonperbankan. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyaluran kredit UMKM terbesar terdapat pada LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) dengan pangsa 50,58%, diikuti oleh LU Pertanian dan LU Perikanan yang secara keseluruhan mencapai 25,04% dari total kredit UMKM (Grafik III.22).

Grafik III.18. Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltara

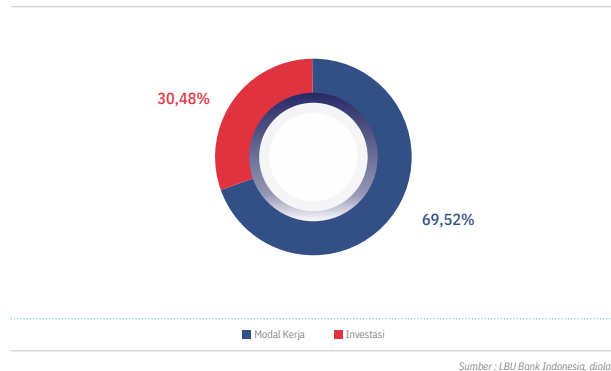


Peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM sejalan dengan membaiknya kinerja kredit UMKM pada LU Pertanian, yang mengalami kontraksi sebesar 3,81% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih dangkal dibandingkan kontraksi 5,14% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, kredit UMKM juga menunjukkan perbaikan pada sejumlah lapangan usaha. Peningkatan terutama terjadi pada LU Industri, yang tumbuh sebesar 22,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 17,59% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, kredit UMKM pada LU Jasa Keuangan juga meningkat dari 24,02% (yoy) menjadi 39,95% (yoy) pada triwulan II 2026.

Grafik III.19. Perkembangan Kredit UMKM Kaltara



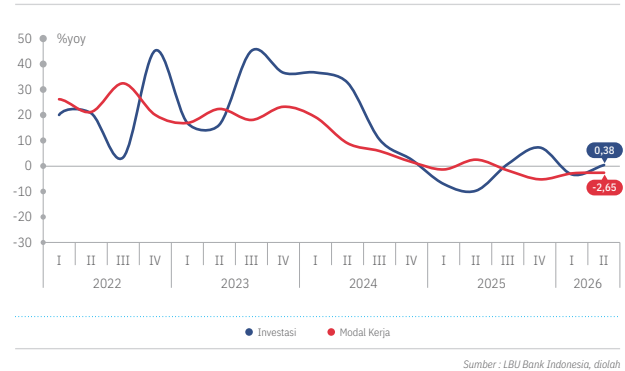
Grafik III.21. Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Kaltara



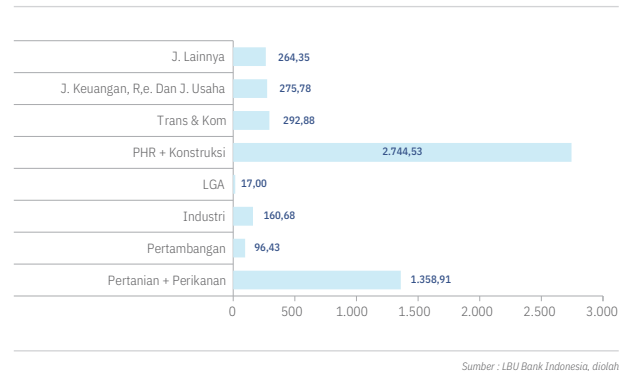
Risiko kredit UMKM pada triwulan II 2026 menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan rasio NPL kredit UMKM menjadi sebesar 3,74%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,81%. Perbaikan tersebut mengindikasikan penurunan risiko kredit UMKM secara agregat, meskipun masih terdapat tekanan pada Kredit Investasi. Rasio NPL Kredit Investasi tercatat meningkat menjadi sebesar 10,54%, dari triwulan sebelumnya sebesar 7,92%. Namun demikian, secara nominal NPL Kredit Investasi UMKM tercatat relatif terkendali, yaitu sebesar Rp35 miliar dari total kredit sebesar Rp1.653 miliar, sehingga kualitas Kredit Investasi UMKM masih relatif terjaga. Sementara itu, NPL Kredit Modal Kerja tercatat sebesar 4,46%. Dengan demikian, meskipun risiko kredit UMKM secara keseluruhan menurun, tekanan pada Kredit Modal Kerja masih perlu menjadi perhatian karena mencatatkan peningkatan rasio NPL pada triwulan laporan.

Bank Indonesia terus mendorong penguatan penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Kebijakan tersebut mengatur pemberian insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas yang ditetapkan

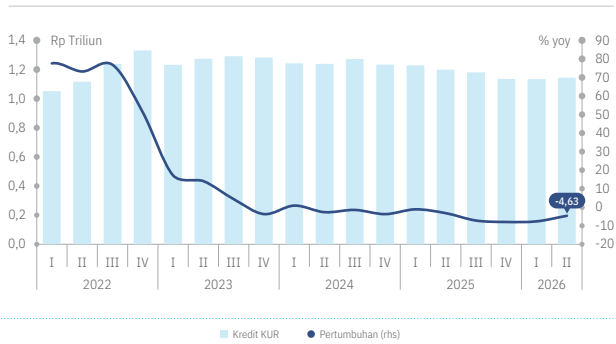
Grafik III.20. Perkembangan Kredit UMKM Kaltara Berdasarkan Jenisnya



Grafik III.22. Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara



Grafik III.23. KUR Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Bank Indonesia, termasuk pembiayaan inklusif yang diukur melalui pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) serta pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro (Umi). Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, khususnya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMI di berbagai daerah.

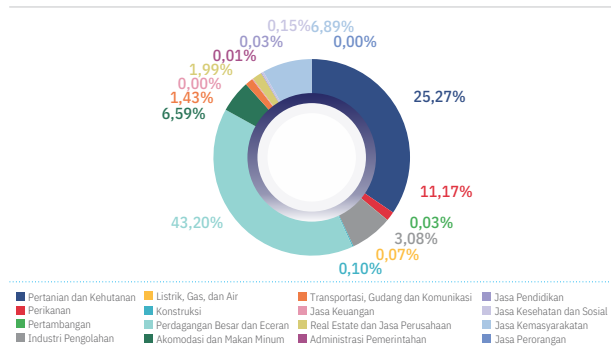
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan berkontraksi sebesar 4,63% (yoy), membaik dibandingkan

triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,64% (yoy). Nominal penyaluran KUR mencapai sebesar Rp1,143 Triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV 2025 sebesar Rp1,134 Triliun. (Grafik III.23).

Berdasarkan komposisi, sektor terbesar penerima KUR adalah perdagangan besar dan eceran dengan pangsa mencapai 15729,41% diikuti oleh sektor pertanian dan kehutanan sebesar 13613,57% dan Jasa Kemasyarakatan sebesar 3222,83% (Grafik III.24). Secara spasial, pangsa penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 39,60%, diikuti oleh Kota Tarakan yang mencapai 29,21%, dan Kabupaten Bulungan mencapai 20,06%.

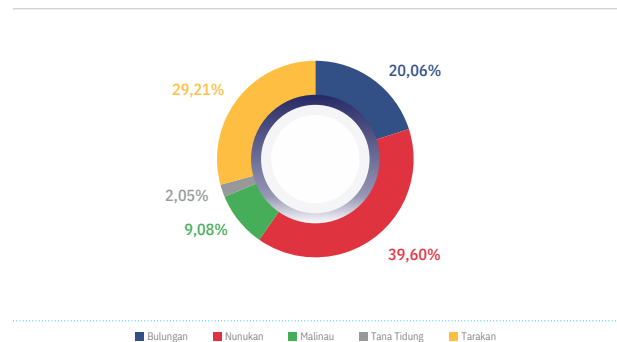
Dalam upaya mendorong UMKM berbasis ekonomi lokal agar menjadi kekuatan baru bagi perekonomian daerah, Bank Indonesia menerapkan strategi pengembangan UMKM secara *end-to-end* melalui percepatan pemanfaatan teknologi digital serta perluasan akses UMKM terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan. Strategi tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada tiga pilar utama Strategi Nasional Pengembangan UMKM, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan.

Grafik III.24. Komposisi KUR Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik III.25. Komposisi KUR Berdasarkan Kab/Kota di Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Dukungan Bank Indonesia dalam Mengakselerasi Terwujudnya Rantai Nilai Halal di Kalimantan Utara

BOKS 3

Prospek ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global terus menunjukkan eskalasi yang positif. Merujuk pada Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, estimasi pengeluaran konsumen muslim global akan menembus angka 3,36 triliun USD pada tahun 2028. Merespons tingginya permintaan tersebut, posisi Indonesia kian menguat dengan menduduki peringkat ketiga dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Indicator 2024/2025. Momentum ini didukung kuat oleh kontribusi sektor Halal Value Chain (HVC) yang diestimasikan menyumbang lebih dari 27% terhadap PDB nasional di tahun 2025. Konteks makro ini menghadirkan momentum strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai katalis pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Halal Value Chain (HVC) merupakan pilar strategis pengembangan ekonomi syariah yang mengintegrasikan mata rantai industri halal, dari sektor hulu, pengolahan, hingga distribusi ke konsumen, dengan berpedoman pada prinsip syariah dan standar kualitas (*thayyib*). Bagi UMKM, penerapan HVC menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses sertifikasi halal, skala produksi kecil, dan minimnya konektivitas dengan rantai pasok yang lebih besar. Oleh karena itu, integrasi UMKM ke dalam ekosistem HVC memerlukan pendampingan, akses pembiayaan syariah, serta penguatan kemitraan dengan pelaku usaha menengah-besar sebagai *oftaker*. Melalui pendekatan ini, UMKM dapat naik kelas menjadi bagian

dari rantai nilai yang terstandarisasi, sehingga bertransformasi dari pelaku usaha pemula menjadi motor penggerak sektor riil yang produktif dan berdaya saing.

Implementasi HVC di daerah menerapkan pendekatan *multi-stakeholder* yang melibatkan pemerintah daerah, otoritas sertifikasi halal (BPJPH/MUI-LPPOM), lembaga keuangan syariah, pelaku usaha menengah-besar, pelaku UMKM, termasuk Bank Indonesia sebagai akseleratornya. Prosesnya mencakup pemetaan produk halal unggulan, pendampingan sertifikasi (termasuk skema *self-declare*), penguatan kapasitas produksi, hingga fasilitasi pembiayaan syariah. Selanjutnya, UMKM dihubungkan dengan *oftaker* melalui kurasi produk dan *business matching*, sehingga terhubung dengan HVC yang lebih luas.

Salah satu hambatan utama implementasi HVC terletak pada sisi hulu, khususnya ketersediaan bahan baku halal seperti daging, yang masih terkendala oleh minimnya rumah potong hewan (RPH) yang tersertifikasi halal di daerah. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha, terutama UMKM sektor pangan, kesulitan memperoleh pasokan bahan baku yang terjamin kehalalannya secara konsisten, sehingga berisiko mengganggu integritas rantai nilai halal secara keseluruhan. Untuk mewujudkan HVC yang utuh, diperlukan intervensi menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga dapat terjamin kehalalan produk yang dihasilkan oleh UMKM.



Sosialisasi SJPH bagi UMKM Kaltara Tahun 2026

BOKS 3



Pelatihan dan Sertifikasi BNSP bagi JULEHA

Dalam pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia berperan sebagai AIR, yaitu Akselerator, Inisiator, dan Regulator. Termasuk dalam implementasi HVC di daerah, Bank Indonesia turut serta bersinergi dengan pemerintah daerah melakukan intervensi dari hulu ke hilir, terutama dalam mendukung pelaku UMKM menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam seluruh produk yang dihasilkannya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPwBI Kaltara) telah melaksanakan serangkaian program penguatan HVC di daerah. Pada awal tahun, telah dilaksanakan sosialisasi SJPH yang diikuti oleh lebih dari 100 UMKM di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan materi mengenai pentingnya penerapan SJPH dan bagaimana proses pengurusan sertifikasi halal yang disampaikan dari BPJPH, LPPOM MUI, dan DPMPTSP terkait perizinan usaha.

Dalam kaitannya dengan penerapan HVC di sisi hulu, KPwBI Kaltara juga telah melakukan intervensi dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon dari kurangnya ketersediaan RPH yang tersertifikasi halal di Kalimantan Utara. Salah satu penyebabnya adalah jumlah JULEHA tersertifikasi yang masih minim sementara hal hal tersebut menjadi syarat mutlak bagi RPH yang ingin mengajukan sertifikasi halal. Pada bulan April 2026, telah dilaksanakan pelatihan bagi

14 (empat belas) orang JULEHA yang dilanjutkan dengan sertifikasi BNSP yang diharapkan dapat membantu akselerasi HVC terutama untuk menyelesaikan hambatan dari sisi hulu, penyediaan daging bersertifikat halal.

Sebagai Puncak Program Pengembangan Ekonomi Syariah, KPwBI Kaltara menyelenggarakan Kalimantan Utara Sharia Festival (KaShaFa) pada tanggal 24 s.d. 26 April 2026 di Kawasan Islamic Center Kota Tarakan. KaShaFa dibuka secara langsung oleh Wakil Walikota Tarakan dan Kepala Perwakilan BI Kaltara serta dihadiri oleh Forkopimda, OJK Kaltimara, OPD, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, asosiasi, dan media. Rangkaian kegiatan KaShaFa 2026 meliputi bazar yang diikuti 54 UMKM *halal food* dan *modest fashion*, *Lomba Modest Fashion*, *Lomba Tari Kreasi Islami*, penghimpunan wakaf produktif, Seminar UMKM Ekonomi Syariah, dan *Talkshow* Pembiayaan Syariah untuk meningkatkan literasi Ekonomi Syariah di Kalimantan Utara.

Pelaksanaan KaShaFa 2026 berhasil mencatatkan sejumlah capaian signifikan, antara lain total omzet UMKM halal dan dukungan kegiatan yang meningkat signifikan hingga mencapai Rp4,16 miliar, serta tingginya adopsi transaksi digital dengan lebih dari 80% transaksi menggunakan QRIS. Selain itu, penguatan ekosistem ekonomi syariah tercermin dari bertambahnya 182 UMKM yang tersertifikasi halal,

BOKS 3



Kalimantan Utara Sharia Festival (KaShaFa) Tahun 2026

peningkatan literasi ekonomi syariah yang telah mencapai lebih dari 75%, serta penyaluran pembiayaan syariah sebesar Rp5,73 miliar atau 191% dari target tahunan.

Rangkaian kegiatan ini juga turut memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui *business matching* UMKM, pengembangan wakaf produktif, serta dukungan stabilisasi harga melalui program pasar murah, sehingga menegaskan peran KaShaFa sebagai katalis dalam mendorong ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdayasaing di Kalimantan Utara.



Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai di Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan II 2026 menunjukkan perkembangan positif seiring dengan berlanjutnya digitalisasi transaksi ekonomi dan keuangan. Transaksi SKNBI pada Triwulan II 2026 tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume, masing-masing sebesar 0,78% dan 2,43% (yoy), sementara transaksi BI-RTGS juga mencatat pertumbuhan positif dengan nominal meningkat 12,41% dan volume 28,63% (yoy), mencerminkan tetap kuatnya aktivitas transaksi bernilai besar. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, aliran uang kartal mencatat net outflow sebesar Rp307,65 miliar, seiring *outflow* yang lebih besar dibandingkan *inflow*. Distribusi Uang Layak Edar (ULE) tetap didominasi oleh pecahan besar, sementara pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) meningkat menjadi Rp25,66 miliar dengan rasio pemusnahan terhadap *inflow* sebesar 8,84%. Sejalan dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, jumlah pengguna QRIS meningkat menjadi 147.818 pengguna dan jumlah *merchant* mencapai 116.472 *merchant*, dengan dominasi pada segmen Usaha Mikro serta penyebaran yang semakin luas di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Penggunaan APMK juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan volume transaksi mencapai 292,52 ribu transaksi atau tumbuh 5,86% (yoy). Selain itu, kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tetap terjaga, tercermin dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara yang masih berada pada tahap Digital.

4.1. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai

Volume transaksi SKNBI di Kalimantan Utara pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 17.588 transaksi, meningkat 2,43% (yoy) dibandingkan Triwulan II 2025. Secara triwulanan, volume transaksi juga meningkat sebesar 24,70% (qtq) dari 14.104 transaksi pada Triwulan I 2026 menjadi 17.588 transaksi pada Triwulan II 2026, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas transaksi melalui SKNBI (Grafik IV.2).

Sementara itu, nominal transaksi SKNBI pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp908,52 miliar, meningkat sebesar 0,78% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, nominal transaksi juga meningkat sebesar 11,99% (qtq) dari Rp811,24 miliar pada Triwulan I 2026 menjadi Rp908,52 miliar. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas transaksi melalui SKNBI pada Triwulan II 2026, baik dari sisi volume maupun nominal transaksi.

Pada Triwulan II 2026, transaksi BI-RTGS di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan positif. Nominal transaksi tercatat sebesar Rp2,71 triliun, tumbuh 12,41% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, volume transaksi mencapai 1.806 transaksi, meningkat signifikan sebesar 28,63% (yoy). Secara triwulanan, volume transaksi juga meningkat sebesar

26,63% (qtq) dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebanyak 2.033 transaksi. Perkembangan tersebut menunjukkan aktivitas transaksi bernilai besar melalui BI-RTGS tetap tumbuh, sejalan dengan kebutuhan penyelesaian transaksi secara *real time* untuk transaksi bernilai besar di Kalimantan Utara.

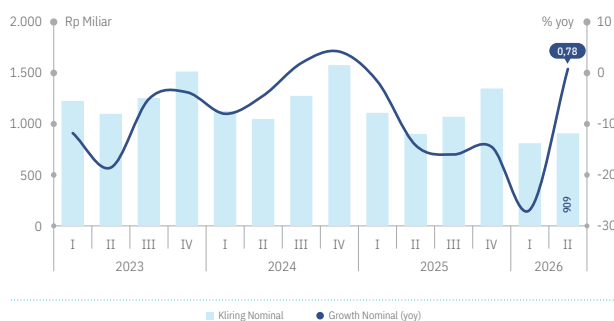
4.2. Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran Uang Masuk/Keluar (*Outflow/Inflow*)

Transaksi perkasian Bank Indonesia pada Triwulan II 2026 tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp307,65 miliar, meningkat dibandingkan *net outflow* pada Triwulan I 2026 sebesar Rp212,99 miliar. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh *outflow* sebesar Rp684,06 miliar yang lebih besar dibandingkan *inflow* sebesar Rp376,41 miliar. Perkembangan *net outflow* menunjukkan bahwa kebutuhan uang kartal masyarakat di Kalimantan Utara masih cukup tinggi pada Triwulan II 2026.

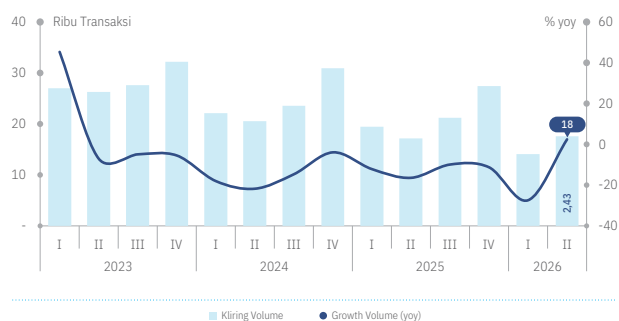
Uang Pecahan Besar (UPB), yaitu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, tetap menjadi denominasi yang paling dominan dalam aliran uang kartal di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan II 2026, baik dari sisi *outflow* maupun *inflow*.

Grafik IV.1. Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltara



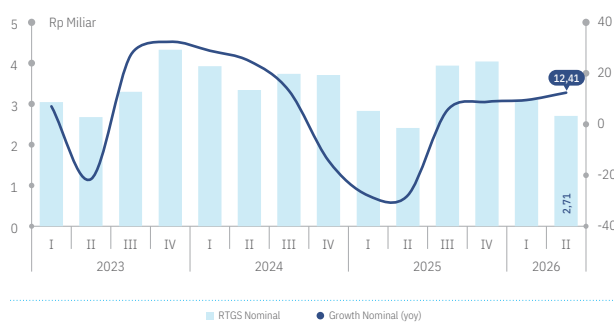
Sumber : Bank Indonesia

Grafik IV.2. Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltara



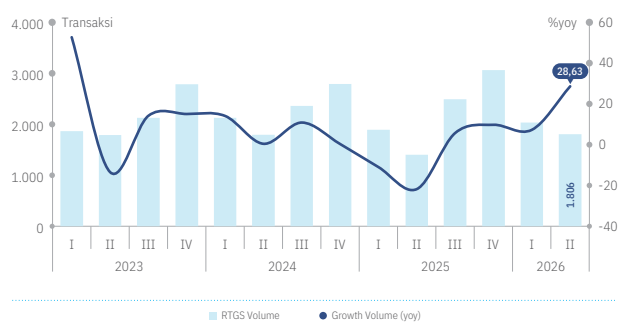
Sumber : Bank Indonesia

Grafik IV.3. Perkembangan Nominal BI-RTGS Kaltara



Sumber : Bank Indonesia

Grafik IV.4. Perkembangan Volume BI-RTGS Kaltara



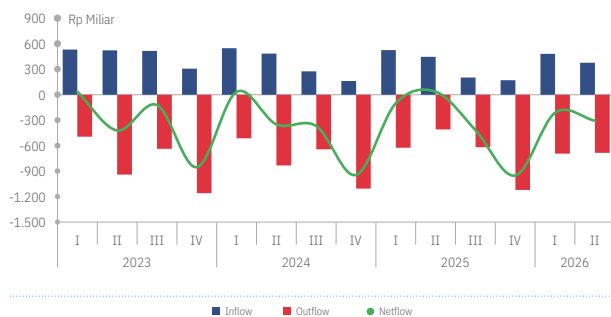
Sumber : Bank Indonesia

Dari sisi *outflow* uang kertas, pecahan Rp100.000 menjadi pecahan dengan distribusi terbesar, mencapai Rp307,69 miliar atau 64,95% dari total *outflow*. Pecahan Rp50.000 juga mencatat kontribusi signifikan sebesar Rp162,44 miliar atau 34,29%. Sementara itu, pecahan Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 masing-masing memiliki kontribusi yang relatif kecil. Dengan demikian, distribusi *outflow* uang kartal pada Triwulan II 2026 masih didominasi oleh pecahan besar.

Dari sisi *inflow*, pecahan Rp100.000 juga menjadi denominasi terbesar dengan nilai Rp156,58 miliar atau 53,94%, diikuti pecahan Rp50.000 sebesar Rp123,39 miliar atau 42,50%. Adapun pecahan lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total *inflow*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 masih mendominasi peredaran uang kartal di Kalimantan Utara, baik pada saat uang keluar maupun kembali masuk ke Bank Indonesia (Grafik IV.8).

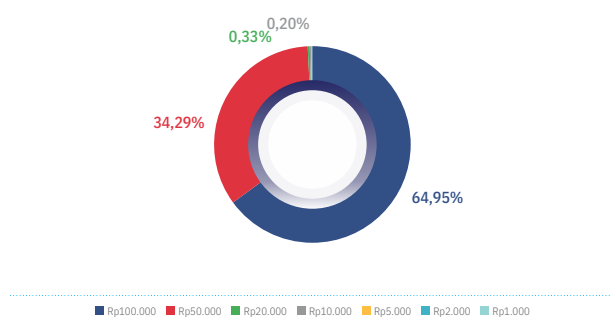
Khusus untuk uang logam (UL), pecahan Rp1.000 tetap mendominasi arus *outflow* pada Triwulan II 2026, dengan nilai sebesar Rp143,8 juta. Selanjutnya, *outflow* pecahan Rp500 tercatat sebesar Rp66,5 juta, diikuti pecahan Rp200 sebesar Rp29,6 juta dan Rp100 sebesar Rp8,4 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus *outflow* uang logam di Kalimantan Utara masih didominasi oleh pecahan dengan nominal terbesar (Grafik IV.7).

Grafik IV.5. Perkembangan Aliran Uang Keluar/Masuk



Sumber Bank Indonesia

Grafik IV.6. Denominasi *Outflow* Uang Kartal Kaltara Triwulan II 2026



Sumber Bank Indonesia

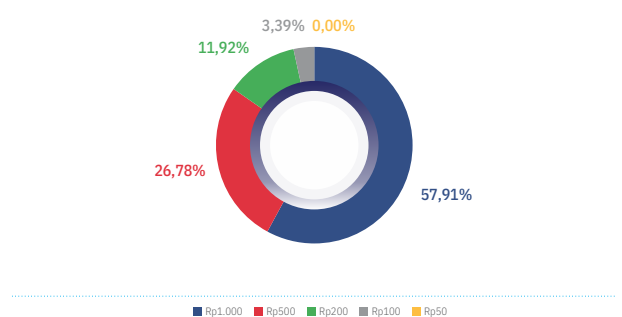
Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)

Dalam rangka mengendalikan peredaran uang kartal serta memastikan uang yang beredar di masyarakat berada dalam kondisi baik dan cukup, KPwBI Provinsi Kaltara terus melakukan penyediaan Uang Layak Edar (ULE) melalui perbankan di seluruh Provinsi Kalimantan utara. Selain itu, KPwBI Kaltara juga melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari masyarakat. Beberapa kegiatan pendukung Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar di antaranya melalui kegiatan Kas Keliling dan Kas Titipan yang tersebar hampir di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Kas Keliling

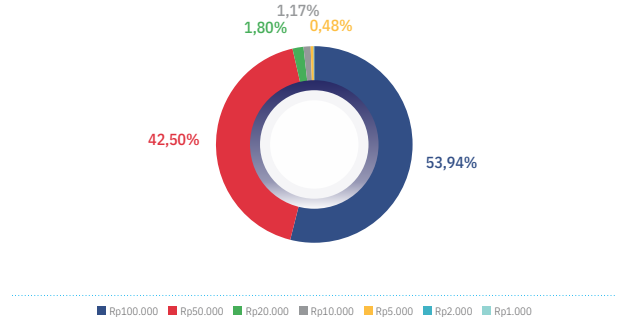
Salah satu layanan kas luar kantor yang dilakukan oleh KPwBI Kaltara adalah Kas Keliling yaitu kegiatan penukaran uang oleh unit kerja operasional kas kepada masyarakat, bank, atau pihak lain dengan menggunakan sarana angkutan. Kas keliling dibagi menjadi 2 (dua) layanan yaitu kas keliling dalam kota dan kas keliling luar kota. Kas keliling dalam kota merupakan kegiatan layanan kas luar kantor untuk melayani penukaran kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi oleh bank umum.

Grafik IV.7. Denominasi *Outflow* Uang Logam Kaltara Triwulan II 2026



Sumber Bank Indonesia

Grafik IV.8. Denominasi *Inflow* Uang Kartal Kaltara Triwulan II 2026



Sumber Bank Indonesia

Kas Keliling Dalam Kota (KKDK)

Kegiatan Kas Keliling Dalam Kota (KKDK) di Kota Tarakan sepanjang triwulan II 2026 di sebaran titik lokasi empat wilayah kecamatan utama. Wilayah kegiatan KKDK mencakup Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Timur, Tarakan Tengah, dan Tarakan Utara.

Kas Keliling Luar Kota (KKLK)

Layanan kas keliling turut juga dilakukan di luar kota dengan tujuan menjangkau masyarakat Provinsi Kaltara yang berada di luar wilayah Kota Tarakan. Wilayah kegiatan KKLK sepanjang triwulan II 2026 mencakup wilayah Mansalong dan Seimenggaris.

Kas Titipan

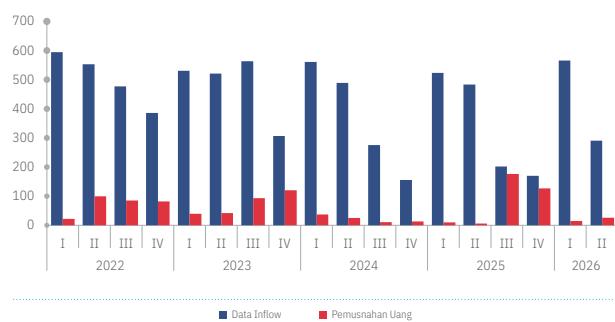
KPwBI Provinsi Kaltara memiliki 3 (tiga) Kas Titipan yang berlokasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Pengelolaan kas titipan (Kastip) tersebut dilakukan oleh kantor cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara (BPD Kaltimtaru). Untuk Kastip di Tanjung Selor, BPD Kaltimtaru cabang Tanjung Selor bekerjasama dengan 6 (enam) bank peserta lainnya (Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Danamon) mengedarkan Uang Layak Edar (ULE) hingga daerah terpencil. Sementara itu, untuk Kastip di Kab. Malinau, BPD Kaltimtaru cabang Malinau mengelola kas titipan Bank Indonesia bersama dengan 3 (tiga) bank peserta yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Untuk Kastip di Kab. Nunukan, BPD Kaltimtaru cabang Nunukan bekerja sama dengan 4 (empat) bank peserta mengelola kas titipan Bank Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

Selama Triwulan II 2026, KPwBI Provinsi Kaltara telah melakukan kegiatan dropping ke Kas Titipan Bank Indonesia pada tiga wilayah, yaitu Tanjung Selor, Malinau, dan Nunukan, dengan total nominal sebesar Rp177,63 miliar, menurun sebesar 8,17% dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar Rp193,42 miliar.

Penarikan Uang Tidak Layak Edar dan Pemusnahan Uang Rupiah

Selain memenuhi kebutuhan penukaran Uang Layak Edar (ULE), uang yang ditukarkan oleh masyarakat di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mencakup Uang Tidak Layak Edar (UTLE), meliputi uang rusak, lusuh, cacat, serta uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Dalam rangka menjaga kualitas uang beredar (*clean money policy*), KPwBI Provinsi Kaltara secara rutin melakukan pemusnahan UTLE yang diterima dari perbankan maupun masyarakat umum melalui layanan penukaran dan kas keliling.

Grafik IV.9. Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)



Sumber Bank Indonesia

Pada Triwulan II 2026, nilai UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp25,66 miliar, meningkat sebesar 77% (qtq) dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar Rp14,52 miliar. Peningkatan pemusnahan tersebut terjadi di tengah penurunan inflow UTLE, dari Rp565,36 miliar pada Triwulan I 2026 menjadi Rp290,31 miliar pada Triwulan II 2026 atau menurun sebesar 49% (qtq). Sejalan dengan perkembangan tersebut, rasio pemusnahan UTLE terhadap *inflow* meningkat dari 2,57% pada Triwulan I 2026 menjadi 8,84% pada Triwulan II 2026.

Peningkatan rasio pemusnahan menunjukkan bahwa proporsi UTLE yang diproses untuk dimusnahkan terhadap uang yang masuk mengalami peningkatan. Melalui proses penarikan, sortir, dan pemusnahan UTLE secara berkelanjutan, Bank Indonesia terus menjaga kualitas uang Rupiah yang beredar agar masyarakat memperoleh uang yang layak edar serta mendukung kelancaran transaksi tunai.

Temuan Uang Palsu (UPAL)

Selama periode triwulan II 2026, terdapat 44 lembar temuan Uang Palsu (UPAL) pada pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 sebanyak . Upaya penanggulangan temuan Uang Palsu terus dilakukan melalui peningkatan edukasi CBP Rupiah kepada masyarakat serta penguatan kerja sama dengan perbankan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal), perangkat masyarakat di daerah, dan stakeholders terkait lainnya.

Cinta, Bangga, Paham Rupiah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap rupiah, KPwBI Provinsi Kaltara senantiasa melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari lembaga pendidikan, komunitas, perangkat kecamatan/kelurahan/desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dengan slogan Cinta, Bangga, Paham Rupiah. KPwBI Provinsi Kaltara telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan edukasi mengenai CBP Rupiah kepada berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari sektor

pendidikan, sektor masyarakat, hingga sektor komunitas strategis. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan pengetahuan mengenai CBP Rupiah, mulai dari pengenalan ciri keaslian Rupiah hingga mekanisme penukaran uang rusak dapat semakin dipahami oleh masyarakat.

4.3. Perkembangan QRIS

Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai salah satu kanal pembayaran non tunai di wilayah Kalimantan Utara terus menunjukkan peningkatan seiring dengan perluasan ekosistem dan edukasi transaksi digital. Hingga triwulan II 2026, jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Utara mencapai 147.818 pengguna, meningkat dari 137.513 pengguna pada triwulan I 2026 atau bertambah sebanyak 10.305 pengguna atau 7,49% (qtq). Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal untuk mendukung berbagai aktivitas transaksi sehari-hari.

Dalam rangka memperluas penggunaan QRIS secara merata, KPwBI Kaltara melakukan upaya perluasan edukasi penggunaan QRIS ke berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai program maupun kolaborasi kegiatan dengan *stakeholders* lainnya.

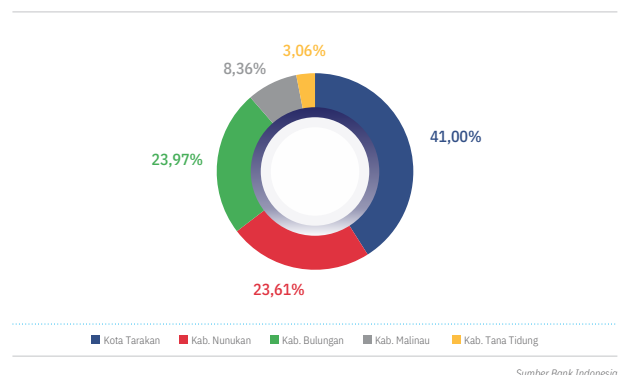
Peningkatan jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Utara diikuti oleh bertambahnya jumlah *merchant* QRIS yang tercermin pada perkembangan *National Merchant Repository* (NMR). Hingga triwulan II 2026, jumlah *merchant* QRIS di Kalimantan Utara mencapai 125.450 *merchant*, dengan penambahan 13.846 *merchant* sepanjang Januari–Juni 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akseptasi QRIS masih terus berlangsung di berbagai sektor usaha dan wilayah di Kalimantan Utara.

Distribusi *merchant* QRIS didominasi oleh Kota Tarakan dengan 51.437 *merchant* atau 41,00% dari total *merchant*. Kabupaten Bulungan dan Nunukan menyusul dengan pangsa masing-masing 23,97% dan 23,61%, mencerminkan

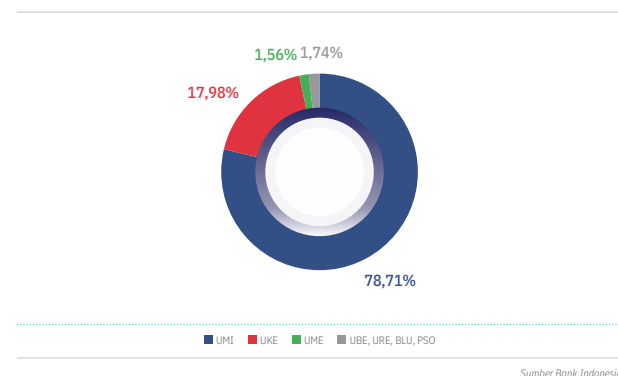
konsentrasi aktivitas ekonomi dan perdagangan di ketiga wilayah tersebut. Sementara itu, Kabupaten Malinau dan Tana Tidung berkontribusi sebesar 8,36% dan 3,06%, menunjukkan bahwa akseptasi QRIS juga terus berkembang hingga wilayah yang lebih terpencil.

Berdasarkan skala usaha, *merchant* kategori Usaha Mikro (UMI) masih mendominasi dengan pangsa 78,71%, diikuti Usaha Kecil (UKE) sebesar 17,98%, Usaha Menengah (UME) sebesar 1,56%, serta kategori lainnya (UBE, URE, BLU, dan PSO) sebesar 1,74%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa QRIS semakin berperan sebagai instrumen utama digitalisasi transaksi pada segmen usaha mikro dan kecil di Kalimantan Utara.

Grafik IV.10. Kontribusi *Merchant* QRIS berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara



Grafik IV.11. Kontribusi *Merchant* QRIS berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Utara



Tabel IV.1. Perkembangan NMR Provinsi Kaltara

Wilayah	NMR Selama 2023 (Jan-Des 2023)	NMR Selama 2024 (Jan-Des 2024)	NMR Kumulatif 2025 (Jan-Des 2025)	NMR Kumulatif (Jan-Jun 2026)	NMR Kumulatif 2019-2026*	Share Prov (Per 2026*)
Kota Tarakan	8.668	7.666	1.423	7.589	51.437	41,00%
Kab. Nunukan	6.289	3.634	5.614	1.597	29.614	23,61%
Kab. Bulungan	6.465	4.362	7.338	2.934	30.070	23,97%
Kab. Malinau	2.585	1.079	2.324	953	10.485	8,36%
Kab. Tana Tidung	500	512	758	773	3.844	3,06%
Total Prov. Kaltara	24.507	17.253	17.457	13.846	116.472	100%

Sumber : Bank Indonesia

4.4. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Utara

Perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mendorong penggunaan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), Presiden mewajibkan Pemda untuk membentuk TP2DD. Tim ini merupakan forum koordinasi untuk mengakselerasi perluasan ETPD, baik di sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Berdasarkan data Indeks ETPD Semester II Tahun 2025, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara kembali menunjukkan kinerja yang solid dalam percepatan transformasi digital (Tabel IV.2). Seluruh pemerintah daerah mencatat skor pada rentang 93,3% hingga 97,8%, dan seluruhnya telah berada pada tahap Digital. Capaian ini mencerminkan komitmen konsisten dari Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara dalam memperluas dan meningkatkan implementasi ETPD di daerah, sekaligus kesinambungan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel IV.2. Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Daerah	SM-I 2025		SM-II 2025	
	Skor	Tahap	Skor	Tahap
Provinsi Kalimantan Utara	97,80%	Digital	97,80%	Digital
Kota Tarakan	95,80%	Digital	95,50%	Digital
Kabupaten Bulungan	95,00%	Digital	93,50%	Digital
Kabupaten Malinau	93,30%	Digital	94,40%	Digital
Kabupaten Nunukan	83,60%	Digital	94,30%	Digital
Kabupaten Tana Tidung	94,80%	Digital	93,30%	Digital

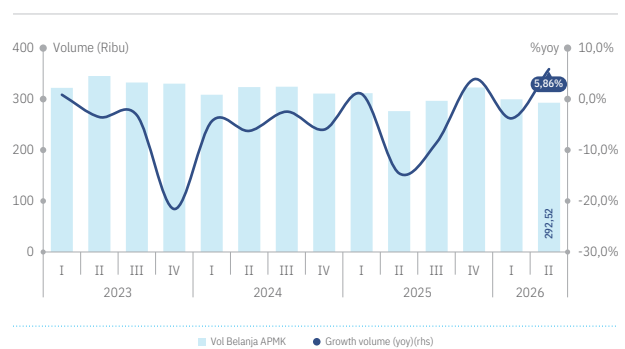
Sumber: Bank Indonesia

4.5. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Kalimantan Utara pada Triwulan II 2026 menunjukkan perkembangan positif. Volume transaksi APMK tercatat sebesar 292,52 ribu transaksi, meningkat sebesar 5,86% (yoy) dibandingkan Triwulan II 2025 (Grafik IV.13).

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pembayaran berbasis kartu masih tumbuh di tengah semakin berkembangnya alternatif pembayaran digital lain, seperti *mobile banking*, dompet elektronik, dan QRIS. Perkembangan ini mencerminkan semakin beragamnya preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran digital untuk memenuhi kebutuhan transaksi ritel.

Grafik IV.12. Perkembangan APMK



Sumber: Bank Indonesia

High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I Kabupaten Bulungan

BOKS 4



Gambar Boks IV. High Level Meeting TP2DD Kabupaten Bulungan Semester I Tahun 2026

Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui pelaksanaan HLM TP2DD Kabupaten Bulungan pada Senin, 13 April 2026 di Ruang Tengayun, Kantor Bupati Bulungan. Komitmen digitalisasi tersebut merupakan langkah Pemda Bulungan dan Bank Indonesia untuk terus mendorong capaian yang lebih tinggi, melanjutkan berbagai prestasi Kabupaten Bulungan yang berhasil menorehkan prestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Pada tahun 2025, TP2DD Kabupaten Bulungan berhasil meraih peringkat ketiga nasional pada program unggulan Sistem Informasi Daerah.

Beberapa program yang didorong untuk menjadi program unggulan Kabupaten Bulungan antara lain Bimbingan Teknis dan Launching Agen Bulungan Akuntabilitas Non-Tunai (BULAN), serta Bantuan Akses Pembayaran Digital Non-Tunai Pajak dan Retribusi Daerah (Bangkit). Kedua program tersebut diharapkan semakin memperkuat ekosistem digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kemudahan dan akuntabilitas dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Sekretaris Daerah Bulungan,

Bapak Risdianto, S.Pi., M.Si., menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk terus memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah meskipun masih terdapat sejumlah tantangan pada aspek infrastruktur dan literasi digital masyarakat.

Menghadapi tantangan literasi digital masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan transaksi non-tunai melalui berbagai kanal yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan lomba konten kreatif literasi digital yang mendorong masyarakat untuk mengenal dan memahami manfaat transaksi digital. Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengumumkan para pemenang lomba sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya meningkatkan literasi digital masyarakat Kabupaten Bulungan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem digitalisasi transaksi secara menyeluruh, yang perlu diiringi dengan evaluasi dan koordinasi lintas pihak secara berkelanjutan.

BOKS 4



Gambar Boks IV.1.2. Foto Bersama Pemenang Lomba Konten Kreatif Digital saat HLM TP2DD Semester I Kabupaten Bulungan

Pelaksanaan HLM TP2DD Kabupaten Bulungan Semester I menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan mengevaluasi berbagai aspek dalam ekosistem digitalisasi tersebut, dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. HLM menjadi penting untuk dilaksanakan secara berkala di seluruh daerah sebagai forum evaluasi, koordinasi, dan penguatan komitmen dalam memenuhi indikator ETPD, sehingga dapat mendukung pencapaian nilai IETPD yang optimal. Ke depan, sinergi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan capaian TP2DD Kabupaten Bulungan, memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

Ekspedisi Rupiah Kalimantan 2026

BOKS 5

Gambar 1. Foto Bersama *Kick-Off* Ekspedisi Rupiah Kalimantan

Sungai di Kalimantan memiliki kekhasan geografis yang tidak sekadar berfungsi sebagai jalur transportasi, melainkan berperan vital sebagai urat nadi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, Bank Indonesia memiliki mandat krusial untuk memastikan ketersediaan serta kualitas uang Rupiah hingga ke wilayah perairan dan pelosok sungai. Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan menggagas program Ekspedisi Rupiah Kalimantan (ERK). Program ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27–30 April 2026 oleh seluruh KPwBI di wilayah Kalimantan, yang bersinergi erat dengan jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut se-Kalimantan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan distribusi Uang Layak Edar (ULE) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah perairan guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.

Pelaksanaan *kick-off* ERK untuk Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan pada tanggal 27 April 2026 berlokasi di Markas Satuan Kapal Patroli (SATROL) Kodaeral XIII. Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis, meliputi Wakil Komandan Kodaeral XIII, Kepala Perwakilan

KPwBI Provinsi Kalimantan Utara, pimpinan perbankan BPD Kaltimara, serta perwakilan Dinas Pendidikan Cabang Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan *kick-off* ini dilakukan secara estafet (*relay*) dari acara seremonial utama di KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri langsung oleh Komandan Kodaeral XIII. Pembukaan kegiatan ditandai secara simbolis melalui penyematan topi ERK kepada Tim *Onboard*, yang merefleksikan soliditas koordinasi kelembagaan. Implementasi kegiatan ERK di Kalimantan Utara didukung penuh oleh Kodaeral XIII melalui pengerahan Kapal PATKAMLA NAYAKA-07. Ekspedisi berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 27 hingga 29 April 2026, dengan menyasar masyarakat susur Sungai Kayan Tanjung Palas di Desa Gunung Putih dan Desa Salimbatu.

Di samping penyediaan ULE untuk masyarakat, program ERK juga dilengkapi dengan perluasan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah serta program "BI Mengajar". Selain dari sisi uang tunai, edukasi ini turut mencakup edukasi non-tunai dengan perluasan sistem pembayaran digital QRIS, dan juga PeKA (Peduli, Kenali, Adukan) untuk perlindungan konsumen sebagai mitigasi risiko untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital. Selain edukasi, terdapat juga Layanan Kesehatan

BOKS 5



Gambar Boks IV.1.2. Foto saat Kegiatan Layanan Penukaran, Edukasi, dan Layanan Kesehatan

Masyarakat Sebagai bentuk nyata sinergi sosial, dari Kodaeral XIII bersama Puskesmas Desa Salimbatu menggelar penyuluhan kesehatan mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Kegiatan ini dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan kelompok lansia yang mencakup pengecekan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, serta penyediaan obat-obatan secara cuma-cuma bagi warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Program Ekspedisi Rupiah Kalimantan di wilayah Kalimantan Utara telah terbukti mampu memberikan dampak yang holistik bagi masyarakat pesisir dan susur sungai. Melalui distribusi uang Rupiah yang terkelola secara optimal serta perluasan literasi keuangan dan layanan sosial, Bank Indonesia memastikan bahwa kedaulatan ekonomi serta kesejahteraan sosial dapat terdistribusi secara merata, menjangkau seluruh pelosok negeri.





Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara hingga triwulan II 2026 secara umum tetap terjaga. TPT pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,90%, sementara optimisme masyarakat terhadap pasar kerja semakin kuat, tercermin dari indeks perkiraan ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang sebesar 127,14, meningkat 2,10% (yoy). Kualitas hidup masyarakat juga terus membaik, tercermin dari IPM 2025 sebesar 74,04, sementara ketimpangan pendapatan tetap berada dalam kategori rendah dengan *Gini Ratio* Maret 2026 sebesar 0,253 dan porsi pengeluaran 40% terbawah meningkat menjadi 25,00%. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara tetap stabil, didukung oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia, distribusi pengeluaran yang semakin merata, serta optimisme terhadap prospek pasar kerja.

5.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, persepsi responden di Kalimantan Utara terhadap kondisi pasar kerja pada Triwulan II 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks ketersediaan lapangan kerja enam bulan yang lalu tercatat sebesar 108,20, meningkat 10,42% (yoy) dibandingkan sebesar 97,99 pada Triwulan II 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan sebelumnya mengalami perbaikan (Grafik V.1).

Sementara itu, ekspektasi masyarakat terhadap kondisi pasar kerja ke depan juga tetap berada pada level optimis. Indeks perkiraan ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan mendatang tercatat sebesar 127,14, meningkat 2,10% (yoy) dibandingkan sebesar 124,53 pada Triwulan II 2025. Indeks yang tetap berada di atas level 100 menunjukkan bahwa masyarakat secara umum masih optimis terhadap prospek ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan ke depan, meskipun peningkatan ekspektasi relatif terbatas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik V.1).

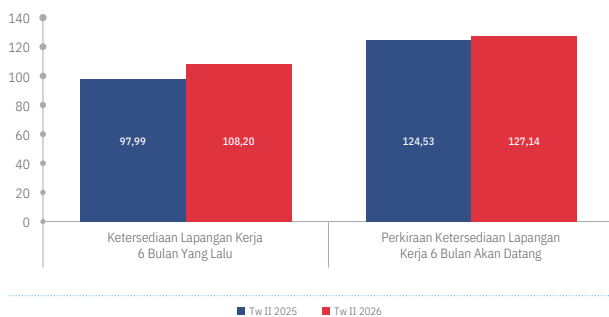
Berdasarkan data BPS Mei 2026, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan perkembangan yang relatif melemah dibandingkan Agustus 2025. Jumlah

angkatan kerja tercatat menurun sebesar 5.069 orang atau 1,28%, dari 395.803 orang pada Agustus 2025 menjadi 390.734 orang pada Mei 2026. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 5.081 orang atau 1,34%, dari 380.572 orang menjadi 375.491 orang.

Di sisi lain, jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 12 orang atau 0,08%, dari 15.231 orang pada Agustus 2025 menjadi 15.243 orang pada Mei 2026. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat sebesar 0,05 poin persentase, dari 3,85% menjadi 3,90%. Meskipun mengalami peningkatan, TPT masih berada pada level yang relatif rendah, sehingga kondisi pasar tenaga kerja di Kalimantan Utara masih tergolong cukup terjaga.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun sebesar 1,67 poin persentase, dari 69,55% pada Agustus 2025 menjadi 67,88% pada Mei 2026. Penurunan TPAK tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebesar 11.530 orang atau 6,65%, dari 173.323 orang menjadi 184.853 orang. Di sisi lain, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat sebesar 6.461 orang atau 1,14%, dari 569.126 orang menjadi 575.587 orang (Tabel V.1).

Grafik V.1. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik V.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltara



Sumber: BPS, diolah

Tabel V.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltara

Kondisi Ketenagakerjaan	2025	2026	Pertumbuhan	
	Ags	Mei	Orang	%
Jumlah Penduduk 15+ (orang)	569.126	575.587	6.461	1,14
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	395.803	390.734	-5.069	-1,28
Jumlah Bekerja (orang)	380.572	375.491	-5.081	-1,34
Jumlah Penganggur (orang)	15.231	15.243	12	0,08
Bukan Angkatan Kerja (orang)	173.323	184.853	11.530	6,65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, %)	69,55	67,88	-1,67	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85	3,90	0,05	

Sumber: BPS, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pada Mei 2026, TPT tercatat sebesar 3,90%, tidak mengalami perubahan dibandingkan Februari 2026. Capaian tersebut juga masih berada pada level yang sama dengan Februari 2025, menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja di Kalimantan Utara relatif stabil. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kapasitas penyerapan tenaga kerja di daerah masih cukup baik dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja (Grafik V.2).

Menurut lapangan usaha utama, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Utara. Pada Mei 2026, sektor ini menyerap 133.918 orang atau 35,66% dari total tenaga kerja, meningkat 8,00% (yoy). Pangsa tersebut juga lebih besar dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 32,58%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penopang utama struktur ketenagakerjaan di Kalimantan Utara (Tabel V.2).

Selain sektor pertanian, beberapa lapangan usaha mencatat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi pada Mei 2026. Sektor Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 122,65% (yoy), diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh 18,40% (yoy). Pertumbuhan juga terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 9,24%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,51%, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 35,28%. Sementara itu, sektor Jasa

Lainnya tumbuh 2,04% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah sektor, khususnya sektor informasi, pertambangan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan (Tabel V.2).

Disisi lain, beberapa sektor mengalami kontraksi penyerapan tenaga kerja pada Mei 2026. Penurunan terdalam terjadi pada sektor Jasa Keuangan, Real Estat, dan Asuransi sebesar 79,82% (yoy), diikuti sektor Konstruksi sebesar 34,77%, Jasa Pendidikan sebesar 24,94%, serta Akomodasi dan Makan Minum sebesar 19,04%. Kontraksi juga terjadi pada sektor Industri Pengolahan sebesar 11,94%, Penyediaan Air, Listrik dan Gas sebesar 9,20%, Jasa Perusahaan sebesar 7,90%, dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,73% (yoy). Secara keseluruhan, jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 tercatat 375.491 orang, dengan pertumbuhan sebesar 0,52% (yoy) (Tabel V.2).

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara pada Mei 2026 masih didominasi oleh kelompok Buruh/Karyawan/Pegawai, yang mencapai 178.082 orang atau 47,43% dari total penduduk bekerja. Jumlah tersebut menurun sebesar 1,6% dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 180.949 orang. Meskipun mengalami penurunan, kelompok Buruh/Karyawan/Pegawai tetap menjadi kategori pekerjaan dengan pangsa terbesar dalam struktur penduduk bekerja di Kalimantan Utara (Tabel V.3).

Tabel V.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltara

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2025		Growth (yoy)	Mei 2026		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	124.003	32,58%	2,75%	133.918	35,66%	8,00%
Pertambangan dan Penggalian	15.421	4,05%	27,18%	18.258	4,86%	18,40%
Industri Pengolahan	28.075	7,38%	3,25%	24.723	6,58%	-11,94%
Pengadaan Air, Listrik dan Gas	3.653	0,96%	-6,55%	3.317	0,88%	-9,20%
Konstruksi	19.586	5,15%	9,04%	12.775	3,40%	-34,77%
Perdagangan Besar dan Eceran	58.988	15,50%	-8,61%	55.021	14,65%	-6,73%
Transportasi dan Pergudangan	13.804	3,63%	-3,21%	14.702	3,92%	6,51%
Akomodasi dan Makan Minum	24.864	6,53%	-4,22%	20.131	5,36%	-19,04%
Informasi dan Komunikasi	1.956	0,51%	74,18%	4.355	1,16%	122,65%
Jasa Keuangan, Real Estat, dan Asuransi	3.395	0,89%	2,88%	685	0,18%	-79,82%
Jasa Perusahaan	5.769	1,52%	-6,33%	5.313	1,41%	-7,90%
Administrasi Pemerintahan	37.612	9,88%	12,59%	41.089	10,94%	9,24%
Jasa Pendidikan	23.350	6,14%	8,72%	17.527	4,67%	-24,94%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.542	2,51%	-13,00%	12.908	3,44%	35,28%
Jasa Lainnya	10.554	2,77%	-30,97%	10.769	2,87%	2,04%
Total	380.572	100,00%	4,51%	375.491	100,00%	0,52%

Sumber: BPS, diolah

Beberapa kelompok status pekerjaan mengalami peningkatan pada Mei 2026. Kelompok Berusaha Dibantu Buruh Tetap tumbuh sebesar 23,2%, dari 15.262 orang pada Agustus 2025 menjadi 18.806 orang pada Mei 2026. Peningkatan paling signifikan terjadi pada kelompok Pekerja Bebas di Nonpertanian, yang meningkat sebesar 130,9%, dari 6.958 orang menjadi 16.065 orang. Sementara itu, kelompok Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar meningkat sebesar 0,5%, dari 38.981 orang menjadi 39.181 orang.

Di sisi lain, beberapa kelompok status pekerjaan mengalami penurunan. Kelompok Berusaha Sendiri turun sebesar 11,3%, dari 72.399 orang pada Agustus 2025 menjadi 64.215 orang pada Mei 2026. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap juga menurun sebesar 10,4%, dari 48.462 orang menjadi 43.430 orang, sementara Pekerja Bebas di Pertanian turun sebesar 10,5%, dari 17.561 orang menjadi 15.712 orang. Secara keseluruhan, jumlah penduduk bekerja menurun sebesar 1,3%, dari 380.572 orang pada Agustus 2025 menjadi 375.491 orang pada Mei 2026 (Tabel V.3).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara pada Mei 2026 masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah, dengan jumlah 116.409 orang atau 31,00% dari total penduduk bekerja. Jumlah tersebut menurun sebesar 4,55% dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 121.958 orang. Meskipun mengalami penurunan, kelompok SD ke bawah tetap memiliki pangsa terbesar dalam struktur pendidikan penduduk bekerja di Kalimantan Utara (Tabel V.4).

Peningkatan jumlah penduduk bekerja terjadi pada kelompok lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Lulusan SMA meningkat sebesar 3,62%, dari 92.801 orang pada Agustus 2025 menjadi 96.156 orang pada Mei 2026, dengan pangsa sebesar 25,61%. Sementara itu, lulusan Perguruan Tinggi meningkat sebesar 5,59%, dari 70.706 orang menjadi 74.660 orang, dengan pangsa yang turut meningkat menjadi 19,88%. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada kelompok berpendidikan menengah atas dan tinggi.

Di sisi lain, kelompok lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami penurunan sebesar 8,42%, dari 52.512 orang pada Agustus 2025 menjadi 48.091 orang pada Mei 2026. Penurunan juga terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 5,68%, dari 42.595 orang menjadi 40.175 orang. Secara keseluruhan, jumlah penduduk bekerja menurun sebesar 1,34%, dari 380.572 orang pada Agustus 2025 menjadi 375.491 orang pada Mei 2026 (Tabel V.4).

5.2. Kesejahteraan

5.2.1. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS per Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 40,54 ribu jiwa atau 5,18% dari total penduduk. Angka ini menurun dibandingkan kondisi September 2025 yang sebesar 42,45 ribu jiwa atau 5,47%, atau berkurang sebanyak 1,91 ribu jiwa secara absolut dan 0,29 persen poin secara persentase.

Tabel V.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2025		Growth (yoy)	Mei 2026		Perubahan Ags 25'–Mei 26'
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
Berusaha sendiri	72.399	19,02%	-8,0%	64.215	17,10%	-11,3%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	48.462	12,73%	0,6%	43.430	11,57%	-10,4%
Berusaha dibantu buruh tetap	15.262	4,01%	21,7%	18.806	5,01%	23,2%
Buruh/karyawan/pegawai	180.949	47,55%	3,3%	178.082	47,43%	-1,6%
Pekerja bebas di pertanian	17.561	4,61%	130,7%	15.712	4,18%	-10,5%
Pekerja bebas di nonpertanian	6.958	1,83%	-14,5%	16.065	4,28%	130,9%
Pekerja keluarga/tak dibayar	38.981	10,24%	-18,9%	39.181	10,43%	0,5%
Total	380.572	100,00%	0,6%	375.491	100,00%	-1,3%

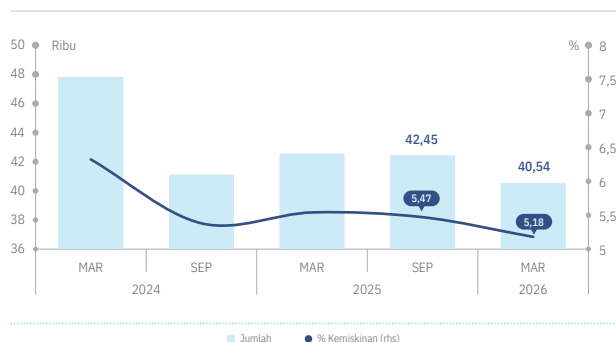
Sumber: BPS, diolah

Tabel V.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan	Agustus 2025		Growth (yoy)	Mei 2026		Perubahan Ags 25'–Mei 26'
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
SD ke Bawah	121.958	32,05%	-1,31%	116.409	31,00%	-4,55%
Sekolah Menengah Pertama	52.512	13,80%	-5,63%	48.091	12,81%	-8,42%
Sekolah Menengah Atas	92.801	24,38%	4,64%	96.156	25,61%	3,62%
Sekolah Menengah Kejuruan	42.595	11,19%	-1,29%	40.175	10,70%	-5,68%
Perguruan Tinggi	70.706	18,58%	5,05%	74.660	19,88%	5,59%
Total	380.572	100,00%	0,58%	375.491	100,00%	-1,34%

Sumber: BPS, diolah

Grafik V.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kaltara periode 2024 – 2026



Sumber: BPS, diolah

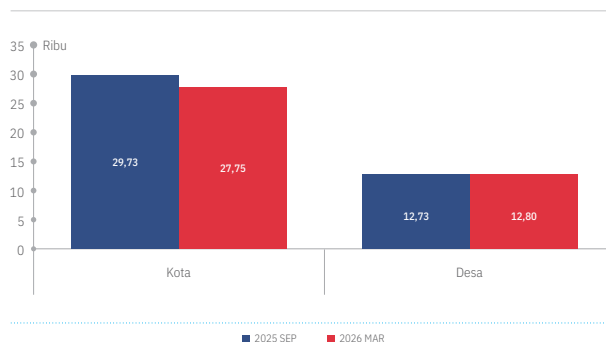
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan setelah sebelumnya relatif meningkat dari September 2024 hingga Maret 2025 (Grafik V.3).

Secara spasial, perkembangan kemiskinan menunjukkan dinamika yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin menurun dari 29,73 ribu orang pada September 2025 menjadi 27,75 ribu orang pada Maret 2026, atau berkurang sebesar 1,98 ribu orang. Sebaliknya, di daerah perdesaan, jumlah penduduk miskin sedikit meningkat dari 12,73 ribu orang menjadi 12,80 ribu orang, atau bertambah sebesar 0,07 ribu orang. Dengan demikian, penurunan jumlah penduduk miskin secara agregat terutama ditopang oleh perbaikan kondisi kemiskinan di wilayah perkotaan, sementara wilayah perdesaan menunjukkan peningkatan (Grafik V.4).

Struktur garis kemiskinan di Kalimantan Utara pada Maret 2026 masih didominasi oleh komponen konsumsi makanan, dengan pola komoditas penyumbang yang relatif berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan, lima komoditas utama penyumbang Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah beras sebesar 23,13%, rokok kretek filter sebesar 16,88%, telur ayam ras sebesar 7,29%, daging ayam ras sebesar 6,53%, dan bandeng sebesar 6,21%. Kelima komoditas tersebut secara keseluruhan menyumbang sekitar 60,04% terhadap GKM perkotaan.

Sementara itu, di wilayah perdesaan, lima komoditas dengan kontribusi terbesar terdiri atas beras sebesar 27,25%, rokok kretek filter sebesar 20,21%, daging ayam ras sebesar 5,13%, bandeng sebesar 4,95%, dan telur ayam ras sebesar 4,95%. Kelima komoditas tersebut secara keseluruhan menyumbang sekitar 62,49% terhadap GKM perdesaan. Selain itu, komoditas lain yang memiliki kontribusi cukup besar di perdesaan antara lain gula pasir sebesar 4,39%, kopi bubuk dan kopi instan (*sachet*) sebesar 3,68%, mi instan sebesar 3,22%, bawang merah sebesar 2,71%, dan kue basah sebesar 2,25% (Tabel 4).

Grafik V.4. Perkembangan Penduduk Miskin Kaltara di Perkotaan dan Desa periode 2025 dan 2026



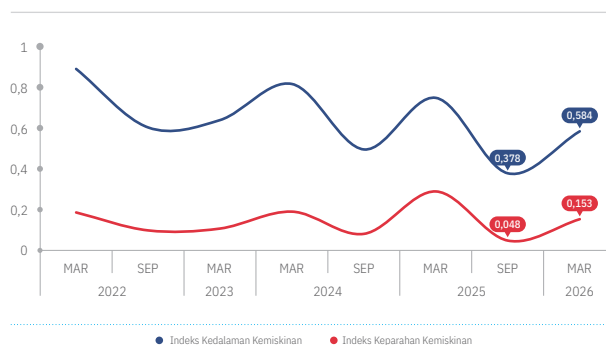
Sumber: BPS, diolah

Dari kedua wilayah tersebut, beras dan rokok kretek filter menjadi dua komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap GKM. Kontribusi beras tercatat sebesar 23,13% di perkotaan dan 27,25% di perdesaan, sedangkan rokok kretek filter masing-masing sebesar 16,88% dan 20,21%. Tingginya kontribusi kedua komoditas tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga dan pola konsumsi komoditas utama memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan garis kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,584, meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,378. Peningkatan P1 menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, nilai P1 pada Maret 2026 masih lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,748, sehingga secara tahunan kondisi kedalaman kemiskinan masih relatif lebih baik.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,048 pada September 2025 menjadi 0,153 pada Maret 2026. Peningkatan P2 mengindikasikan adanya kenaikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, sehingga kondisi kemiskinan menjadi lebih beragam di dalam kelompok

Grafik V.5. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Periode 2022-2026



Sumber: BPS, diolah

penduduk miskin. Namun, nilai P2 Maret 2026 masih lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,289, menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan masih lebih rendah dibandingkan periode tersebut.

5.2.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Utara pada Juni 2026 tercatat sebesar 116,44, meningkat sebesar 1,14% (yoy) dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 115,13. Peningkatan NTP tersebut didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 4,45%, dari 132,70 menjadi 138,61. Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) juga mengalami peningkatan sebesar 3,28%, dari 115,27 menjadi 119,05. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima petani relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga yang harus dibayar petani, sehingga daya tukar petani secara keseluruhan mengalami perbaikan (Tabel V.5).

Peningkatan Ib terutama tercermin dari kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 2,73% (yoy), dari 116,03 menjadi 119,20, serta Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) yang tumbuh sebesar 3,56%, dari 111,24 menjadi 115,20. Hal ini menunjukkan bahwa biaya konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi petani tetap mengalami peningkatan, meskipun kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan harga yang diterima petani.

Secara sektoral, peningkatan indeks tertinggi terjadi pada subsektor perikanan yang tumbuh sebesar 4,47%, diikuti hortikultura sebesar 3,42%. Sementara itu, subsektor tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 1,00%, tanaman perkebunan rakyat turun sebesar 0,68%, dan peternakan turun sebesar 0,46%. Secara keseluruhan, peningkatan NTP sebesar 1,14% menunjukkan bahwa pada Juni 2026 kenaikan harga yang diterima petani masih mampu mengimbangi kenaikan harga yang dibayar, sehingga kondisi daya tukar petani di Kalimantan Utara mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel V.5).

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) di Provinsi Kalimantan Utara pada Juni 2026 tercatat sebesar 102,16, meningkat sebesar 4,47% (yoy) dibandingkan Juni 2025. Peningkatan NTNP tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya tukar nelayan dan pembudidaya ikan, seiring dengan kenaikan harga hasil tangkapan dan komoditas budidaya yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya yang harus dibayar.

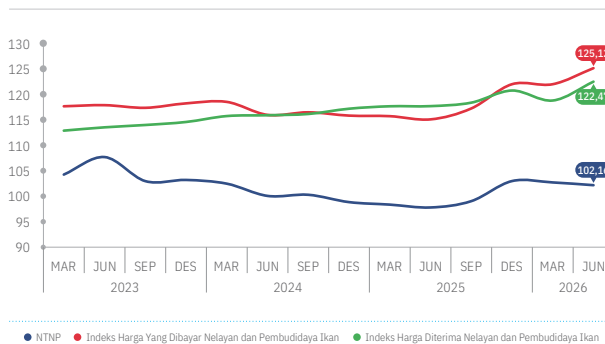
Secara rinci, Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) pada Juni 2026 tercatat sebesar 125,12, meningkat sebesar 8,73% (yoy) dibandingkan Juni

Tabel V.5. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kaltara

Indeks	2025	2026	Growth (yoy)
	Juni	Juni	
Tanaman Pangan	102,81	101,78	-1,00%
Hortikultura	102,91	106,43	3,42%
Tanaman Perkebunan Rakyat	197,42	196,07	-0,68%
Peternakan	101,97	101,5	-0,46%
Perikanan	97,79	102,16	4,47%
Gabungan			
NTP	115,13	116,44	1,14%
Indeks Harga yg Diterima Petani (%)	132,7	138,61	4,45%
Indeks Harga yg Dibayar Petani (%)	115,27	119,05	3,28%
a. Indeks Konsumsi RT	116,03	119,2	2,73%
b. Indeks BPPBM	111,24	115,2	3,56%

Sumber: BPS, diolah

Grafik V.6. NTNP, Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan



Sumber: BPS, diolah

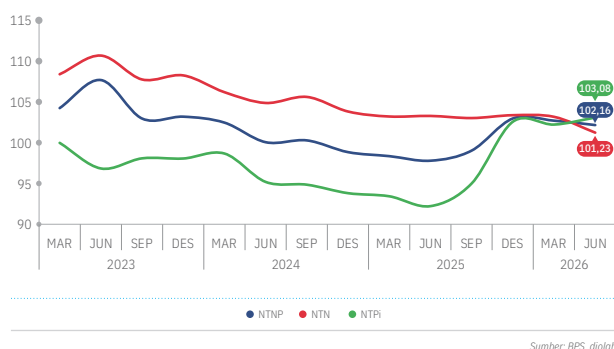
2025. Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar (Ib) juga mengalami peningkatan sebesar 4,08% (yoy), dari 117,67 pada Juni 2025 menjadi 122,47 pada Juni 2026. Dengan demikian, pertumbuhan It yang lebih tinggi dibandingkan Ib menjadi faktor utama peningkatan NTNP pada Juni 2026, yang mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan relatif lebih mampu mengimbangi kenaikan biaya konsumsi dan produksi yang dihadapi (Tabel V.6).

Dari sisi nelayan tangkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Juni 2026 tercatat sebesar 101,23, menurun sebesar 1,98% (yoy) dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 103,28. Penurunan NTN menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima nelayan tangkap belum mampu mengimbangi peningkatan biaya yang harus dibayar, sehingga daya tukar nelayan tangkap mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) pada Juni 2026 tercatat sebesar 103,08, meningkat sebesar 11,78% (yoy) dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 92,22.

Peningkatan tersebut menunjukkan membaiknya daya tukar pembudidaya ikan, seiring dengan kenaikan harga komoditas hasil budidaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya yang harus dibayar (Grafik V.7).

Grafik V.7. NTNP, NTN, dan NTPI



5.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. IPM tercatat sebesar 71,57 pada 2021, meningkat menjadi 72,21 pada 2022, dan 72,88 pada 2023. Tren positif tersebut berlanjut pada 2024 dengan capaian 73,41, serta kembali meningkat pada 2025 menjadi 74,04, atau tumbuh 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik V.8). Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Utara.

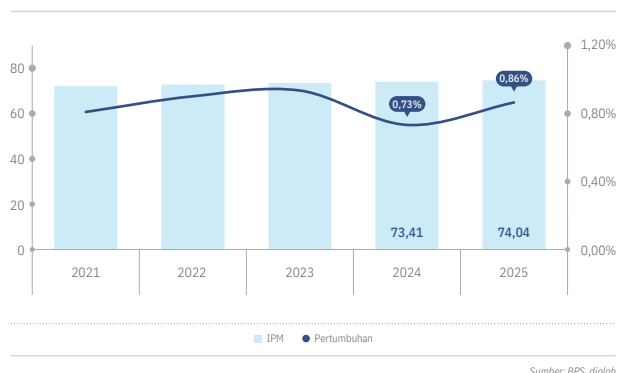
Peningkatan IPM pada tahun 2025 didukung oleh perbaikan pada seluruh dimensi penyusunnya. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) meningkat dari 73,57 tahun pada 2024 menjadi 73,68 tahun pada 2025. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,21 tahun menjadi 13,31 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,35 tahun menjadi 9,44 tahun.

Sementara itu, dimensi standar hidup layak juga menunjukkan penguatan yang tercermin dari meningkatnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari Rp10.197 ribu pada 2024 menjadi Rp10.568 ribu pada 2025. Kenaikan pada seluruh dimensi tersebut mengindikasikan perbaikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kemampuan ekonomi.

Secara keseluruhan, capaian IPM Kalimantan Utara pada tahun 2025 menunjukkan keberlanjutan proses pembangunan manusia yang inklusif. Meskipun laju pertumbuhan relatif moderat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, peningkatan yang konsisten di seluruh indikator utama mencerminkan terjaganya momentum pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Berdasarkan perbandingan secara regional Kalimantan pada tahun 2025, IPM Kalimantan Utara menempati peringkat kelima di wilayah Kalimantan dengan nilai 74,04, berada di bawah Kalimantan Timur (79,39), Kalimantan Selatan (76,10), Kalimantan Tengah (74,86), dan Kalimantan Barat (72,09), serta berada pada peringkat ke-26 secara nasional.

Grafik V.8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara



Tabel V.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Dimensi Penyusunnya

Dimensi	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	72,65	73,51	73,54	73,57	73,68
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,94	13,06	13,20	13,21	13,31
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,11	9,27	9,34	9,35	9,44
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	9.075	9.350	9.734	10.197	10.568

Sumber : Bank Indonesia

Tabel V.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan

Provinsi	2025			Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp) 2025	IPM 2025		
	UHH	HLS	RLS		Nilai	Pertumbuhan	Nasional
Kalimantan Barat	74,28	12,69	8,07	10.689	72,09	0,9	32
Kalimantan Tengah	74,01	12,78	8,96	12.612	74,86	0,58	20
Kalimantan Selatan	74,49	13,12	8,81	13.757	76,1	0,91	13
Kalimantan Timur	75,28	14,04	10,1	14.254	79,39	0,6	4
Kalimantan Utara	73,68	13,31	9,44	10.568	74,04	0,63	26
Indonesia	74,47	13,3	9,07	12.341	75,9	0,88	-

Sumber: BPS, diolah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara diharapkan mampu mendukung kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, seiring dengan pengembangan berbagai proyek strategis di wilayah tersebut, termasuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong transformasi ekonomi daerah.

5.2.4. GINI Ratio

Berdasarkan data BPS Maret 2026, Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,253, sedikit meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,251. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya sedikit kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan pada tingkat provinsi. Secara spasial, perkembangan ketimpangan menunjukkan pola yang berbeda. Gini Ratio di wilayah perkotaan menurun dari 0,255 pada September 2025 menjadi 0,253 pada Maret 2026, sementara di wilayah perdesaan meningkat dari 0,242 menjadi 0,244. Dengan demikian, penurunan ketimpangan di perkotaan belum sepenuhnya diikuti oleh wilayah perdesaan (Tabel V.8).

Tabel V.8. GINI Ratio Penduduk di Kaltara Menurut Daerah

Ukuran Ketimpangan	Sep 2025			Mar 2026		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
Gini Ratio	0,255	0,242	0,251	0,253	0,244	0,253
Bank Dunia 40% Terbawah	24,84	24,42	24,89	25,00	25,56	25,00

Sumber: BPS, diolah

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan yang umum digunakan adalah persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah. Indikator ini menggambarkan proporsi total pengeluaran yang dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran terendah. Semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah, semakin baik pemerataan distribusi pengeluaran. Menurut klasifikasi Bank Dunia, ketimpangan termasuk kategori rendah apabila persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2026, persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di Kalimantan Utara tercatat sebesar 25,00%, meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 24,89%. Peningkatan sebesar 0,11 poin persentase tersebut mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pengeluaran pada kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Capaian tersebut juga masih jauh di atas batas 17 persen menurut klasifikasi Bank Dunia, sehingga distribusi pengeluaran di Kalimantan Utara masih berada dalam kategori ketimpangan rendah (Tabel V.8).

Secara nasional, Kalimantan Utara tetap termasuk provinsi dengan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Pada Maret 2026, Gini Ratio Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,253, menempatkannya pada posisi ke-2 secara nasional dengan Gini Ratio terendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kalimantan Utara relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya di Indonesia.

Tabel V.9. Perbandingan GINI Ratio Se-Kalimantan

Provinsi	2025		2026	Posisi Nasional (Gini Ratio terendah)	September Mar-Sep 2025 (yoy)
	Mar	Mar	Mar		
Kalimantan Barat	0,316	0,308	0,311	16	0,97%
Kalimantan Tengah	0,292	0,284	0,278	6	-2,11%
Kalimantan Selatan	0,287	0,281	0,301	13	7,12%
Kalimantan Timur	0,312	0,310	0,312	18	0,65%
Kalimantan Utara	0,261	0,251	0,253	2	0,80%

Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, Kalimantan Utara juga memiliki Gini Ratio terendah, yaitu 0,253, lebih rendah dibandingkan Kalimantan Tengah sebesar 0,278, Kalimantan Selatan sebesar 0,301, Kalimantan Barat sebesar 0,311, dan Kalimantan Timur sebesar 0,312. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kalimantan Utara secara relatif masih lebih merata dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan (Tabel V.9).



Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 6,3%-7,1% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh akselerasi LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. LU Industri Pengolahan diperkirakan meningkat sejalan dengan operasionalisasi produksi komersial dan ekspor dari smelter aluminium di Bulungan serta kontribusi produksi dan pengiriman bubur kertas (pulp) dari perusahaan penghasil bubur kertas di Tarakan. LU Perdagangan juga diperkirakan tumbuh meningkat seiring peningkatan pasokan dan distribusi barang untuk mendukung aktivitas industri, pembangunan kawasan, serta konsumsi masyarakat. Sementara itu, LU Konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat seiring sejumlah proyek strategis utama memasuki tahap finalisasi, dengan aktivitas konstruksi masih ditopang oleh pembangunan yang dilakukan oleh Industri Pengolahan, proyek real estate, dan pengembangan kawasan industri. Namun demikian, LU Pertambangan diperkirakan tumbuh melambat akibat harga batu bara saat ini dan sepanjang 2026 yang diperkirakan masih tetap tinggi, dengan risiko bias ke bawah pembatasan RKAB batu bara secara nasional, melemahnya permintaan ekspor, serta seiring habisnya cadangan batubara pada salah satu lokasi pertambangan di Bulungan.

Dari sisi harga, inflasi Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran inflasi nasional. Tekanan inflasi terutama perlu diwaspadai dari risiko gangguan produktivitas pertanian akibat anomali cuaca panas, kenaikan biaya produksi dan logistik, serta fluktuasi harga energi global. Ke depan, sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat melalui akselerasi program MBG, KDKMP, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

6.1. Prospek Perekonomian Global

Perang di Timur Tengah memperlambat prospek ekonomi global akibat disrupsi rantai pasok dan volatilitas harga komoditas, meskipun dampaknya sebagian diimbangi oleh akselerasi siklus teknologi global berkat adopsi kecerdasan buatan (AI). *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat menjadi 3,0% pada 2026 sebelum pulih ke 3,4% pada 2027. Di tingkat regional, ekonomi negara maju diperkirakan tumbuh 1,7% pada 2026 dan 1,8% pada 2027, sementara negara berkembang tumbuh 3,8% pada 2026 sebelum meningkat ke 4,5% pada 2027. Risiko terhadap prospek ekonomi masih cenderung ke arah bawah (*downside risk*) akibat potensi meluasnya konflik dan fragmentasi perdagangan, sehingga fokus kebijakan saat ini diarahkan pada pemulihan stabilitas harga serta memperkuat kondisi fiskal.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh 2,3% pada 2026, meningkat dari 2,1% pada 2025. Peningkatan pertumbuhan tersebut didukung oleh kebijakan fiskal, kondisi keuangan yang akomodatif, serta keberlanjutan investasi bisnis terkait teknologi dan kekuatan produktivitas, dengan dampak perang yang terbatas mengingat status AS sebagai eksportir neto energi. Sementara itu, ekonomi Euro Area diperkirakan tumbuh melambat menjadi 0,9% pada 2026 dari pertumbuhan 2025 sebesar 1,4%, yang dipengaruhi oleh dampak bawaan negatif (*negative carryover*) dari kuartal pertama, momentum pertumbuhan yang melambat, serta tekanan dari tingginya harga energi dan lemahnya keyakinan konsumen. Ekonomi Jepang diproyeksikan tumbuh melambat menjadi 0,6% pada 2026 dari 1,1% pada 2025 akibat dampak kenaikan harga energi yang hanya dapat diredam sebagian oleh kebijakan dukungan fiskal. Di Inggris, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun dari 1,4% pada 2025 menjadi 1,0% pada 2026 akibat guncangan energi yang terjadi sebelum akhirnya diperkirakan pulih pada 2027 seiring meredanya guncangan tersebut. Lebih lanjut, ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh 4,6% pada 2026, melambat dari tahun 2025 sebesar 5,0%, yang dipengaruhi oleh tingginya harga minyak global serta ketidakpastian yang berkepanjangan dan hambatan struktural (*structural headwinds*) (Tabel VI.1).

Disinflasi global terindikasi akan terjeda pada 2026, dan diperkirakan akan kembali terjadi di 2027. Inflasi global diproyeksikan meningkat dari 4,1% (yoy) pada 2025 menjadi 4,7% (yoy) pada 2026, sebelum kembali menurun menjadi 3,9% (yoy) pada 2027. Peningkatan perkiraan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya harga energi dan pangan di tingkat global. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi negara maju diperkirakan sebesar 3,0% (yoy) pada 2026, meningkat dari inflasi 2025 sebesar 2,5% (yoy). Sementara

itu, inflasi negara berkembang diperkirakan sebesar 5,8% (yoy) pada 2026, meningkat dari inflasi 2025 sebesar 5,2% (yoy).

Volume perdagangan global diproyeksikan tumbuh melambat pada tahun 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan volume perdagangan (barang dan jasa) global akan turun dari 5,0% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 3,5% (yoy) pada tahun 2026, sebelum akhirnya pulih kembali ke tingkat 4,3% (yoy) pada tahun 2027. Perlambatan ini sebagai dampak negatif dari perang dagang, aktivitas pengiriman barang yang dipercepat, serta penyesuaian bertahap pada jalur perdagangan global dan rantai produksi melalui pengalihan rute serta diversifikasi dagang. Ke depan, risiko akselerasi fragmentasi perdagangan, hambatan nontarif, serta potensi perluasan konflik di Timur Tengah yang dapat mengganggu rantai pasok secara lebih luas masih menjadi ancaman utama bagi aktivitas perdagangan global.

Arah kebijakan moneter dan fiskal pada tahun 2026 diperkirakan akan bervariasi di berbagai negara namun secara umum cenderung kontraktif guna meredam tekanan inflasi. Di sektor moneter, suku bunga kebijakan di

Tabel VII.1. Perbandingan Ekonomi Negara Lain

Indikator	%yoy			
	2024	2025	2026	2027
PDB Global	3,3	3,5	3,0	3,4
Negara Maju	1,8	1,9	1,7	1,8
AS	2,8	2,1	2,3	2,2
Euro Area	0,9	1,4	0,9	1,2
Jerman	-0,5	0,2	0,7	1,0
Prancis	1,1	0,9	0,6	0,9
Italia	0,7	0,5	0,5	0,5
Spanyol	3,5	2,8	2,1	1,8
Jepang	-0,2	1,1	0,6	0,7
Inggris	1,1	1,4	1,0	1,3
Negara Berkembang	4,3	4,5	3,8	4,5
Tiongkok	5,0	5,0	4,6	4,1
India	6,5	7,7	6,4	6,7
Rusia	4,3	1,0	1,1	1,1
Brazil	3,4	2,3	2,4	2,2
Afrika Selatan	0,5	1,1	1,1	1,3
Inflasi Global	5,8	4,1	4,7	3,9
Negara Maju	2,6	2,5	3,0	2,4
Negara Berkembang	7,9	5,2	5,8	4,8
Volume Perdagangan Global (Barang & Jasa)	3,6	5,0	3,5	4,3

Sumber: IMF-World Economic Outlook Update, Juli 2026, diolah

Amerika Serikat dan Euro Area diperkirakan akan dipertahankan sebagian besar stabil secara riil (*ex-ante real terms*), dengan pasar mengantisipasi jalur suku bunga nominal yang lebih tinggi akibat munculnya kembali tekanan inflasi. Sementara itu, suku bunga kebijakan di Jepang diperkirakan akan bergerak secara bertahap menuju tingkat netral (*neutral setting*). Di sisi fiskal, kebijakan fiskal di kelompok negara maju diperkirakan akan bersifat netral secara umum pada tahun 2026 sebelum mulai mengetat setelahnya. Pada negara berkembang, kebijakan fiskal juga diproyeksikan akan mengetat secara bertahap, dengan fokus untuk mulai menghapus dukungan fiskal terkait energi guna membangun kembali penyangga (*buffers*) fiskal di tengah tingginya utang publik global.

6.2. Prospek Perekonomian Indonesia

Momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu terus didorong untuk memperkuat momentum pertumbuhan. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,29% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan tersebut banyak ditopang oleh stimulus fiskal yang berdampak pada peningkatan konsumsi Pemerintah dan investasi. Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi bersumber dari peningkatan belanja pegawai termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus ditingkatkan memanfaatkan momentum kuatnya stimulus fiskal. Investasi, khususnya investasi bangunan, meningkat dipengaruhi oleh realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di tengah investasi swasta yang perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, kinerja ekspor juga perlu terus didorong guna memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh implementasi berbagai program stimulus Pemerintah dan keyakinan pelaku ekonomi yang terjaga. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran yang ditetapkan Pemerintah. Pada Juli 2026, inflasi IHK tercatat sebesar 2,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,34% (yoy). Perkembangan ini didukung oleh inflasi inti yang terjaga sebesar 2,76% (yoy) berkat konsistensi kebijakan Bank Indonesia. Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat 3,58% (yoy) seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina, sedangkan inflasi kelompok *volatile food* (VF) melambat menjadi 2,52% (yoy) dipengaruhi oleh panen komoditas hortikultura. Pengendalian inflasi ini merupakan hasil dari

konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui TPIP dan TPID dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) guna mengendalikan inflasi pangan termasuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca seperti El Nino. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027.

Kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%. Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (*"pro-stability"*). Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*"pro-growth"*). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, didukung langkah-langkah baru seperti persiapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU) per 1 September 2026 serta Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) per 1 Oktober 2026. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung digitalisasi sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, antara lain melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang telah diluncurkan pada 17 Agustus 2026 serta kesiapan perluasan kebijakan MDR QRIS 0% untuk transaksi hingga Rp100.000,- yang dimulai per tanggal 1 Oktober 2026.

6.3. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltara

Perekonomian Prov. Kaltara pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan realisasi PDRB pada tahun 2025 dalam kisaran 6,3-7,1% (yoy). Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap positif terutama didorong oleh akselerasi pada LU Industri Pengolahan serta kinerja LU Perdagangan. LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh signifikan, sejalan dengan mulai masuknya fase produksi komersial dan ekspor dari hasil pengolahan smelter aluminium di Bulungan serta peningkatan produksi bubur kertas (*pulp*) di Tarakan. Di sisi lain, pertumbuhan CPO

diproyeksikan melandai akibat *base-year effect* yang tinggi pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan Industri Pengolahan tersebut, LU Perdagangan diprakirakan tumbuh meningkat didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi akibat operasional pabrik pengolahan baru, pemenuhan kebutuhan barang modal untuk kawasan industri, serta aktivitas belanja masyarakat yang tetap terjaga. Sebaliknya, LU Konstruksi diprakirakan mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh pembangunan sejumlah proyek strategis, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Bulungan, yang telah memasuki tahap finalisasi dan penyelesaian. Sementara itu, LU Pertambangan diprakirakan mengalami perlambatan dan kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada sektor batubara yang tertahan oleh kebijakan pembatasan RKAB batubara secara nasional serta melemahnya permintaan ekspor, diiringi risiko bias ke bawah seiring dengan telah habisnya cadangan batu bara pada salah satu pertambangan di Kabupaten Bulungan.

LU Industri Pengolahan Prov. Kaltara pada keseluruhan tahun 2026 diprakirakan meningkat signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 sebesar 8,99% (yoy). Akselerasi ini terutama didorong oleh beroperasinya *Smelter* Aluminium di Bulungan ke fase produksi komersial dan ekspor aluminium dengan target pencapaian kapasitas penuh pada Oktober 2026, serta didorong oleh harga aluminium global yang tinggi. Kinerja sektor ini juga ditopang oleh kontribusi positif dari produksi dan pengiriman bubur kertas (*pulp*) dari perusahaan penghasil bubur kertas di Tarakan. Di sisi lain, produksi CPO diprakirakan tumbuh melandai akibat faktor *base-year effect* yang tinggi pada tahun sebelumnya, meskipun aktivitas industrinya tetap terjaga seiring tingkat permintaan dan harga jual yang stabil. Sementara itu, aktivitas produksi olahan kayu lainnya seperti serpih kayu dan kayu lapis diproyeksikan masih mencatat pertumbuhan positif untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, walaupun kinerja komoditas *plywood* masih relatif tertahan akibat tingkat permintaan dan harga jual global yang masih rendah.

LU Perdagangan pada keseluruhan tahun 2026 diprakirakan meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 9,84% (yoy). Peningkatan LU Perdagangan didorong oleh akselerasi produksi dari Industri pengolahan yang meningkatkan pasokan barang dan kebutuhan distribusi, disertai belanja barang modal kawasan industri, pembangunan tahap II PT PRI, program MBG, serta aktivitas konsumsi selama penyelenggaraan Irawa dan inflasi yang tetap terjaga. Namun, kinerja LU Perdagangan diprakirakan menghadapi bias ke bawah seiring moderasi optimisme konsumen yang tercermin dari perlambatan IKE dan IKK, serta pertumbuhan kredit sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang masih terbatas.

LU Konstruksi pada keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tumbuh melambat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 yang tumbuh kuat sebesar 11,17% (yoy). Perlambatan LU Konstruksi disebabkan oleh sejumlah proyek strategis utama, seperti KIHI di Bulungan termasuk *smelter* aluminium PT KAI, yang telah memasuki tahap finalisasi dan penyelesaian akhir. Namun demikian, aktivitas konstruksi masih ditopang oleh pembangunan tahap II PT PRI di Tarakan, proyek real estate, serta kelanjutan pengembangan infrastruktur kawasan industri. Di sisi lain, akselerasi konstruksi tertahan oleh penurunan belanja modal pemerintah dan keterbatasan fiskal yang berdampak pada proyek infrastruktur konektivitas perbatasan, serta diperberat oleh kontraksi penjualan semen, perlambatan kredit konstruksi, dan tingginya biaya logistik material proyek.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Prov. Kaltara pada keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tumbuh melambat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,60% (yoy). Perlambatan LU Pertanian terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi tanaman pangan, khususnya padi, akibat berakhirnya masa panen raya dan kondisi cuaca panas, sementara produktivitas masih menghadapi kendala harga pupuk, biaya logistik, dan mobilisasi alsintan. Kinerja perkebunan diprakirakan melandai akibat *base-year effect*, meskipun tingkat harga TBS masih cukup menopang daya beli dan *cash flow* petani sawit, sedangkan perikanan menunjukkan perkembangan beragam dengan dukungan peningkatan hasil tangkap namun tertahan oleh pelemahan harga udang global dan indikasi perlambatan produksi. Sementara itu, subsektor kehutanan masih terbatas akibat lemahnya permintaan bahan baku industri kayu lapis nasional serta berlanjutnya risiko perlambatan ekonomi global dan pasar properti di negara tujuan ekspor.

LU Pertambangan dan Penggalian Prov. Kaltara diprakirakan mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat berkontraksi sebesar -1,09% (yoy). Kinerja sektor pertambangan masih terbatas akibat pembatasan RKAB batu bara, harga batubara yang belum membaik, serta pelemahan permintaan ekspor, dengan risiko bias ke bawah akibat habisnya cadangan batubara pada salah satu lokasi tambang di Kabupaten Bulungan. Secara triwulanan, kinerja pertambangan terindikasi membaik didukung oleh kondisi cuaca yang lebih mendukung operasional tambang, peningkatan harga batubara global, serta perbaikan permintaan ekspor. Namun, prospek jangka menengah masih menghadapi tantangan dari kebijakan transisi energi global dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di negara konsumen utama.

Dari sisi permintaan, perekonomian Prov. Kaltara 2026 diprakirakan tetap melanjutkan tren positif. Peningkatan ini terutama ditopang oleh akselerasi Konsumsi Pemerintah dan Net Ekspor, di tengah moderasi Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi (PMTB). Konsumsi Rumah Tangga diprakirakan melambat akibat pelemahan daya beli, ketidakpastian ekonomi, serta moderasi keyakinan konsumen dan kredit konsumsi, sementara Investasi tertahan oleh penyelesaian pembangunan kawasan industri di Bulungan, kinerja PMA yang masih terbatas, dan moderasi kredit investasi. Di sisi lain, Konsumsi Pemerintah diprakirakan menguat seiring implementasi program MBG, KDKMP, program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, serta akselerasi belanja pemerintah, sedangkan Net Ekspor meningkat didorong oleh dimulainya ekspor aluminium dan pengiriman *pulp* yang meningkat, di tengah kontraksi impor barang modal dan bahan baku.

Terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Prov. Kaltara ke depan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, risiko utama meliputi perlambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok, pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama yang dapat menahan ekspor komoditas unggulan dan produk industri pengolahan, serta kebijakan tarif perdagangan yang berpotensi menekan aktivitas perdagangan global. Selain itu, percepatan transisi energi dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di negara konsumen utama berisiko menurunkan prospek permintaan batubara dalam jangka menengah. Sementara itu, dari sisi internal, risiko yang perlu diwaspadai antara lain pembatasan RKAB batubara nasional dan habisnya cadangan batubara pada salah satu lokasi tambang di Kabupaten Bulungan, anomali cuaca panas yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian serta meningkatkan risiko karhutla, dan penurunan kapasitas fiskal daerah yang dapat menahan belanja pemerintah serta pembangunan infrastruktur konektivitas. Risiko tersebut diperberat oleh tingginya biaya distribusi dan logistik material konstruksi menuju lokasi proyek strategis akibat keterbatasan infrastruktur daerah.

Upaya dari Pemerintah Daerah memiliki peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Prov. Kaltara ke depan, terutama dalam mendorong kinerja LU utama, menjaga keberlanjutan proyek Investasi strategis, dan mempercepat realisasi dan kualitas belanja daerah. Implementasi operasionalisasi Industri Pengolahan di Kawasan KIPi perlu didorong agar bisa melibatkan lebih banyak tenant. Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah juga perlu dipercepat melalui *front-loading* belanja modal dan optimalisasi belanja yang produktif di tengah keterbatasan fiskal akibat penurunan TKD. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat

kapasitas ekonomi daerah, serta memastikan investasi dan belanja pemerintah memberikan kontribusi yang optimal.

6.4. Prospek Inflasi Kalimantan Utara

Inflasi Prov. Kaltara 2026 diprakirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Tekanan inflasi terutama bersumber dari risiko gangguan produksi hortikultura dan padi akibat fenomena El Niño, kenaikan biaya produksi dan logistik, serta fluktuasi harga energi global. Inflasi inti diprakirakan tetap terjaga, didukung oleh efisiensi belanja operasional pemerintah daerah dan koreksi harga emas global yang turut menurunkan harga emas perhiasan, meskipun tekanan *imported inflation* akibat nilai tukar masih perlu diwaspadai, khususnya di wilayah perbatasan. Tekanan inflasi kelompok *administered prices* diprakirakan meningkat, terutama didorong oleh kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi serta tarif angkutan udara, meskipun sebagian tekanan dapat diredam oleh kebijakan subsidi dan berbagai insentif transportasi pemerintah. Sementara itu, inflasi *volatile food* berpotensi meningkat seiring risiko penurunan produksi pangan akibat El Niño.

Sejumlah potensi risiko kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya perlu diwaspadai. Pada kelompok pangan bergejolak (*volatile food*), risiko utama bersumber dari ancaman kekeringan (El Niño) yang berpotensi menurunkan produksi pertanian (padi, cabai, bawang, dan sayuran) baik secara lokal maupun di wilayah sentra pemasok utama (seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah), peningkatan titik panas dan karhutla yang berisiko mengganggu kelancaran produksi dan alur distribusi logistik, serta potensi kenaikan permintaan komoditas tertentu seiring perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sisi *administered prices*, tekanan diwaspadai berasal dari normalisasi tarif angkutan udara pasca-berakhirnya program diskon pemerintah, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti fluktuasi harga minyak dunia dan depresiasi nilai tukar, serta risiko kenaikan harga LPG 3 kg di pangkalan wilayah perbatasan akibat panjangnya rantai distribusi dan tingginya biaya angkut. Sementara itu, pada kelompok inflasi inti, risiko kenaikan didorong oleh ketidakpastian global yang dapat meningkatkan biaya logistik, pergerakan nilai tukar yang berdampak pada harga barang impor, transmisi kenaikan UMP dan UMK, serta rencana percepatan implementasi biosolar B50 yang berpotensi mengurangi pasokan CPO domestik sebagai bahan baku minyak goreng.

Berdasarkan sejumlah risiko inflasi tersebut, berbagai program dan langkah koordinasi pengendalian inflasi melalui TPID semakin diperkuat, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Prov. Kaltara. Program unggulan TPID telah disusun dan diimplementasikan berdasarkan kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan

Komunikasi Efektif, dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan, khususnya di wilayah 3T. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah sentra pemasok terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis serta mengantisipasi risiko gangguan produksi akibat cuaca. Berbagai program unggulan yang dilakukan, seperti (i) pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diperkuat dengan operasional *Mini Distribution Center* (MDC) di Pasar Tenguyun Tarakan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bapokting; (ii) penguatan produksi pangan melalui dukungan sarana prasarana kepada kelompok tani/klaster serta percepatan program Optimasi Lahan (Oplah) dan dukungan alsintan; (iii) perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk pemenuhan komoditas pangan strategis, termasuk daging ayam, cabai, bawang merah, dan daging sapi; (iv) penguatan kelancaran distribusi melalui optimalisasi Tol Laut, fasilitasi distribusi pangan ke wilayah 3T, serta pengembangan kerja sama insentif logistik; (v) penguatan digitalisasi layanan publik melalui penerapan QRIS pada layanan kepelabuhanan; (vi) pemanfaatan data pangan secara digital melalui SIAP-SigapKu untuk mendukung pemantauan pasokan; serta (vii) penguatan koordinasi dan komunikasi melalui rapat rutin TPID, *High Level Meeting*, *capacity building*, dan kampanye edukasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.



Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Berth Occupancy Ratio (BOR)	Perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Alokasi Umum (DAU)	Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.
Dwelling Time	Total waktu yang dibutuhkan peti kemas selama di pelabuhan. Waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (container) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.
Ekspor-Import	Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).
Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)	Proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong ekonomi hijau dan transisi energi.
Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	Laporan yang berisi informasi yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh otoritas.

<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito).
<i>Month to month (mtm)</i>	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
<i>Makanan Bergizi Gratis (MBG)</i>	Program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat.
<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau non-lancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.
<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).
<i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
<i>Purchasing Managers Index (PMI)</i>	Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.
<i>Quarter to quarter (qta)</i>	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
<i>Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)</i>	Rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
<i>Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)</i>	Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya. TPID berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi
<i>Year on year (yoy)</i>	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

Pengarah

Agus Taufik

Penanggung Jawab

Reza Hidayat

Koordinator Penyusun & Editor

Raynaldo Ignatius Tiwa Handojo

Tim Penulis

M. Rizki Prasetyo

Rizkyandra Rifandana Hendrawan

Aditya Dwi Rahmadi

Rizkyandra Rifandana Hendrawan

Yahya Kurniawan

Muhammad Hafid Ridho

Haikal Muhammad

Arfian Saputra Siregar

David Ricardo Siaahan

Haikal Muhammad

Raynaldo Ignatius Tiwa Handojo

Riza Abditya Wijaya



Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Mulawarman No. 123 Tarakan
Kalimantan Utara 77117
Telp : 0551 - 3807777, Fax : 0551 - 3803131
www.bi.go.id

